

DOKUMEN

STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) KOTA BOGOR



TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir dalam Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor dengan baik.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Laporan Akhir ini terdiri dari : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Profil SSK Kota Bogor Tahun 2025, Bab 3 Kerangka Pengembangan SSK Kota Bogor, Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi SSK Kota Bogor, Bab 5 Program, Kegiatan, Dan Indikasi Pendanaan Sanitasi, dan Bab 6 Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta didalam Pembuatan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin

Bogor, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	V
SINGKATAN	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	3
1.3. RUANG LINGKUP	3
1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN.....	4
1.5. DASAR HUKUM	6
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB 2 GAMBARAN UMUM & PROFIL SANITASI KOTA BOGOR	11
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH	11
2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI	37
2.3 PERMASALAHAN SANITASI DAN AREA BERESIKO	118
BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI.....	128
3.1 VISI DAN MISI SANITASI	128
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI	130
3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH	137
BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI.....	141
4.1 PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK	144
4.2 PENGEMBANGAN SAMPAH PERKOTAAN.....	149
BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	154
5.1 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN	154
5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	156
5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH	158
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bogor	12
Tabel 2. 2 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan	14
Tabel 2. 3 Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024	16
Tabel 2. 4 Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor Tahun 2020–2024.....	18
Tabel 2. 5 Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per-Kecamatan Tahun 2024	20
Tabel 2. 6 Struktur Penduduk Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2020-2024	21
Tabel 2. 7 Capaian Akses Air Limbah Domestik	37
Tabel 2. 8 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat.....	38
Tabel 2. 9 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)	41
Tabel 2. 10 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan (SPALD-Terpusat).....	45
Tabel 2. 11 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2025- 2029.....	52
Tabel 2. 12 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting	53
Tabel 2. 13 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik	55
Tabel 2. 14 Data Lembaga Pengelola Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	58
Tabel 2. 15 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	65
Tabel 2. 16 Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah	66
Tabel 2. 17 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah.....	67
Tabel 2. 18 Jenis Media Promosi terkait Sanitasi di Kota Bogor	68
Tabel 2. 19 Capaian Akses Layanan Sampah	71
Tabel 2. 20 Timbulan Sampah.....	72
Tabel 2. 21 Sub Sistem Pengumpulan Sampah	73
Tabel 2. 22 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan.....	74
Tabel 2. 23 Sub Sistem Pengolahan Persampahan.....	76
Tabel 2. 24 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah.....	86
Tabel 2. 25 Analisis GAP Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2024- 2029.....	89
Tabel 2. 26 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Persampahan.....	91
Tabel 2. 27 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan...	92
Tabel 2. 28 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	92
Tabel 2. 29 Data Lembaga Pengelola Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	94
Tabel 2. 30 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan.....	99
Tabel 2. 31 Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan.....	100
Tabel 2. 32 Pemetaan Regulasi Daerah terkait Persampahan	101
Tabel 2. 33 Jenis Media Promosi Dalam Sanitasi di Kota Bogor	102

Tabel 2. 34 Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi di Kota Bogor	103
Tabel 2. 35 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting	106
Tabel 2. 36 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kota Bogor	117
Tabel 2. 37 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik Kota Bogor	119
Tabel 2. 38 Permasalahan Mendesak Sanitasi Air Limbah Domestik.....	120
Tabel 2. 39 Area Berisiko Sanitasi Persampahan Kota Bogor	122
Tabel 2. 40 Permasalahan Mendesak Sanitasi Persampahan	122
Tabel 2. 41 Area Berisiko Sanitasi Persampahan Kota Bogor	125
Tabel 2. 42 Permasalahan Mendesak Sanitasi Drainase	125
Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kota Bogor	129
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah Domestik).....	131
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Persampahan)	131
Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik.....	133
Tabel 3. 5 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan	135
Tabel 3. 6 Tahapan Pengembangan Sanitasi di Kota Bogor	137
Tabel 3. 7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Sanitasi.....	138
Tabel 3. 8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi 2025-2029	138
Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Operasional/Pemeliharaan Sektor Sanitasi.....	139
Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD untuk KebutuhanOperasional/Pemeliharaan Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029	139
Tabel 3. 11 Perkiraan Kemampuan APBD dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	140
Tabel 4. 1 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal (Matriks Internal Factor Evaluation – IFE)	144
Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal (Matriks External Factor Evaluation – EFE)	146
Tabel 4. 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik	148
Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal (Matriks Internal Factor Evaluation – IFE)	149
Tabel 4. 5 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal (<i>Matriks External Factor Evaluation – EFE</i>)	151
Tabel 4. 6 Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Persampahan	153
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Kedepan.....	155
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Kedepan per Sumber Anggaran.....	155
Tabel 5. 3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Bogor	156
Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi.....	156
Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	157
Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	157
Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Partisipasi Swasta/CSR	158
Tabel 5. 8 Rekapitulasi dengan Sumber Partisipasi Swasta/CSR	158
Tabel 6. 1 Jadwal Pelaporan dan Monitoring Implementasi SSK Kota Bogor Tahun 2025-2029	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Instrumen SSK.....	5
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bogor.....	12
Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor	13
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Bogor	15
Gambar 2. 4 Rata-Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024	17
Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kota Bogor.....	19
Gambar 2. 6 Persentase Penduduk per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2020-2024	20
Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	21
Gambar 2. 8 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	22
Gambar 2. 9 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	23
Gambar 2. 10 Tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor Tahun 2019–2024.....	23
Gambar 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	24
Gambar 2. 12 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor Tahun 2019-2024	25
Gambar 2. 13 Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023	25
Gambar 2. 14 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024	26
Gambar 2. 15 Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	27
Gambar 2. 16 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor Tahun 2019-2024	27
Gambar 2. 17 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	28
Gambar 2. 18 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bogor	35
Gambar 2. 19 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor.....	36
Gambar 2. 20 Sarana Pengangkutan.....	41
Gambar 2. 21 Sarana Pengolahan Lumpur Tinja	42
Gambar 2. 22 Diagram Proses IPAL Tegal Gundil Eksisting.....	43
Gambar 2. 23 Diagram Proses IPLT Tegal Gundil Eksisting	44
Gambar 2. 24 Sarana Pengolahan IPAL Komunal	51
Gambar 2. 25 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik	52
Gambar 2. 26 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	54
Gambar 2. 27 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kota Bogor	71
Gambar 2. 28 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Kota Bogor	71

Gambar 2. 29 Pewadahan Sampah Skala Rumah Tangga.....	72
Gambar 2. 30 Sarana Pengumpulan	73
Gambar 2. 31 Sarana Pengangkutan.....	74
Gambar 2. 32 Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	87
Gambar 2. 33 Peta Cakupan Layanan Persampahan	88
Gambar 2. 34 Rantai Layanan Persampahan Kota Bogor.....	90
Gambar 2. 35 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir	104
Gambar 2. 36 Grafik Persentase Lama Air Menggenang Ketika Banjir.....	104
Gambar 2. 37 Grafik Persentase Lokasi Genangan di Sekitar Rumah.....	105
Gambar 2. 38 Peta Lokasi Banjir.....	116
Gambar 2. 2 Drainase.....	117
Gambar 2. 40 Peta Area Resiko Sanitasi Air Limbah Domestik	121
Gambar 2. 41 Peta Area Resiko Sanitasi Persampahan.....	124
Gambar 2. 42 Peta Area Resiko Drainase.....	127
Gambar 3. 1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	134
Gambar 3. 2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan.....	136
Gambar 4. 1 Kuadran Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor	148
Gambar 4. 1 Kuadran Pengelolaan Persampahan di Kota Bogor.....	152

SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BABS	=	Buang Air Besar Sembarangan
EHRA	=	<i>Environmental Health Risk Assessment</i>
IPAL	=	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPLT	=	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
KPP	=	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
KSM	=	Kelompok Swadaya Masyarakat
OPD	=	Organisasi Perangkat Daerah
PD	=	Perangkat Daerah
Permen	=	Peraturan Menteri
Perpres	=	Peraturan Presiden
Pokja	=	Kelompok Kerja
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	=	Rumah Tangga
RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
SPALD-S	=	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
SPALD-T	=	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
SSK	=	Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
TPA	=	Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	=	Tempat Pengelolaan Sampah
TPST	=	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
TPS 3R	=	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Maksud, Tujuan Sasaran, Lingkup Kegiatan, Dasar Hukum, Metodologi sampai dengan Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu layanan dasar yang esensial bagi kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, sektor ini masih kurang mendapatkan perhatian dan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin dari kondisi sanitasi di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan sektor pembangunan lainnya. Hingga akhir tahun 2024, akses sanitasi aman di Indonesia masih rendah yaitu mencapai 10,21% atau sekitar 7 juta rumah tangga, sanitasi yang belum aman menyebabkan pencemaran lingkungan dengan 81,9% sumber air minum tercemar e-coli dan berkontribusi pada 73% kejadian diare, adapun sebanyak 53% sungai di Indonesia tercemar akibat limbah domestik. Selain itu terdapat 2,8 juta rumah tangga atau 4,2% mempraktikkan BABS. Kondisi ini memberikan dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, degradasi lingkungan, serta beban sosial dan ekonomi yang tinggi. Pencemaran praktik sanitasi yang tidak layak meningkatkan risiko penyakit menular, terutama diare pada balita, serta menurunkan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah.

Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi adalah kurangnya dukungan infrastruktur sanitasi yang memadai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Praktik pembuangan air limbah tanpa pengolahan serta pengelolaan sampah yang belum optimal, turut memperparah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam pembangunan sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar kesehatan, guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran, Pemerintah Kota Bogor memerlukan perencanaan yang berkualitas sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sanitasi. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) telah disepakati secara nasional sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama dalam pembangunan sanitasi di tingkat daerah. Salah satu langkah implementatif yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan capaian dan mengatasi berbagai persoalan sanitasi adalah melalui pemutakhiran dokumen SSK yang sebelumnya telah disusun pada tahun 2020. Pemutakhiran ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan dan strategi

sanitasi dengan kondisi terkini serta tantangan yang dihadapi saat ini. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga akan mendorong penyusunan dan penerbitan regulasi-regulasi pendukung terkait sanitasi.

Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang telah diperbarui diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi, guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penyusunan SSK ini juga diharapkan selaras dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan RPJMD Kota Bogor, RPD Provinsi Jawa Barat, RPJMN, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kedudukan SSK dalam sistem perencanaan daerah harus selaras dengan dokumen RPD dan RPJMD, karena keduanya menjadi rujukan utama bagi program dan kegiatan pembangunan daerah. SSK merupakan dokumen yang menjabarkan secara operasional arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD/RPD, khususnya di sektor sanitasi, yang disusun secara terpadu, berkelanjutan, dan komprehensif.

Kota Bogor sebagai Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta, diarahkan sebagai kota terdepan yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja. Dengan posisinya yang strategis dan potensi ekonomi serta sumber daya alamnya, Kota Bogor diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan alternatif yang membantu mengurangi tekanan perkotaan di Jakarta, hal ini dapat berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan penduduk yang kemudian meningkatkan kebutuhan akan akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi yang layak dan aman. Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana sanitasi pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan, sosial, budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk terhadap fasilitas prasarana dan sarana sanitasi serta pemahaman tentang hygiene, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne diseases).

Data capaian Kota Bogor Tahun 2024, Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah layak sebesar 79,43 %, dan persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah aman sebesar 6,07 %. Persentase jumlah sampah yang tertangani 81,40 % dan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 7,98 %, secara keseluruhan presentase jumlah sampah yang dikelola oleh Kota Bogor sebesar 89,38 % (Sumber Laporan Monitoring dan Evaluasi 2024). Berdasarkan data tersebut, capaian Sanitasi Kota Bogor, sebagian besar sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024, kecuali untuk penyediaan akses rumah tangga terhadap air limbah aman. Adapun target yang ditetapkan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 untuk sanitasi sebagai berikut:

- Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah layak sebesar 75,10 %.
- Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah aman sebesar 8,55 %.
- Persentase jumlah sampah yang tertangani 81,35 %; dan
- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 7,90 %.

Walaupun demikian, Pemerintah Kota Bogor perlu mempersiapkan kebijakan dan strategi untuk pencapaian target sanitasi yang ditetapkan dalam SDGs 2030 dan RPJMD 2025-2029, melalui dokumen perencanaan strategis sanitasi jangka menengah (Strategi Sanitasi Kota (SSK)) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap pengelolaan sanitasi bagi masyarakat di daerahnya.

Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah menyusun dokumen pemutakhiran SSK pada tahun 2020, dengan periode implementasi hingga tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Bogor juga telah menyusun dokumen *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) yang akan menjadi dasar kajian dalam penyusunan strategi sanitasi kota yang baru untuk tahun 2025.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Tersedianya dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian target sanitasi kota yang terarah, inklusif dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan sanitasi Kota Bogor
- 2) Menyusun rencana Strategi Sanitasi Kota yang diselaraskan dengan kebijakan Kota, Provinsi, dan Nasional selama 5 tahun kedepan
- 3) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang terarah, inklusif dan berkelanjutan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran pekerjaan ini adalah :

- 1) Mencapai akses terhadap sanitasi yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- 2) Meningkatkan kualitas air dengan meningkatkan pengolahan air limbah, dan drainase lingkungan yang terjaga.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan akibat sampah yang tidak terkelola.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1 Lingkup Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi pekerjaan belanja jasa konsultansi Strategi Sanitasi Kota (SSK), berada di Kota Bogor, meliputi 6 (enam) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Kelurahan.

1.3.2 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Identifikasi dan inventarisasi data primer dan sekunder.
- 2) Melaksanakan pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi:
 - Tersusunnya profil wilayah kajian

- Tersepakatinya dan tersusunnya profil sanitasi
 - Terisinya instrumen SSK yang terisi dengan data yang sumbernya disepakati oleh Pokja PKP Kota Bogor
 - Teridentifikasinya permasalahan sanitasi yang dihadapi untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan.
- 3) Menyusun scenario pembangunan sanitasi:
- Penetapan visi dan misi Sanitasi
 - Penetapan zona dan system sanitasi serta cakupan layanannya
 - Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi
 - Analisis kemampuan pendanaan untuk sanitasi
 - Perumusan strategi pengembangan sanitasi
 - Daftar indikasi program dan kegiatan pengembangan sanitasi
 - Perumusan monitoring dan evaluasi capaian SSK
- 4) Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi
- Teridentifikasinya program, kegiatan, besaran pendanaan dan indikasi sumber pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
 - Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber lainnya
 - Tersusunnya deskripsi program/kegiatan yang belum jelas sumber pendanaan (*funding gap*)
- 5) Pengajuan verifikasi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor ke Pokja PKP Provinsi Jawa Barat.
- 6) Penyusunan draft Peraturan Wali Kota dalam penetapan penyusunan Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor.

1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Bogor adalah sebagai berikut:

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi mencakup beberapa metode, antara lain: studi pustaka (*desk study*) yang melibatkan penelaahan literatur, data sekunder, dan sumber daring; penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi dan wawancara; diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*); serta wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pengumpul data dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder didapatkan dari berbagai perangkat daerah berupa data asli maupun data yang berbentuk laporan (RPJMD, RTRW, Profil Kesehatan, dll). Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan

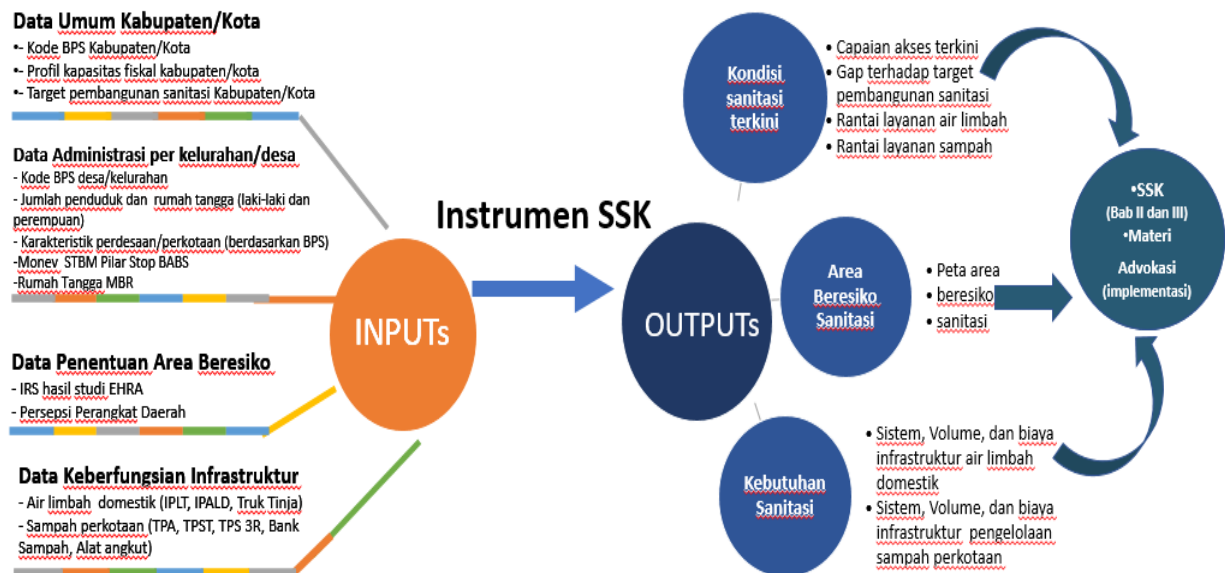
kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi.

2) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik survey lapangan, yang meliputi wawancara terstruktur, *depth interview* atau wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan atau observasi dan diskusi, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau pengiat sanitasi, LSM, pemerintah dan media baik cetak atau elektronik.

B. Analisis Data

Metodologi analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif dengan memanfaatkan instrumen SSK, adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Alur Instrumen SSK

Setelah memanfaatkan instrumen SSK, tim mengkaji data dari data sekunder yang diperoleh guna melakukan analisis pemetaan kondisi sanitasi dari aspek teknis maupun non teknis seperti kelembagaan, keuangan dan pendanaan, pemberdayaan masyarakat, peran swasta serta media komunikasi.

C. Penyusunan SSK

Penyusunan SSK Kota Bogor melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan review dari dokumen yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2020 dan dokumen *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) 2024;

- 2) Penetapan visi dan misi Sanitasi Kota Bogor yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Bogor, sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun);
- 3) Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka menengah (5 tahun) yang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), proyeksi kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan;
- 4) Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi kota yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor;
- 5) Analisis kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan sanitasi;
- 6) Perumusan Strategi Pembangunan Sanitasi;
- 7) Perumusan Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK; dan
- 8) Konsolidasi Penganggaran, Pemasaran Sanitasi dan penyepakatan oleh Pokja PKP Kota Bogor.

1.5. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota Bogor adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987).

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

D. Peraturan Menteri / Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib dilengkapi dgn UPL dan UKL;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/Prt/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

E. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

F. Peraturan Daerah Kota Bogor

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2025-2026;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2045.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika pada Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota Bogor adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi penyusunan, dasar hukum serta menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan dokumen.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM & PROFIL SANITASI KOTA BOGOR

Bab ini menguraikan gambaran umum dan profil sanitasi Kota Bogor, target akses kota yang ingin dicapai, permasalahan mendesak sanitasi dan area berisiko sanitasi.

BAB 3 : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan mengenai visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB 4 : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan secara detail mengenai strategi pengembangan sanitasi masing-masing sub sektor yang meliputi air limbah domestik dan persampahan, serta *enabling and sustainability aspect* (yang menyangkut kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis serta partisipasi masyarakat dan gender.)

BAB 5 : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan indikasi investasi infrastruktur sanitasi Kota Bogor.

BAB 6 : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini memuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.



BAB 2

GAMBARAN UMUM & PROFIL SANITASI KOTA BOGOR

Bab ini berisi mengenai Gambaran Umum Kota Bogor, Profil Sanitasi saat ini Sampai dengan permasalahan sanitasi dan area beresiko

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ}43'30''\text{BT}$ – $106^{\circ}51'00''\text{BT}$ dan $6^{\circ}30'30''\text{LS}$ – $6^{\circ}41'00''\text{LS}$. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena berada di tengah wilayah kabupaten Bogor merupakan bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Cianjur (Jabodetabekjur). Luas wilayah Kota Bogor sebesar $111,39 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar, yaitu $30,50 \text{ km}^2$ (27,38%), sementara itu Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil, yaitu $8,37 \text{ km}^2$ (7,51%).

Secara karakteristik wilayah, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sareal memiliki karakteristik wilayah urban yang dicirikan diantaranya dengan infrastruktur lebih lengkap, pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih mudah. Sementara itu, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan memiliki karakteristik wilayah cenderung lebih dominan rural yang dicirikan diantaranya oleh fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan yang lebih terbatas serta struktur jaringan jalan yang lebih kecil. Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Wilayah Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Timur |
| Sebelah Barat | : Wilayah Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor |
| Sebelah Timur | : Wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor |
| Sebelah Selatan | : Wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. |

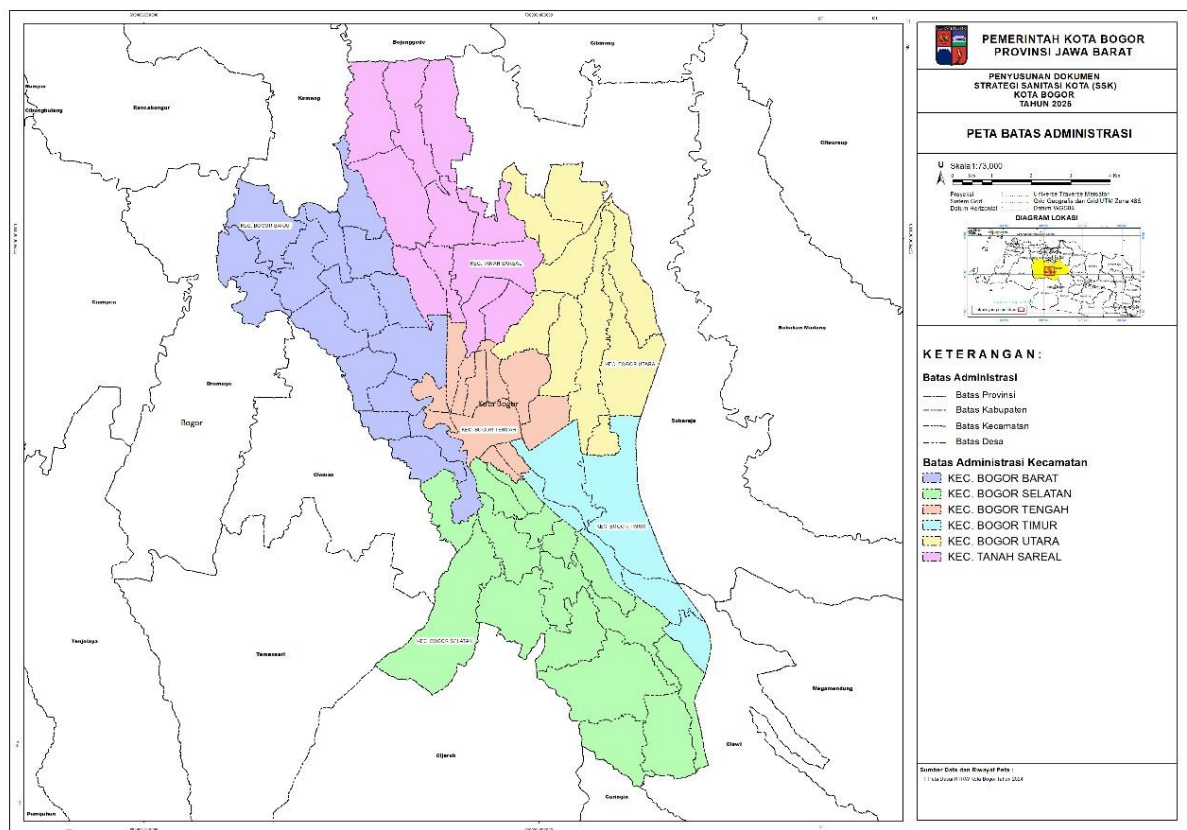
Untuk lebih jelasnya mengenai Luas Wilayah Administrasi Kota Bogor, dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan **Gambar 2.1** berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bogor

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	(%)
1	Kecamatan Bogor Utara	Tegal Gundil	18,14	16,28
2	Kecamatan Bogor Timur	Baranangsiang	10,46	9,39
3	Kecamatan Bogor Selatan	Empang	30,50	27,38
4	Kecamatan Bogor Tengah	Pabaton	8,37	7,51
5	Kecamatan Bogor Barat	Loji	23,32	20,93
6	Kecamatan Tanah Sareal	Kebon Pedes	20,60	18,49
Jumlah			111,39	

Sumber : BPS Kota Bogor, 2025

Pertumbuhan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek, khususnya Kota Bogor, mengalami ekspansi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, Bogor menghadapi tekanan urbanisasi yang mendorong pertambahan luas lahan terbangun secara masif. Jelasnya mengenai administrasi di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.



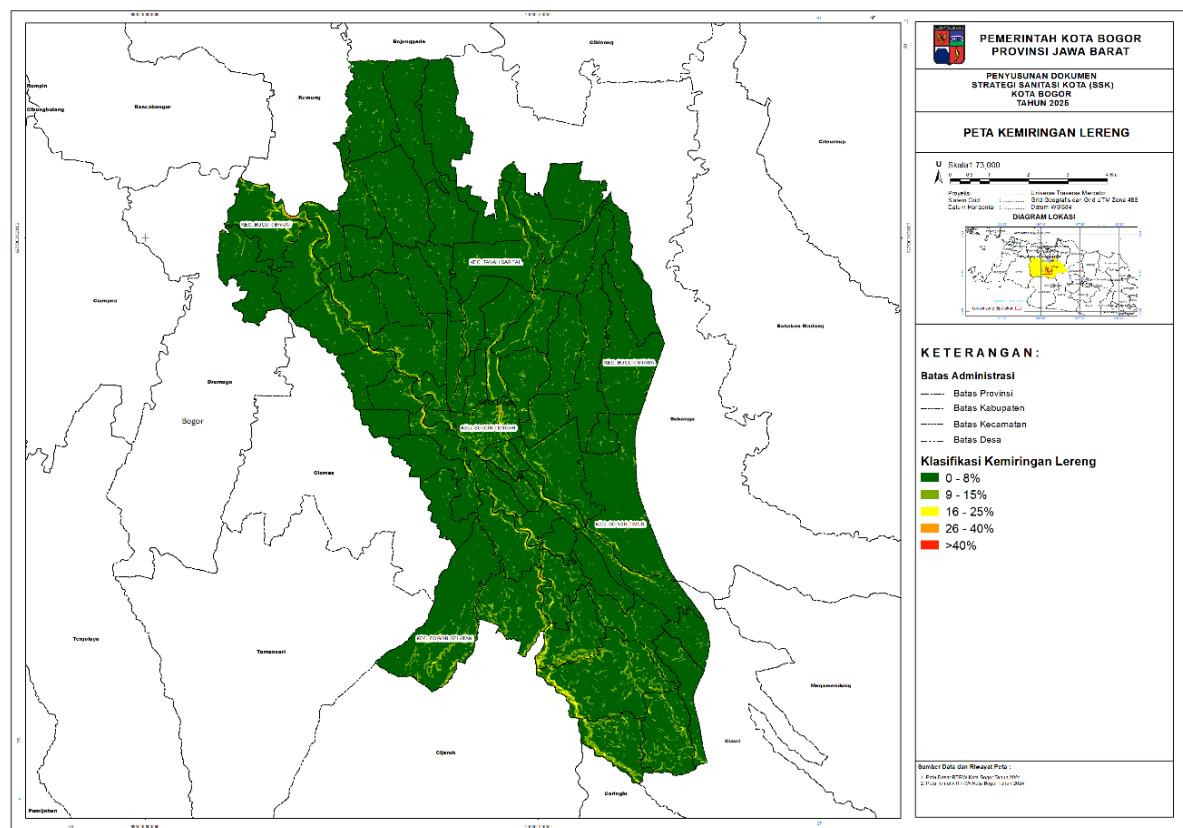
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bogor

2.1.2 Kondisi Fisik

2.1.2.1 Kondisi Topografi

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 m dan ketinggian maksimum 330 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8 persen, untuk luasan lahan datar seluas 10.415,03 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 651,57 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15 persen, seluas 63,88 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25 persen, seluas 7,10 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40 persen dan lahan sangat curam seluas 0,84 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan untuk Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Barat merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bencana longsor, karena mempunyai lahan terluas dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam yaitu seluas 0,31 Ha. Kemudian Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah juga memiliki luasan lahan sangat curam seluas 0,25 Ha sehingga dua kecamatan tersebut juga tergolong kawasan yang rawan terhadap bahaya longsor. Sementara itu, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal masing-masing memiliki lahan sangat curam 0,02 Ha dan 0,01 Ha.



Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor

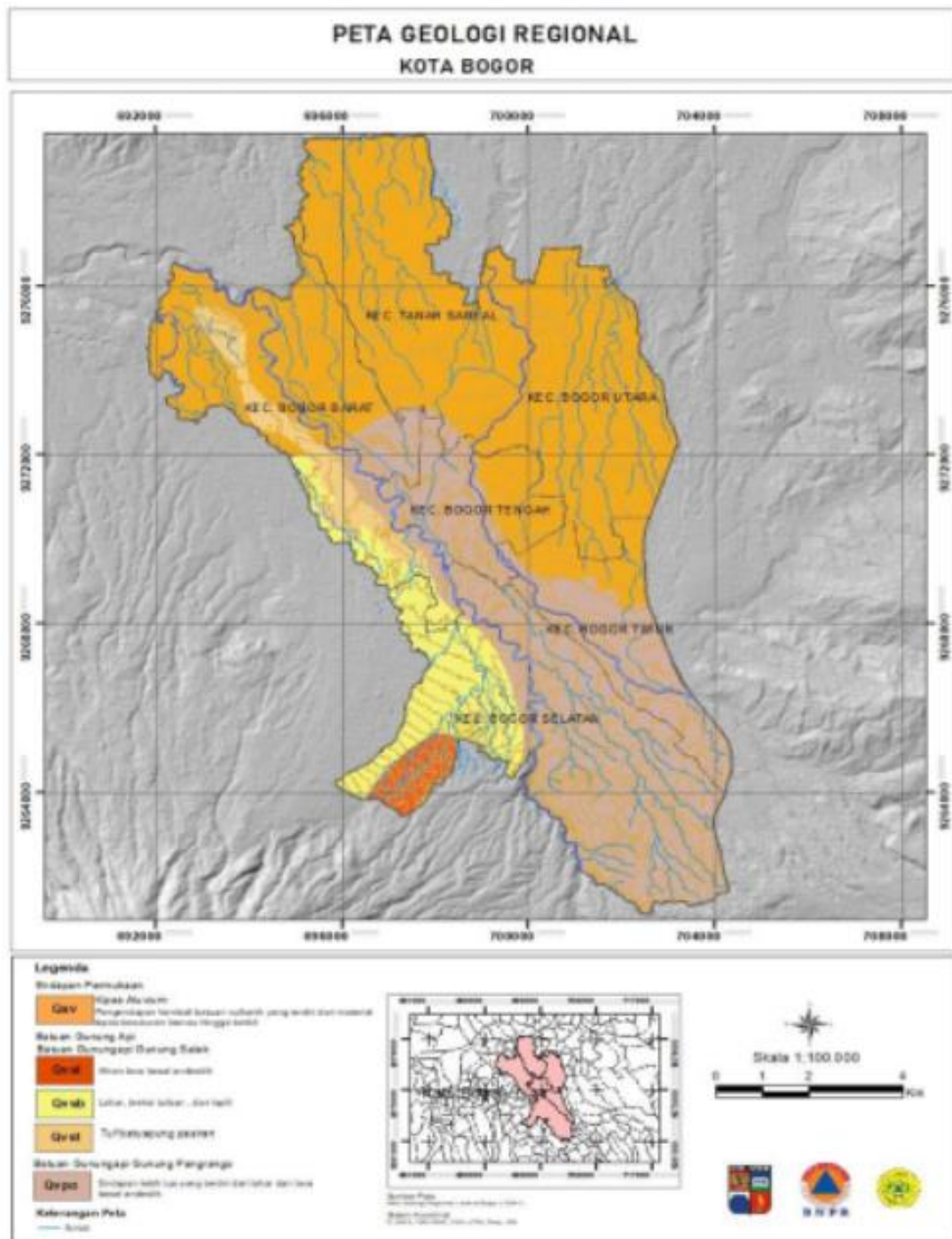
2.1.2.2 Geologi

Kondisi geologi di Kota Bogor umumnya tersusun oleh batuan vulkanik dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Batuan vulkanik dari gunung tersebut tersebar di bagian selatan Kota Bogor, sedangkan bagian utara tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik. Kemudian untuk batuan di sekitar aliran sungai utama berupa endapan aluvium yang terdiri dari kerikil dan pasir. Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh Endapan Lebih Tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsb), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung pasir (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan pengendapan kembali dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav) (Gambar 2.3).

Tabel 2. 2 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.338,88
2	Batuan Gunung Api Salak	1.812,90
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	49,42
4	Formasi Bojonmanik	42,09
5	Formasi Jatiluhur	39,21
6	Kipas Aluvium	5.855,92
Total		11.138,42

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Bogor

2.1.2.3 Hidrologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan di Kecamatan Bogor Barat

menunjukkan semakin berkurangnya resapan air, karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Beberapa danau, situ, dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 km dan Sungai Ciliwung mempunyai panjang aliran sungai utama sepanjang 120 km. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi Perumda Tirta Pakuan. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000 liter/detik (Review Masterplan Drainase TA 2018). Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-colli di atas kriteria yang disyaratkan.

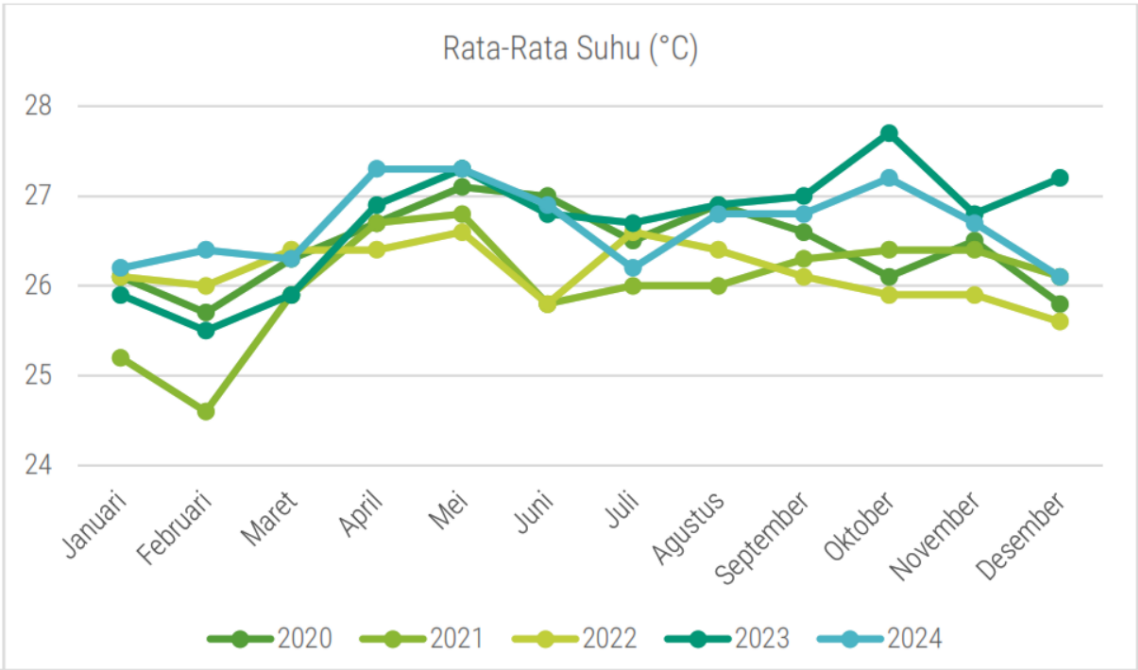
2.1.2.4 Klimatologi

Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrem bisa berpengaruh terhadap aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang. Kota Bogor, yang dikenal dengan julukan "Kota Hujan", memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, suhu sedang, dan kelembaban udara yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data rata-rata suhu dan kelembaban udara bulanan di Kota Bogor selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020–2024 (Tabel II.3), terlihat adanya tren kenaikan suhu rata-rata tahunan dari 26,0°C pada tahun 2021 menjadi 26,7°C pada tahun 2024, dimana suhu terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 26,0°C dan suhu tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 26,7°C. Sementara itu, kelembaban udara menunjukkan tren menurun dari 84,8% pada tahun 2022 menjadi 82,8% pada tahun 2024, dimana kelembaban terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,1% dan kelembaban terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,8%.

Tabel 2. 3 Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Bulan	Suhu (°C)					Kelembaban (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	26,1	25,2	26,1	25,9	26,2	88,9	88,0	84,8	84,8	87,0
Februari	25,7	24,6	26,0	25,5	26,4	89,4	86,0	84,5	85,8	87,0
Maret	26,3	25,9	26,4	25,9	26,3	85,0	85,0	84,0	86,3	87,0
April	26,7	26,7	26,4	26,9	27,3	85,4	84,0	85,1	82,9	85,0
Mei	27,1	26,8	26,6	27,3	27,3	84,1	84,0	84,8	82,6	84,0
Juni	27,0	25,8	25,8	26,8	26,9	82,3	86,0	85,6	83,4	83,0
Juli	26,5	26,0	26,6	26,7	26,2	81,2	80,0	81,7	79,0	79,0

Bulan	Suhu (°C)					Kelembaban (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Agustus	26,9	26,0	26,4	26,9	26,8	77,7	82,0	83,0	75,5	77,0
September	26,6	26,3	26,1	27,0	26,8	80,1	81,0	83,9	72,0	78,0
Oktober	26,1	26,4	25,9	27,7	27,2	84,8	83,0	86,5	74,9	78,0
November	26,5	26,4	25,9	26,8	26,7	83,7	84,0	86,5	85,1	84,0
Desember	25,8	26,1	25,6	27,2	26,1	84,0	85,0	86,7	81,4	85,0
Rata-Rata	26,4	26,0	26,2	26,7	26,7	84,0	84,0	84,8	81,1	82,8



Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 2. 4 Rata-Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Kondisi curah hujan dan jumlah hari hujan merupakan indikator penting dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan wilayah, khususnya untuk Kota Bogor yang secara geografis berada di wilayah beriklim tropis basah dengan karakteristik curah hujan tinggi. Selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020-2024 (Tabel II.4), rata-rata jumlah hari hujan di Kota Bogor meningkat dari 13 hari per bulan pada tahun 2020 menjadi puncaknya 28 hari per bulan pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 21 hari per bulan pada tahun 2024, dimana rata-rata jumlah hari hujan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 28 hari, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 13 hari. Sementara itu, rata-rata jumlah curah hujan tahunan pada periode tahun 2020-2024 terjadi peningkatan dari 202 mm pada tahun 2020 dan 351 mm pada tahun 2021 menjadi 405 mm pada tahun 2024. Meski terdapat fluktuasi pada nilai bulanan, bulan-bulan seperti Mei dan November 2024 mencatat curah hujan sangat tinggi yaitu 551 mm dan 730 mm. Beberapa bulan lain yang mencatat lonjakan ekstrem seperti Maret 2024 sebesar 723 mm dan April 2024 sebesar 620 mm.

Tabel 2. 4 Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor Tahun 2020–2024

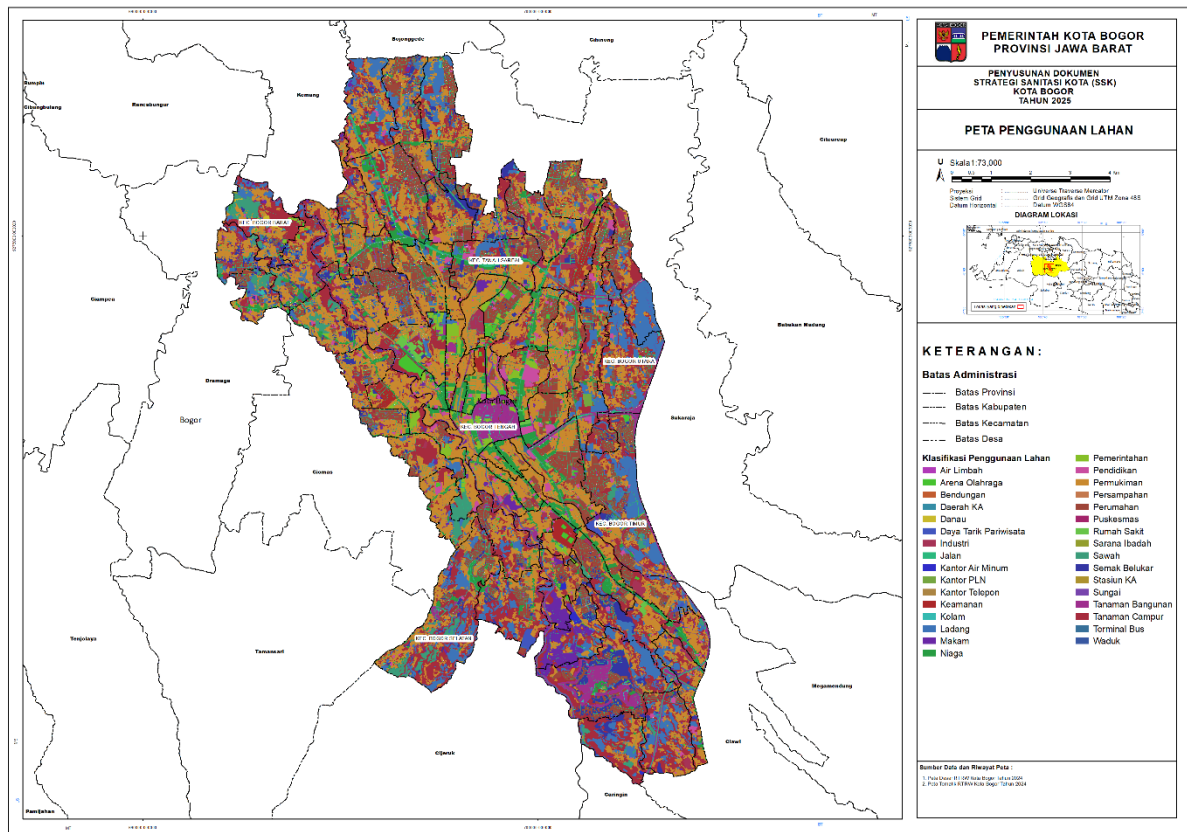
Bulan	Jumlah Hari Hujan (Hari)					Jumlah Curah Hujan (mm)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	14	18	30	21	25	208	304	106	211	394
Februari	18	20	23	24	25	337	487	145	258	228
Maret	19	20	28	26	27	293	233	112	325	723
April	19	17	29	17	23	271	505	316	312	620
Mei	15	16	25	14	21	292	510	226	294	551
Juni	5	17	27	20	20	30	311	463	310	224
Juli	7	8	29	9	13	64	116	358	134	140
Agustus	4	16	31	12	14	42	400	384	144	123
September	7	19	29	9	15	88	317	344	62	402
Oktober	17	22	28	13	14	327	567	499	102	494
November	16	17	28	25	25	207	184	321	1.068	730
Desember	16	20	28	20	27	262	279	225	563	231
Rata-Rata	13	18	28	18	21	202	351	292	226	405

Sumber : BPS Kota Bogor

2.1.3 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Van Zuidam, 1979). Dari segi pola penggunaan lahan, wilayah Kota Bogor yang memiliki luas 111,39 km² (BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2025) secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Secara garis besar, pembagian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kawasan terbangun mencakup perumahan dan permukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, olahraga, fasilitas umum, industri, jasa, perdagangan campuran, kantor pemerintahan, serta kompleks militer. Total luas kawasan terbangun mencapai 5.340,40 ha. Dari jumlah tersebut, kawasan permukiman dan perumahan mendominasi dengan luas 4.617,26 ha (39,47%). Fasilitas sosial dan umum menempati 250,25 ha (2,14%), kawasan industri, jasa, dan perdagangan campuran seluas 362,35 ha (3,10%), sedangkan kompleks militer dan kantor pemerintahan mencakup 110,54 ha (0,95%).
- 2) Kawasan tidak terbangun mencakup hutan kota, kebun, ladang, sawah, semak, taman, tanah kosong, TPU, kolam, situ, dan sungai, dengan total luas 6.355,65 ha. Dari jumlah tersebut, kawasan hijau seperti hutan kota, kebun, ladang, sawah, semak, dan taman mencakup 5.111,31 ha (45,12%). Kawasan biru yang meliputi kolam, situ, dan sungai seluas 235,32 ha (2,01%). Adapun tanah kosong mencakup 867,27 ha (7,42%) dan tempat pemakaman umum seluas 141,76 ha (1,21%).



Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Kota Bogor

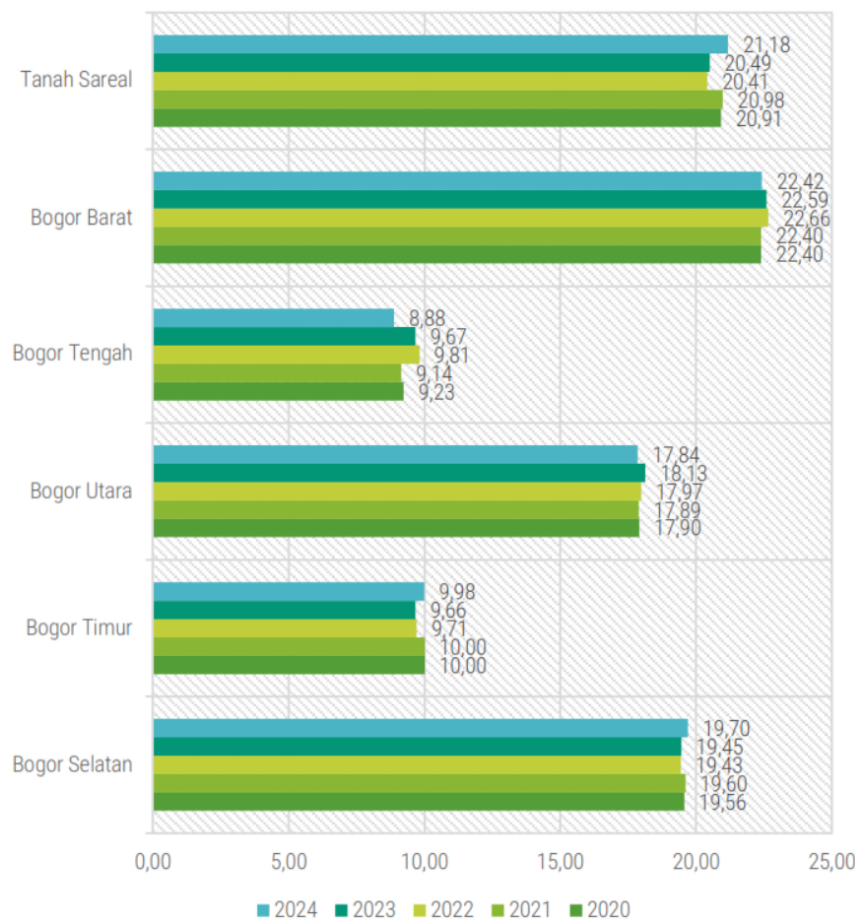
2.1.4 Kondisi Demografi

Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Dalam kurun waktu 2020-2024 jumlah penduduk Kota Bogor meningkat dari 1.043.070 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.078.351 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan penduduknya, dimana Kota Bogor pada tahun 2020 memiliki kepadatan penduduk sebesar 8.802 jiwa per kilometer persegi yang cenderung meningkat hingga mencapai 9.681 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Berdasarkan Tabel 2.18, persentase penduduk per kecamatan paling tinggi di Kota Bogor pada setiap tahunnya adalah Kecamatan Bogor Barat yang pada periode 2020-2024 selalu berada pada sekitar 22% tiap tahunnya. Sementara itu, kecamatan dengan persentase penduduk terendah pada periode 2020-2024 adalah Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur yang berada pada sekitar 9-10% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor banyaknya imigran yang datang, tingginya tingkat fertilitas, dan rendahnya tingkat mortalitas. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor selama periode tahun 2020-2024 adalah 0,89%. Penduduk yang semakin bertambah berimplikasi terhadap rasio ketersediaan ruang untuk menopang aktivitas penduduknya. Apabila mengacu kepada perkembangan data kepadatan penduduk.

Tabel 2. 5 Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per-Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Σ Kelurahan	Σ Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Km ²	LPP (%)
1	Bogor Utara	8	192.430	10.610	0,81
2	Bogor Timur	6	107.573	10.280	0,82
3	Bogor Selatan	16	212.423	6.964	1,08
4	Bogor Tengah	11	95.758	11.445	-0,14
5	Bogor Barat	16	241.738	10.368	0,91
6	Tanah Sareal	11	228.429	11.089	1,24
Jumlah		68	1.078.351	9.681	0,89

Sumber : BPS Kota Bogor, 2025



Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 2. 6 Persentase Penduduk per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel II.6, penduduk di Kota Bogor pada tahun 2021 terdiri dari 533.774 orang berjenis kelamin laki-laki dan 518.585 orang berjenis kelamin perempuan. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor pada tahun 2021 sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2024 Penduduk di Kota Bogor terdiri dari 545.945 orang berjenis kelamin laki-laki dan 532.406 orang berjenis kelamin perempuan. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2024. Perubahan

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini bertujuan untuk memudahkan analisis demografi dan perencanaan pembangunan berdasarkan pemberdayaan gender, analisis ketenagakerjaan, dan dinamika sosial.

Tabel 2. 6 Struktur Penduduk Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2021	533.774	518.585	103
2022	563.033	550.985	102
2023	570.333	557.075	102
2024	545.945	532.406	103

Sumber: BPS Kota Bogor

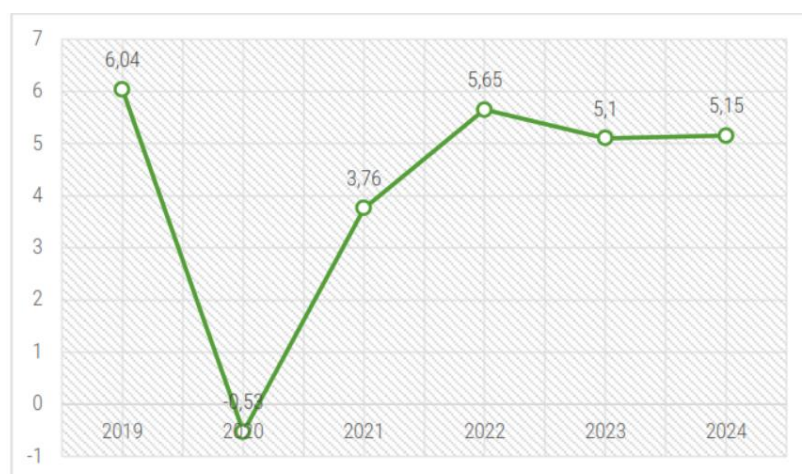
2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5.1 Kesejahteraan Ekonomi

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai kesejahteraan ekonomi di Kota Bogor.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini dihitung berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010. Berdasarkan PDRB ADHK Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi (Gambar 2.7). Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 6,04 persen, dan tahun 2024 menjadi sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan Kota Bogor sempat mengalami nilai negatif di tahun 2020, yaitu turun menjadi -0,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bogor pada saat itu mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi COVID-19 sehingga semua sektor perekonomian mengalami hambatan.



Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019-2024

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ditandai oleh pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu menghambat perkembangan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan kedepannya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kota Bogor mengalami fluktuasi selama periode 2019–2024 (Gambar 2.8). Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,77%, namun mengalami peningkatan menjadi 6,68% pada tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta berkurangnya pendapatan masyarakat. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 7,24%. Hal ini mencerminkan dampak ekonomi yang masih dirasakan oleh warga Bogor. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 7,1%, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Kondisi mulai membaik pada tahun 2023 dan tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan turun masing-masing menjadi 6,67% dan 6,53%, yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan investasi di sektor UMKM, serta berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah.

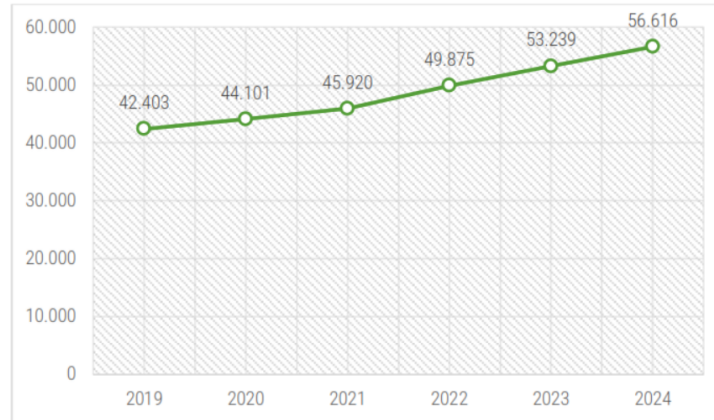


Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 8 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2024

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi penduduk di suatu wilayah dan berfungsi sebagai parameter makro untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di wilayah tersebut. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 56.616 juta rupiah, meningkat sebesar 3.377 juta rupiah dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 53,239 rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan produksi di hampir semua kategori usaha dan faktor inflasi harga.



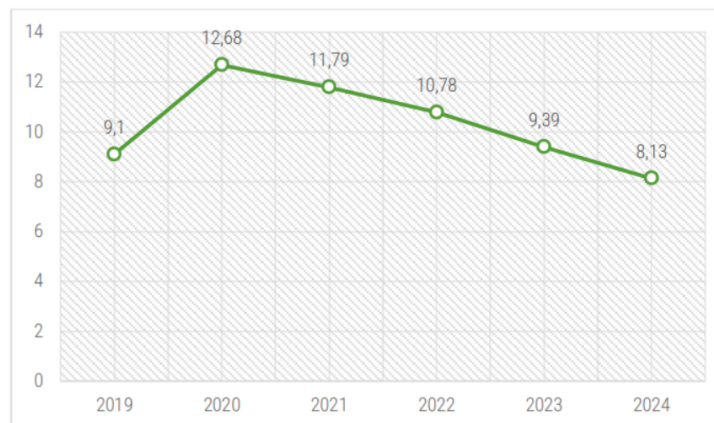
Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 2. 9 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor Tahun 2019-2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran menjadi tantangan besar bagi Kota Bogor karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup tinggi, tingkat penganggurannya justru paling tinggi dibanding wilayah sekitarnya.

Perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2024. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun nilai TPT pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi yang relatif baik karena semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran di antara penduduk pada usia angkatan kerja. Pada tahun 2019, TPT berada di angka 9,1%, namun meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 12,68%. Lonjakan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta terbatasnya kesempatan kerja akibat perlambatan ekonomi. Pada tahun 2021, angka pengangguran sedikit menurun menjadi 11,79%, menunjukkan awal dari pemulihan ekonomi meskipun masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan TPT sebesar 10,78%, lalu semakin membaik pada tahun 2023 dengan 9,39%, hingga akhirnya mencapai 8,13% pada tahun 2024.

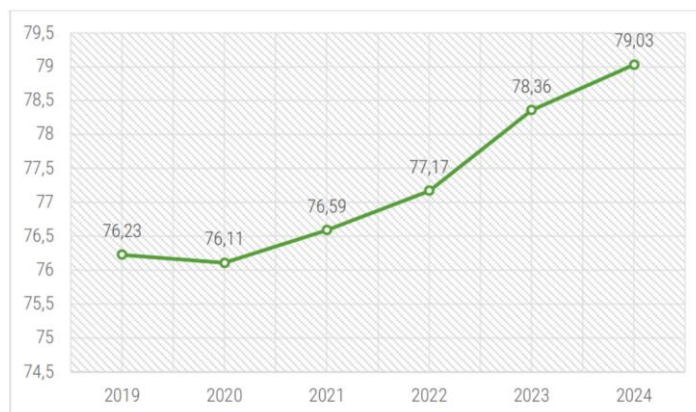


Sumber: BPS Kota Bogor

Gambar 2. 10 Tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor Tahun 2019-2024

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu area yang diwakili oleh tiga (tiga) dimensi, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.



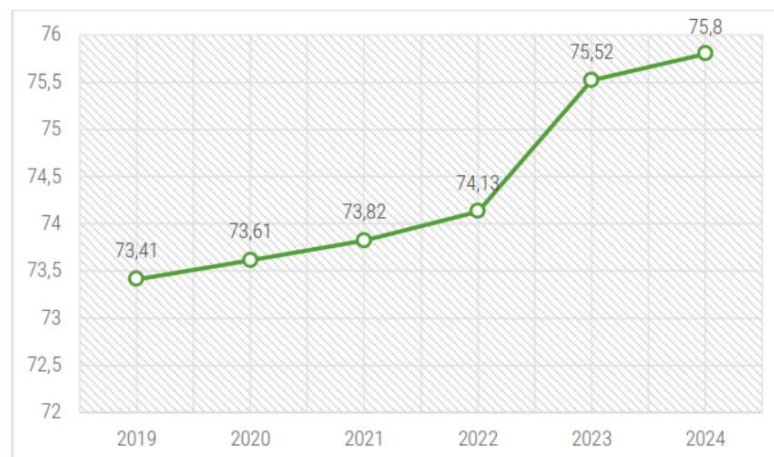
Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2024

IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2019-2024. IPM Kota Bogor mengalami fluktuasi kecil di awal, dengan sedikit penurunan dari 76,23 pada tahun 2019 menjadi 76,11 pada tahun 2020. Namun, tren meningkat cukup signifikan pada tahun 2021, mencapai 76,59. Tren kenaikan berlanjut menjadi 77,17 pada tahun 2022, 78,36 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 79,03 pada tahun 2024. Semakin tingginya nilai IPM di Kota Bogor mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Kenaikan IPM ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tren di Kota Bogor ini dapat menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, program pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.2 Kesehatan untuk Semua

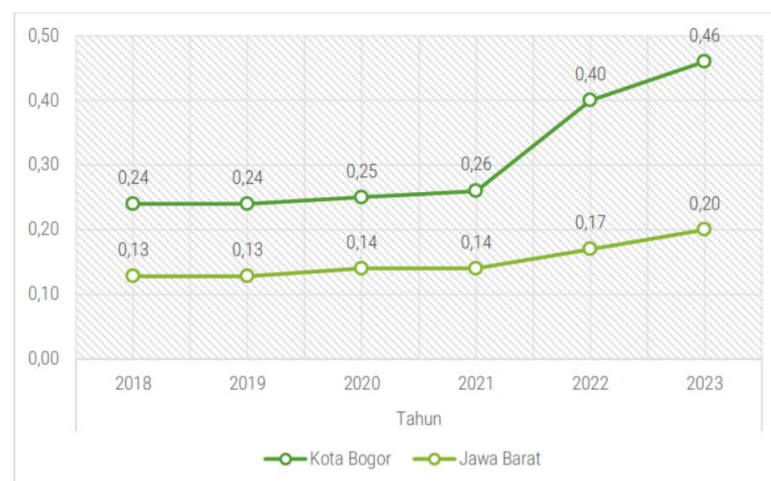
Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia. Di Kota Bogor, sejumlah indikator menunjukkan adanya kemajuan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meskipun tantangan masih tetap ada. Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek kesehatan. Pada tahun 2024, UHH Kota Bogor tercatat mencapai 75,80 tahun dimana pada 2 tahun sebelumnya adalah 75,21 tahun (2022) dan 75,52 tahun (2023), menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menggambarkan semakin membaiknya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 12 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sementara itu, Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang mencerminkan kondisi kesehatan keluarga secara menyeluruh pada Kota Bogor terus mengalami peningkatan, dimana nilai IKS tahun 2018 sebesar 0,24 terus meningkat menjadi 0,46 tahun 2023. Pemerintah Kota Bogor terus melakukan penguatan pelayanan kesehatan berbasis keluarga, terutama melalui Puskesmas dan kader kesehatan untuk mendorong peningkatan indikator keluarga sehat di setiap wilayah.

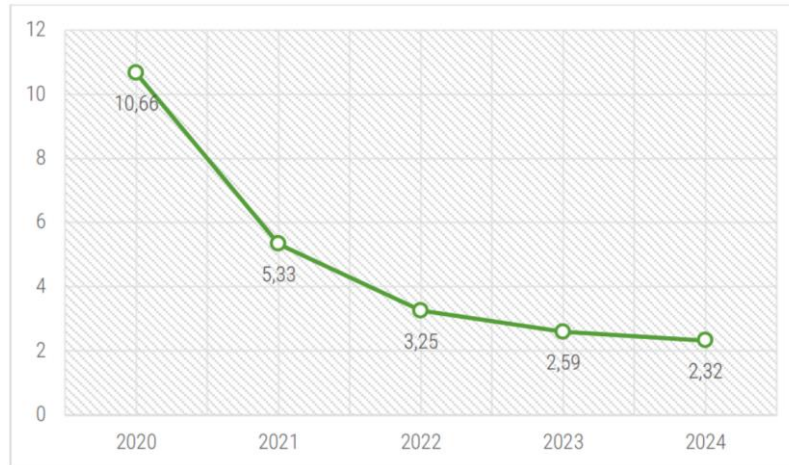


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor

Gambar 2. 13 Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, persentase balita sangat pendek dan pendek di Kota Bogor menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2020-2024 (Gambar 2.14). Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 10,66%, kemudian turun drastis menjadi 5,33% pada tahun 2021. Penurunan terus berlanjut dengan angka 3,25% pada tahun 2022, 2,59% pada tahun 2023, hingga mencapai 2,32% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menandakan bahwa program peningkatan kualitas gizi, layanan kesehatan anak, serta edukasi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Berbagai intervensi yang dilakukan

oleh pemerintah, seperti peningkatan cakupan imunisasi, penyuluhan pola makan sehat, serta penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan ibu dan anak, turut berperan dalam menekan angka balita sangat pendek dan pendek.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 14 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.1.5.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

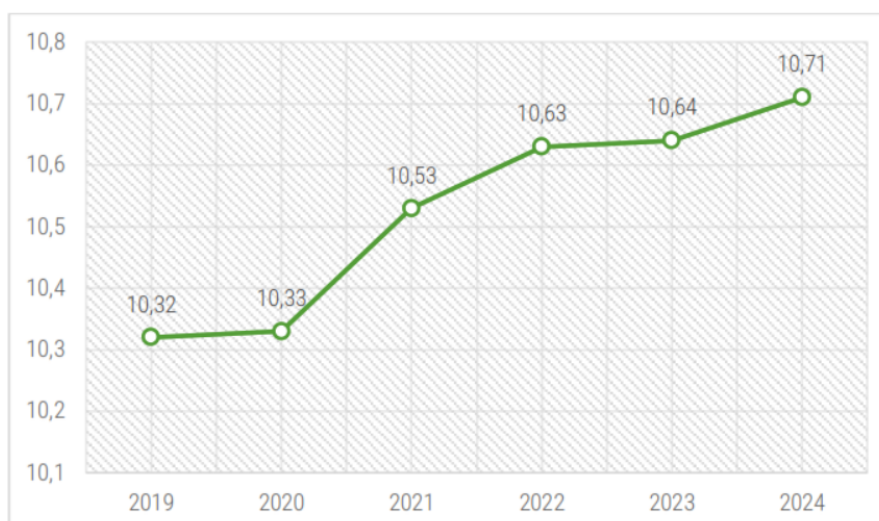
Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Indeks pendidikan mencerminkan hasil pembangunan dalam sektor pendidikan dan juga menunjukkan perkembangan manusia di suatu wilayah, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024 pada Gambar 2.15. menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, indeks berada di angka 71,62 dan naik perlahan menjadi 71,68 pada tahun 2020. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 72,38, hal ini mencerminkan adaptasi pendidikan di masa pandemi. Indeks terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,74, tahun 2023 menjadi 72,83, hingga mencapai 73,23 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan Kota Bogor yang telah berjalan positif dan berkelanjutan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 15 Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024

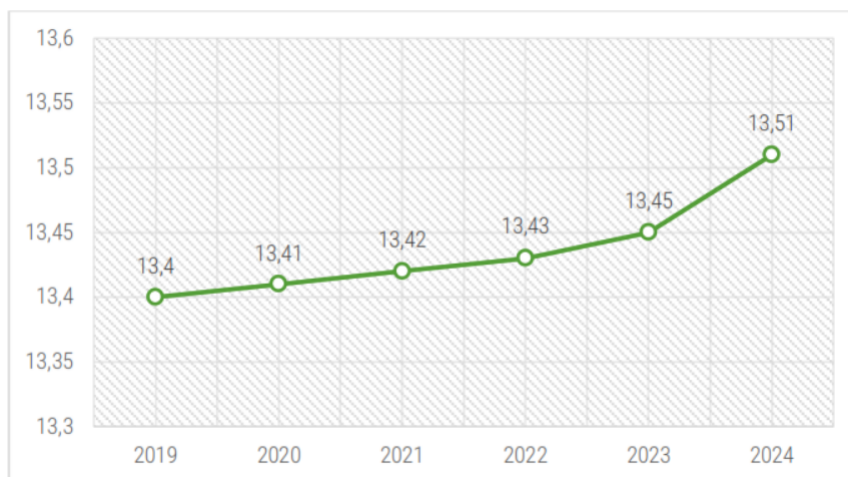
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor tahun 2019–2024, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 10,32 tahun, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 10,33 tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan angka mencapai 10,53 tahun, meningkat sebesar 0,20 tahun dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 mencapai 10,63 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,64 tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2024, mencapai angka tertinggi sebesar 10,71 tahun, yang menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di Kota Bogor. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, termasuk program wajib belajar serta dukungan terhadap fasilitas pendidikan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 16 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Harapan Lama Sekolah di Kota Bogor tahun 2019–2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten dalam periode tersebut. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,40 tahun dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2020, angka ini meningkat sedikit menjadi 13,41 tahun, kemudian terus naik menjadi 13,42 tahun pada tahun 2021 dan 13,43 tahun pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2023, di mana harapan lama sekolah mencapai 13,45 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,02 tahun dari tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan kenaikan yang lebih tajam, mencapai angka tertinggi sebesar 13,51 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kota Bogor, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pendidikan, program bantuan sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kota Bogor menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan harapan lama sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 17 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.1.6 Kebijakan Penataan Ruang Kota Bogor (Perda No 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031)

2.1.6.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan.

2.1.6.2 Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Daerah Kota meliputi:

- a. pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi;

- b. mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
- c. mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
- e. pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- f. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK, maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- i. pelestarian kawasan cagar budaya;
- j. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota;
- k. pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
- n. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- o. pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

2.1.6.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bogor

Strategi penataan ruang Daerah Kota terdiri dari:

- a. strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - 1. meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - 2. menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - 3. menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - 4. mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - 1. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan
 - 2. merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas, dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
- c. strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:

1. mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 2. mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
 3. mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
 4. mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;
- d. strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
- e. strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
1. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 2. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 3. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
 4. mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
- f. strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
1. sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 2. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 3. mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 4. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 5. mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 6. mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 7. mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 8. mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 9. mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 10. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
- g. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:

1. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 2. melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 3. mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 4. mengembangkan jaringan gas;
 5. mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 6. mengembangkan jaringan sumber daya air;
 7. mengembangkan sistem jaringan air minum;
 8. meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 9. meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 10. meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 11. meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
 12. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
- h. strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
1. menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 3. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
 4. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
- i. strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
1. menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 2. meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
 3. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- j. strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
1. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 2. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 3. meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan
 4. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- k. strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
1. mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. mengendalikan pengembangan kawasan PPK;

3. mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
4. membatasi pengembangan kawasan industri;
- l. strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
 1. menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
 2. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
 3. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
 1. mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
 2. menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- n. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
 1. mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
 2. mempertahankan nilai sejarah kawasan;
 3. menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
 4. mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;
- o. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
 1. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
 2. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
 3. mengembangkan kawasan tematik; dan
 4. mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok, dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

2.1.6.4 Rencana Struktur dan Pola Ruang Kota Bogor

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang, berikut merupakan kebijakan struktur ruang dan pola ruang yang terkait dengan sanitasi di Kota Bogor menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, terdiri dari :

1. Rencana Struktur Ruang

A. Pusat Kegiatan di Wilayah Daerah Kota

Rencana pengembangan PPK dan Sub PPK, ditetapkan sebagai berikut:

- a. PPK terletak di kawasan pemerintahan dan perdagangan dan jasa di sekitar

Kebun Raya Bogor;

- b. Sub PPK Pasima terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh (BubulakSindangbarang);
- c. Sub PPK Utara terletak di Jl. KH. Sholeh Iskandar (Yasmin-Pasar Kemang);
- d. Sub PPK Purwa terletak Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor; dan
- e. Sub PPK Daksina terletak di Jalan Raya Tajur – rencana jalan R3 – rencana jalan lingkar dalam.

Rencana pengembangan PL ditetapkan sebagai berikut:

- a. PL Samida 1 terletak di sekitar Jalan Merdeka, Kelurahan Kebon Kalapa;
- b. PL Samida 2 terletak di Kelurahan Situgede;
- c. PL Pasima 1 terletak di Kelurahan Balumbang Jaya;
- d. PL Pasima 2 terletak di Kelurahan Gunungbatu;
- e. PL Utara 1 terletak di Kelurahan Mekarwangi;
- f. PL Utara 2 terletak di Kelurahan Sukaresmi;
- g. PL Utara 3 terletak di Kelurahan Kedungwaringin;
- h. PL Utara 4 terletak di Kelurahan Cilendek Barat;
- i. PL Purwa 1 terletak di Kelurahan Kedunghalang;
- j. PL Purwa 2 terletak di Kelurahan Tanah Baru dan Ciluar;
- k. PL Purwa 3 terletak di Kelurahan Cimahpar;
- l. PL Purwa 4 terletak di Kelurahan Tegalgundil;
- m. PL Daksina 1 terletak di Kelurahan Katulampa;
- n. PL Daksina 2 terletak di Kelurahan Kertamaya;
- o. PL Daksina 3 terletak di Kelurahan Bojongkerta; dan
- p. PL Daksina 4 terletak di Kelurahan Mulyaharja.

B. Sistem Jaringan Prasarana

- a. Jaringan Transportasi
 - sistem jaringan jalan; dan
 - sistem jaringan jalur kereta api
- b. Jaringan Energi
 - jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - jaringan infrastruktur gas bumi.
- c. Jaringan Telekomunikasi
- d. Jaringan Sumber Daya Air
 - sumber air; dan
 - prasarana sumber daya air.
- e. Infrastruktur Perkotaan
 - SPAM;

- penyelenggaraan SPALD;
- sistem jaringan persampahan kota;
- sistem jaringan evakuasi bencana;
- sistem drainase;
- sistem jaringan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor; dan
- sistem jaringan utilitas kota terpadu.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah mencakup:

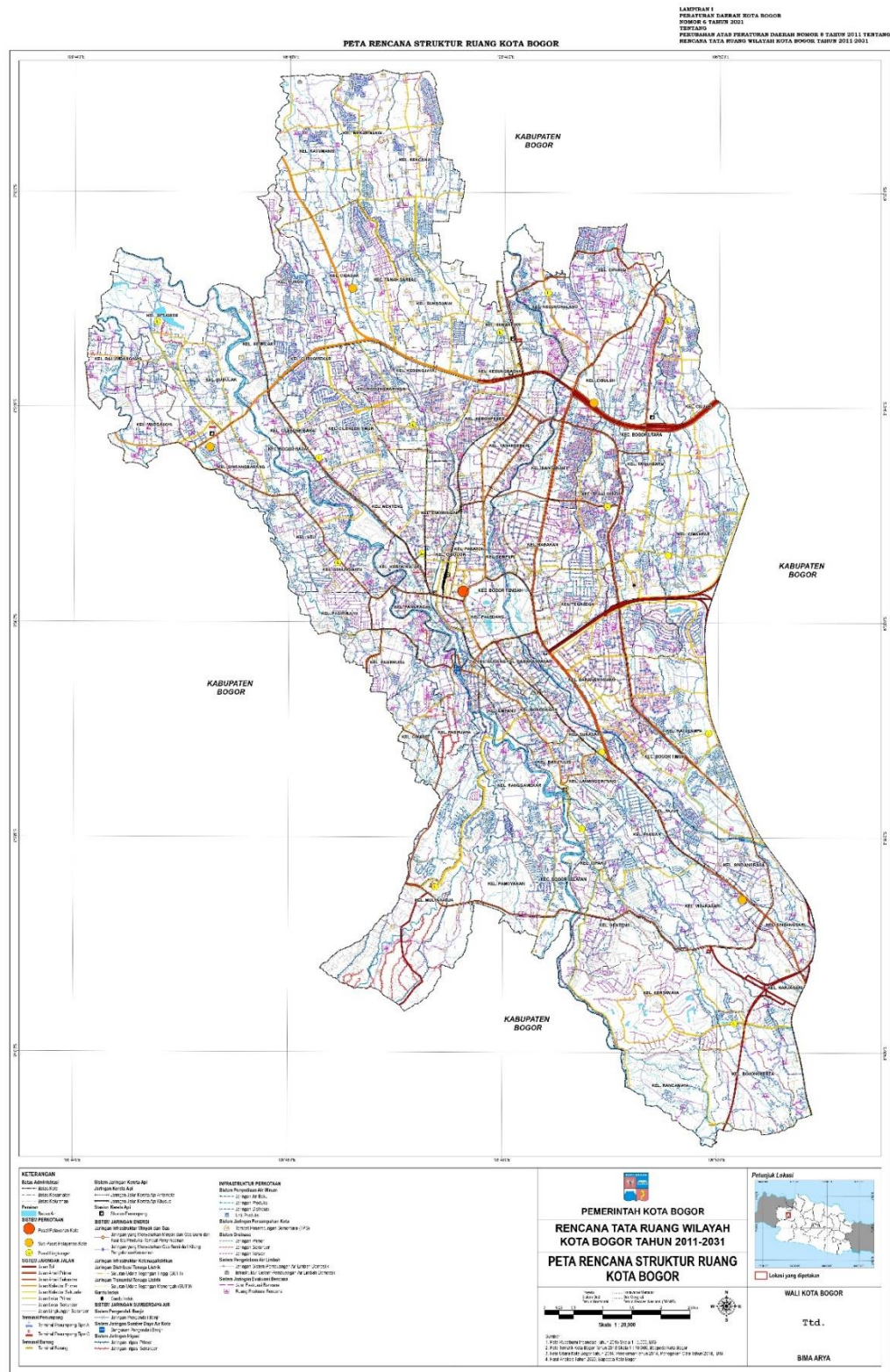
A. Kawasan Peruntukan Lindung;

- a. kawasan perlindungan setempat dengan luasan kurang lebih 411 ha
- b. kawasan konservasi dengan luasan kurang lebih 85 ha (delapan puluh lima hektare)
- c. RTH.

B. Kawasan Peruntukan Budi daya

- a. kawasan pertanian;
 - kawasan tanaman pangan tersebar di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Pasirjaya, Sindangbarang, Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cikaret, Pakuan, Rancamaya, Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur dengan luas lebih kurang 127 ha (seratus dua puluh tujuh hektare).
 - kawasan peternakan meliputi Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional di Bubulak dengan luas lebih kurang 3 ha (tiga hektare).
- b. kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan Hektare)
- c. kawasan pariwisata dengan sebaran luas lebih kurang 46 ha (empat puluh enam hektare)
- d. kawasan permukiman
 - kawasan perumahan sebaran luas lebih kurang 7.103 ha (tujuh ribu seratus tiga hektare)
 - kawasan perdagangan dan jasa dengan sebaran luas lebih kurang 895 ha (delapan ratus sembilan puluh lima hektare)
 - kawasan perkantoran dengan sebaran luas lebih kurang 128 ha (seratus dua puluh delapan hektare)
 - kawasan fasilitas umum dan sosial dengan sebaran luas lebih kurang 253 ha (dua ratus lima puluh tiga Hektare)
 - kawasan transportasi dengan luasan lebih kurang 1 ha (satu hektare)
 - kawasan infrastruktur perkotaan dengan luasan lebih kurang 25 ha (dua puluh lima hektare)
 - kawasan campuran dengan sebaran luas lebih kurang 295 ha (dua ratus sembilan puluh lima hektare)
- e. kawasan pertahanan dan keamanan dengan sebaran luas lebih kurang 113 ha (seratus tiga belas hektare).

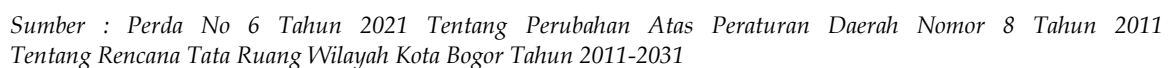
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR



Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2. 18 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bogor

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031



36

2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Pada subbab ini akan dibahas secara mendetail mengenai profil sanitasi di Kota Bogor, meliputi sistem, infrastruktur dan cakupan akses layanan pengelolaan air limbah domestik, persampahan serta drainase perkotaan.

1.2.4 Air Limbah Domestik

Pada sub-subbab ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai tiga aspek penting dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor. Pertama, akan dijelaskan mengenai sistem dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan air limbah domestik, meliputi berbagai jenis sistem pengolahan dan fasilitas yang ada. Kedua, akan dibahas aspek kelembagaan serta kebijakan dan peraturan yang menjadi landasan hukum dan tata kelola pelaksanaan sanitasi di tingkat kota dan daerah. Ketiga, akan diuraikan mengenai peran komunikasi dan media dalam mendukung sosialisasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sanitasi yang efektif.

(1) Sistem dan Infrastruktur

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) mengandalkan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air limbah langsung dari sumbernya ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sementara itu, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) mencakup pengelolaan air limbah yang berasal dari tangki septik individual maupun komunal. Limbah yang terkumpul kemudian diangkut menggunakan armada penyedot lumpur tinja untuk selanjutnya dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau dimasukkan ke dalam sistem perpipaan kota jika tersedia.

Tabel 2. 7 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting
1	Akses Aman	6,20%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	78,4%
3	Akses Belum Layak	19,5%
4	BABS Tertutup	9,3%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2025

Berdasarkan pada Tabel II.7, capaian akses sanitasi layak di Kota Bogor hingga tahun 2025 tercatat sebesar 78,4% yang masih berada di bawah target RPJMN 2025-2029. Dari total tersebut, proporsi penduduk yang telah memiliki akses terhadap sanitasi aman baru mencapai 6,2%. Artinya sebagian besar penduduk masih berada pada kategori sanitasi layak yang belum memenuhi kriteria aman. Sementara itu, sebanyak 19,5% penduduk masih memiliki akses terhadap sanitasi belum layak. Untuk BABS sendiri Kota Bogor telah deklarasi Open Defecation Free atau ODF, yang mana menandakan bahwa seluruh wilayah di Kota Bogor telah memenuhi syarat akses sanitasi dasar, dimana seluruh penduduk memiliki akses terhadap jamban sehat dan tidak ada lagi praktik BABS ditempat terbuka. Capaian 0% ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor (Pokja PKP), termasuk masyarakat,

kader kesehatan serta komitmen pemerintah daerah melalui program sanitasi total berbasis masyarakat.

Tabel 2. 8 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah truk tinja	Unit	8
2	Status asset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	4
4	Volume Tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	64
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	16
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	4

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Berdasarkan data sarana pengangkutan, saat ini Kota Bogor memiliki 8 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m³. Truk-truk tersebut dioperasikan untuk melayani penyedotan lumpur tinja dari tangki septik individu maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di permukiman.



Tahun Pembuatan 2018



Tahun Pembuatan 2007



Tahun Pembuatan 2021



Tahun Pembuatan 2021



Tahun Pembuatan 2017



Tahun Pembuatan 2015



Tahun Pembuatan



Tahun Pembuatan 2023



Tahun Pembuatan 2018



Tahun Pembuatan 2018



Tahun Pembuatan 2015



Tahun Pembuatan

Sumber: DPUPR Kota Bogor, 2025

Gambar 2. 20 Sarana Pengangkutan

Tabel 2. 9 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Tegal Gundil	
2	Status asset	Serah terima asset atau milik sendiri	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	30
4	Tahun Pembangunan	2011	
5	Tahun Rehabilitasi		-
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	Kota Bogor	
7	Wilayah layanan terjauh	km	35
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Anaerobic digester - Anaerobic baffled reactor-kolam aerasi-unit desinfeksi - sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	Dilakukan pengujian	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Baik	

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

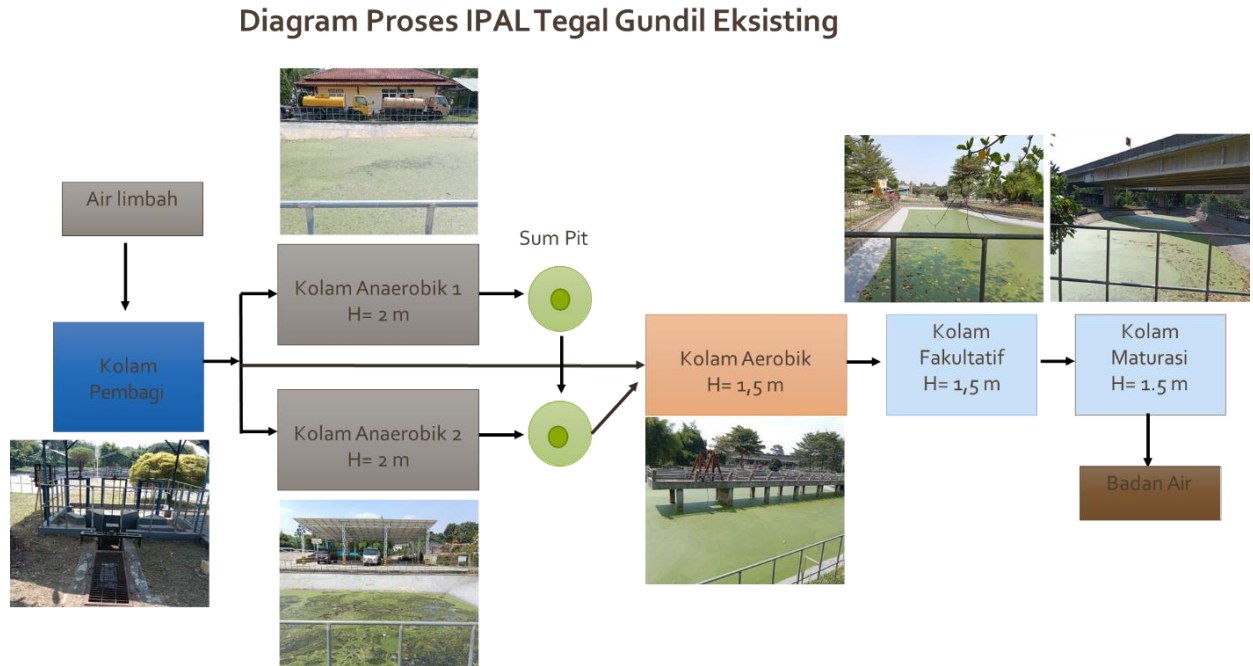


Gambar 2. 21 Sarana Pengolahan Lumpur Tinja

IPLT Tegal Gundil merupakan fasilitas pengolahan lumpur tinja di Kota Bogor yang beroperasi sejak 2011 yang berlokasi di Bogor Utara. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 30 m³ per hari, dan menggunakan sistem pengolahan modern seperti anaerobic digester, anaerobic baffled reactor, kolam aerasi, dan sludge drying bed. Teknologi ini memastikan proses pengolahan dilakukan secara ramah lingkungan dan standar teknis. Kualitas hasil olahan / *effluent* juga diuji secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan baku mutu yang ditetapkan.

Secara fisik, kondisi bangunan IPLT tergolong baik dan layak operasional, didukung oleh keberadaan sarana pendukung seperti sumber air, pagar pengaman, dan akses jalan masuk. Namun, kondisi jalan menuju lokasi masih memerlukan peningkatan agar distribusi lumpur tinja menuju IPLT dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Sebagai aset milik pemerintah, IPLT Tegal Gundil memiliki peran strategis dalam sistem sanitasi Kota Bogor. Fasilitas ini

tidak hanya berkontribusi terhadap pengelolaan limbah domestik yang aman, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Limbah tinja yang diolah di IPLT ini tidak hanya berasal dari rumah warga namun terdapat pula yang berasal dari perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit, dan bangunan komersial sejenis lainnya.



Sumber: Dinas PUPR, 2025

Gambar 2. 22 Diagram Proses IPAL Tegal Gundil Eksisting

Diagram Proses IPLTTegal Gundil Eksisting



Sumber: Dinas PUPR, 2025

Gambar 2. 23 Diagram Proses IPLT Tegal Gundil Eksisting

Tabel 2. 10 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan (SPALD-Terpusat)

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
1	IPAL Tanah Baru	Tanah Baru	1997	240	238	Bangunan Baik	UPTD	Dilakukan	Sudah
2	IPAL Andika Binangun	Balumbang Jaya	2010	24	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
3	IPAL Inti Barokah	Balumbang Jaya	2013	32	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
4	IPAL Cikobak Indah	Bubulak	2012	24	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
5	IPAL Cipendek Indah	Bubulak	2010	20	18.8	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
6	IPAL Gemah Ripah	Cilendek Barat	2017	24	20.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
7	IPAL Jaya Makmur	Cilendek Barat	2017	40	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
8	IPAL Kamboja	Cilendek Barat	2016	28	15.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
9	IPAL Pancuran	Cilendek Barat	2013	20	10	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
10	IPAL Sedap Malam	Cilendek Barat	2014	24	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
11	IPAL Tepang Sono	Cilendek Barat	2015	20	20.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
12	IPAL Flamboyan	Cilendek Timur	2013	32	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
13	IPAL Barokah	Curug	-	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
14	IPAL Cempaka	Curug	-	24	10	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
15	IPAL Kenanga	Curug	-	20	12	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
16	IPAL Cikobak	Gunung Batu	2013	20	9.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
17	IPAL Purbasari/Cibenda	Gunung Batu	2010	20	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
18	IPAL Sindangrasa	Gunung Batu	2007	20	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
19	IPAL Al Falakiyah	Loji	2015	28	0.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
20	IPAL Al-Mutaqin	Loji	2012	24	12	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
21	IPAL Baraya	Loji	2016	28	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
22	IPAL Beugenville 2	Margajaya	2015	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
23	IPAL Muara Wangi	Margajaya	2018	24	22.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
24	IPAL Solatri	Margajaya	2017	20	22	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
25	IPAL Panbona	Pasir Jaya	2016	20	15.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
26	IPAL Kemuning	Pasir Kuda	2012	20	15.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
27	IPAL Bina Sejahtera	Pasir Mulya	2012	36	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
28	IPAL Pilar Sejahtera	Semplak	2016	20	20.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
29	IPAL Al-Barokah	Sindangbarang	2017	20	20.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
30	IPAL Al Ikhlas	Sindang Barang	2016	20	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
31	IPAL Al-Ishlah	Sindangbarang	2012	24	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
32	IPAL Pancoran Mas	Sindangbarang	2017	32	48	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
33	IPAL Randu Jaya	Sindang Barang	2014	20	3.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
34	IPAL Roda Bersama	Sindangbarang	2019	50	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
35	IPAL Roda Mas	Sindang Barang	2018	28	28	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
36	IPAL Sanimas 74	Sindangbarang	2019	50	23.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
37	IPAL Bakom Urug	Bojongkerta	2016	12	10	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
38	IPAL Berseri	Bojongkerta	2016	19.6	14	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
39	IPAL Bojong Kidul	Bojongkerta	2013	24	20.4	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
40	IPAL Nurus Salam	Bojongkerta	2013	20	8	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
41	IPAL Sanimas IDB	Bojongkerta	2019	50	28	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
42	IPAL Cendrawasih	Bondongan	2016	24	7.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
43	IPAL Gelatik 14	Bondongan	2012	20	6	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
44	IPAL Harmoni/Wijaya Kusuma	Bondongan	2016	24	17.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
45	IPAL Soka	Cikaret	2016	32	32	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
46	IPAL Al-Mukaromah	Harjasari	2011	32	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
47	IPAL Harjasari Sejahtera	Harjasari	2016	24	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
48	IPAL Bintang Kejora	Kertamaya	2018	24	23.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
49	IPAL Cijebul	Kertamaya	2019	50	28	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
50	IPAL Margabakti	Kertamaya	2019	50	22	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
51	IPAL Bougenvile	Pakuan	2016	24	10.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
52	IPAL Baabul Jannah	Pamoyanan	2012	24	10	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
53	IPAL Mawar 58	Pamoyanan	2016	16	10	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
54	IPAL Rosella	Pamoyanan	2010	24	9.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
55	IPAL Pabuaran	Rancamaya	2013	28	6	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
56	IPAL Kemang Sari	Ranggamekar	2016	28	28	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
57	IPAL Kenanga	Ranggamekar	2017	20	46	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
58	IPAL Rangga Gading	Ranggamekar	2015	20	40	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
59	IPAL Cilibende	Babakan	2012	32	0.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
60	IPAL Ciwaringin Bersatu	Ciwaringin	2016	20	6	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
61	IPAL Pelita	Gudang	2014	16	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
62	IPAL Sejahtera	Gudang	2013	20	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
63	IPAL Sindangsari	Kebon Kalapa	2013	16	6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
64	IPAL Munjul Amanah	Paledang	2010	20	6.8	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
65	IPAL Putra Karamat	Panaragan	2013	24	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
66	IPAL Rambutan	Sempur	2016	16	12	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
67	IPAL Tirtalio	Sempur	2016	16	35.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
68	IPAL Sejahtera	Tegal Lega	-	16	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
69	IPAL Bantarkemang Sehat	Baranangsiang	2016	24	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
70	IPAL Sembilan Bersatu	Baranangsiang	2017	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
71	IPAL Alam Lestari	Katulampa	2014	24	6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
72	IPAL Cemper Asri	Katulampa	2013	12	28	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
73	IPAL Kali Baru Timur I	Katulampa	2013	24	20	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
74	IPAL Kali Baru Timur II	Katulampa	2013	24	4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
75	IPAL Kali Baru Timur III	Katulampa	2013	24	24.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
76	IPAL Mandiri	Katulampa	2012	20	0.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
77	IPAL Pasir Putih	Katulampa	2019	50	31.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
78	IPAL P2WKSS	Katulampa	2020	12	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
79	IPAL Bunga Indah	Sindangrasa	2012	16	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
80	IPAL Mawar Bodas	Sindangrasa	2013	12	4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
81	IPAL Melati	Sindangrasa	2016	24	12	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
82	IPAL Muara Ciliwung	Sindangrasa	2019	50	12	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
83	IPAL Muara Dua	Sindangrasa	2017	20	20.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
84	IPAL Muara Empat	Sindangrasa	2019	50	24.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
85	IPAL Muara Peundeuy	Sindangrasa	2018	24	22.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
86	IPAL Susuci	Sindangsari	2015	20	15.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
87	IPAL Amanah	Sindangsari	2010	28	18.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
88	IPAL Anggrek Ungu	Sindangsari	2016	28	19.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
89	IPAL Dahlia	Sindangsari	2016	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
90	IPAL Kongsu Berseri	Sindangsari	2017	24	47.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
91	IPAL Kongsu Indah	Sindangsari	2016	36	31.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
92	IPAL Kramat Atas	Sindangsari	2018	24	24	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
93	IPAL Lamping Sehat	Sindangsari	2019	50	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
94	IPAL Palasari	Sindangsari	2019	50	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
95	IPAL Silvaloka Madani	Tajur	2007	32	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
96	IPAL Bantarjati Lebak	Bantarjati	2019	8	14.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
97	IPAL Delapan	Bantarjati	2016	12	14.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
98	IPAL Tiga Belas	Bantarjati	2016	24	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
99	IPAL Anugrah	Cibuluh	2017	20	24	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
100	IPAL Sehat	Cibuluh	2014	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
101	IPAL Batara	Ciluar	2017	20	14.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
102	IPAL Mekar	Ciluar	2014	20	4	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
103	IPAL Revolusi	Ciluar	2013	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
104	IPAL Al-Barokah	Cimahpar	2010	12	9.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
105	IPAL Cimahpar	Cimahpar	2016	20	13.2	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
106	IPAL Ciparigi Kaum	Ciparigi	2016	12	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
107	IPAL Karya Mandiri	Ciparigi	2012	24	0	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
108	IPAL Mandala	Ciparigi	2014	24	16	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
109	IPAL Pelita Harapan	Kedung Halang	2016	20	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
110	IPAL Cempaka 07	Tanah Baru	2019	8	5.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
111	IPAL Kenanga	Tanah Baru	2019	50	27.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
112	IPAL Kramat Sehat	Tanah Baru	2018	24	25.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
113	IPAL Waras	Tanah Baru	2016	12	17.2	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
114	IPAL Al Hikmah	Tegal Gundil	2018	20	24	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
115	IPAL Ceger 55	Tegal Gundil	2016	12	4.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
116	IPAL Delima	Tegal Gundil	2017	28	21.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
117	IPAL Sanimas IDB	Tegal Gundil	2019	50	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
118	IPAL Anggrek	Cibadak	2016	20	10.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
119	IPAL Nurul Yaqin	Cibadak	2013	16	10.4	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
120	IPAL Al-Fuutuuhah	Kedung Waringin	2013	32	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
121	IPAL Nurul Yaqin	Kedung Waringin	2013	20	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
122	IPAL Palakali	Kencana	2018	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
123	IPAL Baiturrohman	Mekarwangi	2013	36	6.8	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
124	IPAL Tunas Mekar	Mekarwangi	2016	32	16	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
125	IPAL Damai Bersatu	Sukadama	2017	36	24	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
126	IPAL Anamah 4	Sukaesmi	2013	20	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
127	IPAL Fortuna	Sukaesmi	2018	16	24	Bangunan rusak	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
128	IPAL Istiqomah	Sukaesmi	2017	28	22	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
129	IPAL Maju Bersama	Sukaesmi	2015	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
130	IPAL Poncol	Sukaesmi	2016	20	0	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
131	IPAL Amanah Lestari	Bojongkerta	2021	12	8.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

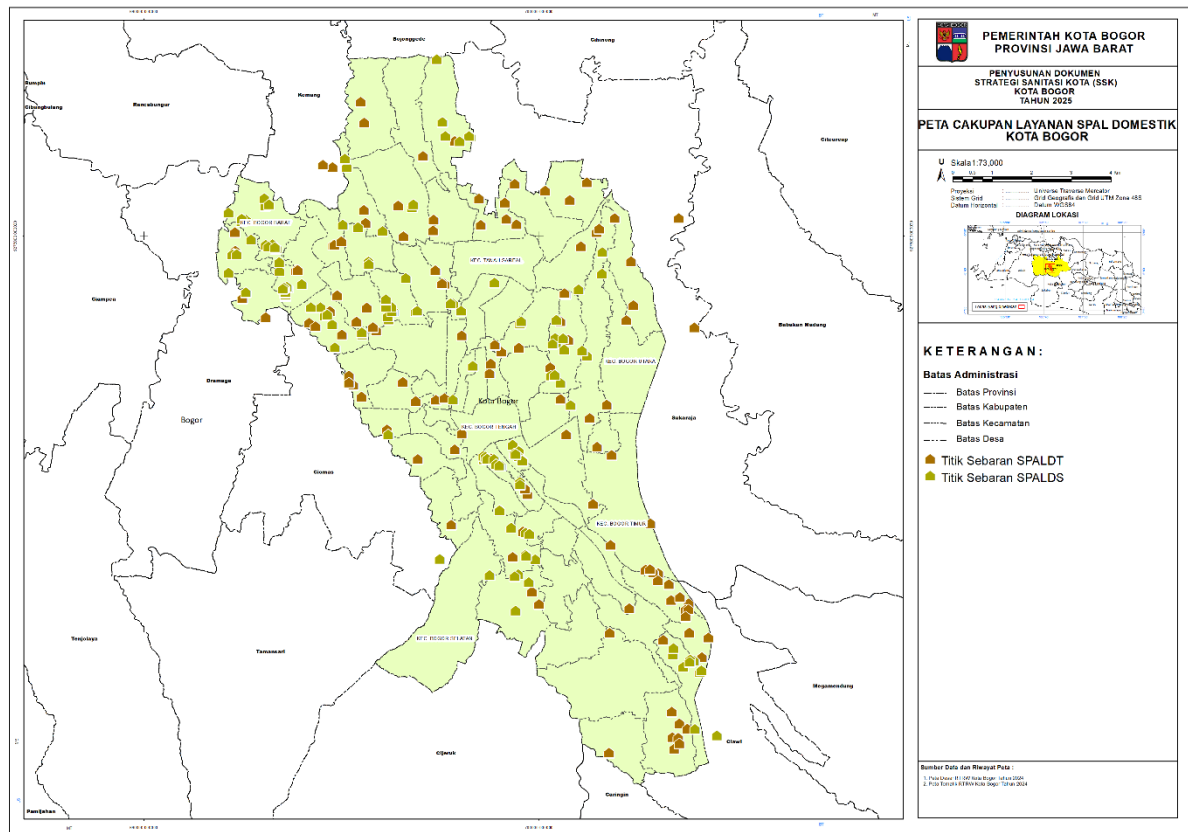
No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain IPAL (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
132	IPAL Nagrog Sejahtera	Pamoyanan	2021	24	20.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
133	IPAL Aspirasi	Bojongkerta	2021	24	10.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
134	IPAL Cipakancilan 13	Kebon Pedes	2022	28	20.8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
135	IPAL Pilar 0307 SINBAR	Sindangbarang	2022	28	21.6	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
136	IPAL Bojong Neros Berseri	Curug	2022	8	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
137	IPAL P2WKSS 2023	Kayumanis	2023	8	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
138	IPAL KPP MARBELA BERSAHAJA	Margajaya	2024	20	20	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
139	IPAL SPALDT P2WKSS 2024	Cimahpar	2024	10	8	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
140	IPAL SPALDT APBD Semplak 2024	Semplak	2024	10	10	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
141	IPAL SPALDT APBD Sindangsari 2024	Sindangsari	2024	10	10.4	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
142	IPAL SPALDT APBD Tanah Sareal 2024	Tanah Sareal	2024	10	9.2	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025
DPUPR, 2025

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan terdapat 142 unit SPALDT dan 268 unit SPALDS dengan kondisi serta tingkat pemanfaatan yang beragam. Sebagian besar fasilitas SPALD di Kota Bogor berada dalam kondisi baik dan masih beroperasi. Fasilitas-fasilitas tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bogor.



Gambar 2. 24 Sarana Pengolahan IPAL Komunal



Gambar 2. 25 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik

Tabel 2. 11 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029	Target - 2029		Target Jangka Pendek Kota Bogor (2025)	Capaian Tahun 2024	GAP Terhadap Target 2029	GAP Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor				
1	Akses Aman	30%	35.0%	7.12%	6.27%	6.20%	0.92%	0.07%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	100%	100.0%	100.0%	80.0%	78.4%	21.60%	1.60%
3	Akses Belum Layak					19.5%		
4	BABS Tertutup					9.3%		
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Seperti yang sudah dijelaskan diawal, Kota Bogor telah mencapai 78.4% akses layak dengan 6,2% diantaranya merupakan akses aman. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan atau gap. Terkait dengan capaian BABS ditempat terbuka, Kota Bogor telah menyatakan diri sebagai kota bebas buang air besar sembarangan / ODF sehingga telah memenuhi target nasional dalam pilar pertama STBM.

Tabel 2. 12 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Analisis Keberfungsian SPALDS		
Kapasitas Penggunaan IPLT	%	100.00%
Kapasitas Penggunaan Truk Tinja	%	31.25%
Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	%	213.33%
Kapasitas IPLT terhadap total rumah tinggal	%	2.62%
Kapasitas truk tinja terhadap rumah tangga	%	5.60%
Analisis Keberfungsian SPALDT		
SPALDT Skala Regional	%	-
SPALDT Skala Perkotaan	%	-
SPALDT Skala Permukiman Berbasis Institusi	%	-
SPALDT Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	%	70,70%
Skala Kawasan Khusus	%	-

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

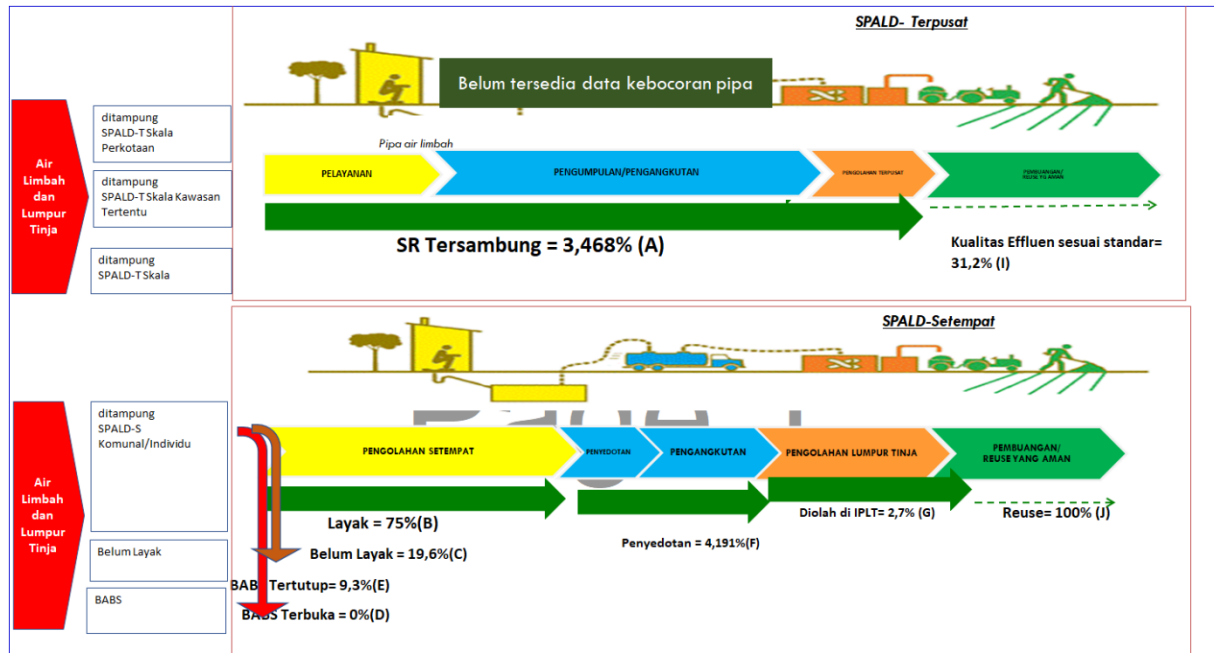
IPLT di Kota Bogor telah berfungsi secara optimal, di mana kapasitas desain yang direncanakan telah terpakai sepenuhnya. Namun, berdasarkan hasil analisis, cakupan layanan IPLT terhadap rumah tangga masih tergolong rendah. Padahal, keberadaan infrastruktur IPLT memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan akses terhadap sanitasi aman. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan kapasitas IPLT yang tersedia, termasuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat sistem pengelolaan lumpur tinja, agar mampu memenuhi kebutuhan layanan yang lebih luas di masa mendatang.

Analisis Rantai Layanan Air Limbah

Bagian ini memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang meliputi tangki septik individual, MCK Komunal (fasilitas sanitasi Bersama berupa tempat mandi, mencuci dan buang air yang disediakan untuk beberapa keluarga di permukiman tertentu), IPAL Domestik (instalasi pengolahan air limbah domestik), IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja), dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi yang disajikan menggambarkan rantai layanan sebagai potret eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor saat ini. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor dilayani melalui dua sistem utama, yaitu:

- 1) SPALD Terpusat – sistem pengolahan yang mengumpulkan dan mengolah air limbah dari jaringan perpipaan.
- 2) SPALD Setempat – sistem pengolahan di lokasi sumber, seperti tangki septik individu atau MCK komunal.

Berdasarkan gambar 2.26, sekitar 3% penduduk di Kota Bogor yang air limbah domestik ditampung ke SPALD Terpusat (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) serta masih terdapat sekitar 20% penduduk yang memiliki akses belum layak, baik karena kondisi sarana yang tidak memenuhi standar maupun belum adanya fasilitas pengelolaan yang memadai.



Gambar 2. 26 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	DPUPR	3%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	31%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	STBM	75%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	20%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	DPUPR	4%
G	Persentase debit lumpur tinja ddiolah di IPLT	Dinas LH	3%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	100%
E	Persentase BABS (di tempat tertutup)	STBM	9%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	0%

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

Dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor, terdapat keterlibatan berbagai pihak, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang masing-masing menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi serta kepentingannya secara lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1) Pemerintah Daerah

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam pengembangan infrastruktur, sementara Dinas Perumahan dan Permukiman bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana di kawasan permukiman. Dinas Kesehatan turut serta dalam aspek kesehatan lingkungan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mendukung pemberdayaan masyarakat dalam praktik sanitasi yang baik. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan Bapperida mengoordinasikan perencanaan program secara menyeluruh dan terpadu. Berikut disajikan tabel pemetaan tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik yang

menunjukkan peran masing-masing perangkat daerah dalam perencanaan dan pemanfaatan infrastruktur eksisting di Kota Bogor.

Tabel 2. 13 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	Bapperida, Dinas PUPR	UPTD PAL	
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	Bapperida, Dinas PUPR (seksi AMAL)	UPTD PAL	
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Bapperida, Dinas PUPR (seksi AMAL)	UPTD PAL	
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah Domestik	Dinas PUPR (seksi AMAL)		
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Dinas PUPR (seksi AMAL)		
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Dinas PUPR (seksi AMAL)		
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Dinas PUPR (seksi AMAL)		
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Dinas PUPR	UPTD PAL	
PENGLOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja		UPTD PAL	
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	Dinas PUPR	UPTD PAL	
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja		UPTD PAL	
• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Belum ada		
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Dinas PUPR, Disperumkim		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)		UPTD PAL	
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah DOMESTIK	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPPPA	UPTD PAL	
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestik	Dinas PUPR		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Dinas PUPR (seksi AMAL)	UPTD PAL	
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah Domestik	Dinas PUPR	UPTD PAL	
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap	Dinas PUPR	UPTD PAL (IPLT)	

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	(IPAL Berbasis Masyarakat dan institusi)	dan IPAL berbasis Institusi)	
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Dinas PUPR (IPAL Berbasis Masyarakat dan institusi), DLH (pengujian kualitas air limbah)	UPTD PAL (IPLT dan IPAL berbasis Institusi)	

Sumber: Hasil Pemetaan, 2025

Dari pemetaan diatas dan berdasarkan diskusi dengan Pokja PKP Kota Bogor, penting untuk menyoroti potensi dan urgensi penugasan baru bagi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam mendukung peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman. Saat ini, peran Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor lebih dikenal sebagai penyedia layanan air bersih. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan pengelolaan lingkungan dan tuntutan pencapaian target SDGs di bidang sanitasi, Perumda Tirta Pakua Kota Bogor diharapkan dapat mengambil posisi strategis dalam pengelolaan air limbah domestik. Integrasi layanan air bersih dan air limbah yang dikelola dalam satu kelembagaan akan memungkinkan optimalisasi pemanfaatan jaringan dan basis data pelanggan eksisting, sehingga mendukung distribusi layanan yang lebih efektif.

Penugasan ini dapat meliputi pengelolaan jaringan perpipaan air limbah serta pengoperasian fasilitas pengolahan air limbah (IPAL/IPLT). Dengan basis pengalaman dan sistem pelayanan yang telah dimiliki oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, kolaborasi dengan perangkat daerah lain seperti Dinas PUPR dan UPTD PAL menjadi krusial untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan - mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi - dapat berjalan terpadu dan berorientasi pada peningkatan akses sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola, mempercepat pencapaian target pelayanan, serta menumbuhkan inovasi kelembagaan di tingkat daerah. Dengan demikian, penugasan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor bukan hanya memberikan nilai tambah dalam hal efektivitas dan efisiensi pelayanan, tetapi juga turut mendorong transformasi Kota Bogor menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

2) Kelembagaan Masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana sanitasi, khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik, sangat penting agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya. Kesadaran ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki yang kuat, sehingga masyarakat terdorong untuk terlibat dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem sanitasi. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan sanitasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, sementara kewajiban mereka mencakup partisipasi dalam bentuk pemikiran, waktu, dan kontribusi finansial melalui pembayaran iuran secara rutin.

Keterlibatan masyarakat ini diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai pengelola sarana. KSM terbentuk atas dasar tujuan bersama dan memegang peran strategis dalam implementasi pembangunan sanitasi. Sementara itu, KPP lebih berfokus pada aspek pemanfaatan dan pemeliharaan berkelanjutan dari infrastruktur sanitasi yang telah dibangun, serta menjembatani hubungan antara pengguna layanan dan pengelola teknis. Fungsinya mencakup pemeliharaan berkelanjutan sarana dan prasarana, pengumpulan iuran, pengelolaan keuangan operasional, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Peran kolaboratif KSM dan KPP ini sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk mengelola sanitasi secara lebih beradab dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Informasi lebih lanjut mengenai pemetaan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 14 Data Lembaga Pengelola Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
1	SPALD-T	Andika Binangun 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Babakan Lio Rt02 / Rw11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
2	SPALD-T	Inti Barokah 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Babakan Lebak Rt.04 / Rw 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
3	SPALD-T + MCK	Cikobak Indah 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bubulak Rt03/Rw07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
4	SPALD-T + MCK	Cipendek Indah 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bubulak Rt03/Rw07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
5	SPALD-T	Gemah Ripah 2017	KPP NO.660/14 CLB	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Cemplang Baru Rt 02 / Rw 11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
6	SPALD-T	Jaya Makmur 2017	KPP NO. 147/18cib	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Karya Bakhti, Blok Tempe Rt 03 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
7	SPALD-T + MCK	Kamboja 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. Makam Rt.02 Rw. 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
8	SPALD-T	Pancuran 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Cilendek Barat Rt02/Rw02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
9	SPALD-T + MCK	Sedap Malam 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Cilendek Barat Rt03/Rw02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
10	SPALD-T + MCK	Tegang Sono 2015	KSM NO. 474/56		perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sawah Rt 03 Rw 08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
11	SPALD-T + MCK	Flamboyan 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Cilendek Timur Rt 03 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
12	SPALD-T	Barokah 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Curug Rt 01 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
13	SPALD-T	Cempaka 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Curug Induk Rt 01 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
14	SPALD-T + MCK	Kenanga 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Salabenda Got Rt 01 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
15	SPALD-T	Cikobak 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp.Tarikolot Rt 02 Rw 14	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
16	SPALD-T	Purbasari/Cibenda 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Purbasari Rt 03 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
17	SPALD-T	Sindangrasa 2007			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sindangrasa Rt.01, Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
18	SPALD-T	Al Falakiyah 2015			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Sirnagalih Ii No.5 Loji	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
19	SPALD-T	Al-Mutaqin 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sindangbarang Loji Rt.02, Rw 13	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Tidak Berfungsi
20	SPALD-T	Baraya 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sindangbarang Gedong Seng Rt.04, Rw 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
21	SPALD-T	Beugenville 2 2015			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Guguh Sari Rt 02 Rw 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
22	SPALD-T	Muara Wangi 2018	KPP NO. 411.8 TAHUN 2018	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. H. Burhan, Rt 03 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
23	SPALD-T	Solatri 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. H. Burhan Rt 01 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
24	SPALD-T	Panbona 2016	KPP No. 147/18/SK/PSJ TAHUN 2016	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Pancasan Rt 01 Rw 12	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
25	SPALD-T	Kemuning 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Babakan Pasirmas Rt 03 Rw 08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
26	SPALD-T	Bina Sejahtera 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sawah Luhur Rt 03 Rw 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
27	SPALD-T	Pilar Sejahtera 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Semplak Pilar Rt 03 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
28	SPALD-T + MCK	Al-Barokah 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Pilar Rt 03 Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
29	SPALD-T + MCK	Al Ikhlas 2016	KPP NO. 149/V/TAHUN 2016	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Pilar	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
30	SPALD-T	Al-Ishlah 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Jembatan Rt 01 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
31	SPALD-T + MCK	Pancoran Mas 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Pancuran Mas Rt 02 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
32	SPALD-T + MCK	Randu Jaya 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Rt 03 Rw05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
33	SPALD-T + MCK	Roda Bersama 2019	KPP NO. 147/165.1- TAHUN 2019	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 02 RW 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
34	SPALD-T	Roda Mas 2018			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Jembatan, Rt 03 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
35	SPALD-T	Sanimas 74 2019		3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 07 RW 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
36	SPALD-T	Bakom Urug 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bakom Urug Rt02/Rw06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
37	SPALD-T	Berseri 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bojong Pesantren Rt02/Rw03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
38	SPALD-T + MCK	Bojong Kidul 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bojong Kerta Rt06/Rw02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
39	SPALD-T + MCK	Nurus Salam 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pesantren Rt01/Rw05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
40	SPALD-T	Sanimas IDB 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 04 RW 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
41	SPALD-T + MCK	Cendrawasih 2016	KPP No. 148.45/02/2019-Bond	15 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Jero Kuta Kaum Rt04/Rw15	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
42	SPALD-T + MCK	Gelatik 14 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Jerokuta Kaum Rt.02 Rw.14	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
43	SPALD-T + MCK	Harmoni/Wijaya Kusuma 2016	KPP NO. 03/VIII/BON TAHUN 2016	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Warung Bandrek Rt02/Rw12	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
44	SPALD-T	Soka 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Cikaret Rt03/Rw10	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
45	SPALD-T + MCK	Al-Mukaromah 2011			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bojong Kerta Rt03/Rw12	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
46	SPALD-T	Harjasari Sejahtera 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Indah Sari Rt 01 Rw 1	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
47	SPALD-T	Bintang Kejora 2018	KPP NO. 440/22 TAHUN 2018	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Margabakti Rt 02 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
48	SPALD-T	Cijebul 2019	KPP NO. 440/16-TAHUN 2019	5 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 03 RW 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
49	SPALD-T + MCK	Margabakti 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 04 RW 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
50	SPALD-T	Bougenvile 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Tajur Rt. 04 Rw. 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
51	SPALD-T + MCK	Baabul Jannah 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Nagrog Atas Rt 01 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
52	SPALD-T	Mawar 58 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bojong Rt01/Rw08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
53	SPALD-T	Rosella 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bojong Rt01/Rw02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
54	SPALD-T	Pabuaran 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Pabuaran Rt, 01 Rw. 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
55	SPALD-T	Kemang Sari 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Pamoyanan Rt 02 Rw 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
56	SPALD-T	Kenanga 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. Rambutan Rt 02 Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
57	SPALD-T	Rangga Gading 2015			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sirnagalih Rt 02 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
58	SPALD-T + MCK	Cilibende 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Cilibende Rt 05 Rw 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
59	SPALD-T	Ciwaringin Bersatu 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Ciwaringin Rt 02 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
60	SPALD-T + MCK	Pelita 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kebon Pala Rt 02 Rw 11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
61	SPALD-T + MCK	Sejahtera 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp.Cincau Rt 04 Rw 08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
62	SPALD-T + MCK	Sindangsari 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sindangsari Rt 05 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
63	SPALD-T + MCK	Munjul Amanah 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kebon Manggis Munjul Rt 02/04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
64	SPALD-T + MCK	Putra Karamat 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Karamat Rt 04 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
65	SPALD-T + MCK	Rambutan 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Rambutan Rt 01 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
66	SPALD-T + MCK	Tirtalio 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Rambutan Rt 06 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
67	SPALD-T + MCK	Sejahtera 2011			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Tegal Lega	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
68	SPALD-T + MCK	Bantarkemang Sehat 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bantar Kemang Rt.02 Rw.07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
69	SPALD-T + MCK	Sembilan Bersatu 2017	KPP NO.14 TAHUN 2017	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Ciheuleut Rt.04 Rw.09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
70	SPALD-T + MCK	Alam Lestari 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Katulampa Buleud Rt 03 Rw 08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
71	SPALD-T + MCK	Cemper Asri 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Katu Lampa Panjang Rt 03 Rw 19	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
72	SPALD-T + MCK	Kali Baru Timur I 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bendungan Katulampa Rt 03 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
73	SPALD-T + MCK	Kali Baru Timur II 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bendung Katulampa Rt 04 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
74	SPALD-T + MCK	Kali Baru Timur III 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bendung Katulampa Rt 04 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
75	SPALD-T + MCK	Mandiri 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Katulampa Rt.01 Rw.07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
76	SPALD-T	Pasir Putih 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp Pasir RT 03 RW 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
77	SPALD-T + MCK	P2WKSS			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Lebak Rt 03 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
78	SPALD-T + MCK	Bunga Indah2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Peundeuy Rt 01 Rw 11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
79	SPALD-T + MCK	Mawar Bodas 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Rt 01 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
80	SPALD-T + MCK	Melati 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 05 RW 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
81	SPALD-T + MCK	Muara Ciliwung 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Rt 02 Rw 12	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
82	SPALD-T	Muara Dua 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 04 RW 10	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
83	SPALD-T + MCK	Muara Empat 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Peundeuy Rt 03 Rw 11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
84	SPALD-T + MCK	Muara Peundeuy 2018	KPP NO. 845/33-SDR-TAHUN 2018	7 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Muara Peundeuy Rt 04 Rw 11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
85	SPALD-T + MCK	Susuci 2015			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Waringin Rt 03 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
86	SPALD-T + MCK	Amanah 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Wangun Tengah Rt.04/Rw.03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
87	SPALD-T + MCK	Anggrek Ungu 2016	KPP No. 441/14-SEKRET	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Palasari Rt06/Rw05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
88	SPALD-T + MCK	Dahlia 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Lebak Kongsi Rt 02 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
89	SPALD-T + MCK	Kongsi Berseri 2017	KPP NO.147/14/SEKRET/TAHUN2017	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Lebak Kongsi Rt 03 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
90	SPALD-T + MCK	Kongsi Indah 2016	KPP NO.147/16/SEKRET/TAHUN2016	7 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Wangun Atas RT 03 RW 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
91	SPALD-T	Kramat 2018	KPP NO.148/14/SEKRET/TAHUN2018	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp Palasari RT 05 RW 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
92	SPALD-T	Lamping Sehat 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 02 RW 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
93	SPALD-T + MCK	Palasari 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bantar Peteuy Rt 01 RW 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
94	SPALD-T	Silvaloka Madani 2007			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bantarjati Lebak Rt 01 RW 08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
95	SPALD-T + MCK	Bantarjati Lebak 2019			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bantarjati Lebak Rt.03 Rw.08	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
96	SPALD-T + MCK	Delapan 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Bantarjati Atas Rt.03 Rw. 13	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
97	SPALD-T + MCK	Tiga Belas 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. Kondang Rt 02 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
98	SPALD-T + MCK	Anugrah 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Neglasari Rt 03 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
99	SPALD-T + MCK	Sehat 2014	KPP NO. 512/01-CBLTAHUN2017	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Batara Rt 02 Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
100	SPALD-T + MCK	Batara 2017	KPP NO.147/ ../7/TAHUN 2017	12 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Rambay RT 01 RW 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
101	SPALD-T + MCK	Mekar 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Bubulak Rt 03 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
102	SPALD-T + MCK	Revolusi 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sawah Rt.02 Rw.11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
103	SPALD-T + MCK	Al-Barokah 2010			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Blok Paku Rt.03 Rw. 10	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
104	SPALD-T + MCK	Cimahpar 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Kaum Rt.02 Rw.11	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
105	SPALD-T + MCK	Ciparigi Kaum 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Ciparigi Rt.02 Rw.04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
106	SPALD-T + MCK	Karya Mandiri 2012			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kampung Mandala Rt.06 Rw.02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
107	SPALD-T + MCK	Mandala 2014			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp.Tunggilis Rt.05 Rw.13	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
108	SPALD-T	Pelita Harapan 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 04 RW 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
109	SPALD-T	Cempaka 07 2019	KPP No.658/SK.58/2019	4 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sawah RT 02 RW 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
110	SPALD-T + MCK	Kenanga 2019	KPP NO.145/285/VI/TNB-2019	2 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Kramat Rt 06 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
111	SPALD-T + MCK	Kramat Sehat 2018	KPP NP.658/SK.58/2018	4 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Gg. Lebak Rt 06 Rw 09	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
112	SPALD-T + MCK	Waras 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Tegalgundil Rt. 05 Rw. 18	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
113	SPALD-T + MCK	Al Hikmah 2018	KPP No. 147/87-SK TAHUN 2018	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Ceger Rt.03 Rw 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
114	SPALD-T + MCK	Ceger 55 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Kaung Luwuk Rt 05 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
115	SPALD-T	Delima 2017	KPP NO. 147/88-TGN/2017	4 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 01 RW 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
116	SPALD-T + MCK	Sanimas IDB 2019	KPP NO.221-SK TAHUN 2019	4 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gg. Kukupu Rt 03 Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
117	SPALD-T + MCK	Anggrek 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Sirempet, Cibadak Rt.02 Rw 13	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
118	SPALD-T + MCK	Nurul Yaqin 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Cimanggu Lamping Rt 01 Rw 03	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
119	SPALD-T + MCK	Al-Fuutuuhah 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Pahlawan Tijan, Kedungwaringin RT 01 RW 05	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
120	SPALD-T + MCK	Nurul Yaqin 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Kencana RT 03 Rw 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
121	SPALD-T + MCK	Palakali 2018	KPP NO. 440/21/KCN TAHUN 2018	3 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mekarwangi Rt. 04 Rw 01	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
122	SPALD-T + MCK	Baiturrohman 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Cimanggis Rt 01 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
123	SPALD-T + MCK	Tunas Mekar 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Situ Pete Blok Sawo Rt 03 Rw 13	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
124	SPALD-T + MCK	Damai Bersatu 2017			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kedunghalang Sugih Lamping Rt 04 Rw 07	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
125	SPALD-T + MCK	Anamah 4 2013			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Kb, Rt. 5 Rw.3	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
126	SPALD-T + MCK	Fortuna 2018			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Blok Asem Rt 03 Rw 02	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	tidak berfungsi
127	SPALD-T + MCK	Istiqomah 2017	KPP NO. 658/27/TAHUN2017	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kedung Halang Sentral Rt 04 Rw 04	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
128	SPALD-T + MCK	Maju Bersama 2015	KPP NO. 145/90-Skr	6 Orang	perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kedung Halang Poncol Rt 05 Rw 06	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
129	SPALD-T	Poncol 2016			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kedung Halang Poncol Rt 05 Rw 06 Sukaresmi	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
130	SPALD-T	Amanah Lestari			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kampung Bojong Pesantren RT 02 RW 03 Bojongkekerta	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi
131	SPALD-T	Nagrog Sejahtera			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kampung Nagrog RT 02 RW 09 Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	berfungsi

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status/ Keterangan
								pengadaan	
132	SPALD-T	Aspirasi			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Kp. Situbeureum RT03 RW01 Bojongkerta	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
133	SPALD-T	Cipakancilan 13			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Pondok Rumput RT05 RW13 Kebon Pedes	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
134	SPALD-T	Pilar 0307 SINBAR			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Sindangbarang Pilar 1 RT003/RW007	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
135	SPALD-T	Bojong Neros Berseri			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Curug RT001/RW007	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
136	SPALD-T	P2WKSS 2023			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 01 RW 06 Kayumanis	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
137	SPALD-T	KPP MARBELA BERSAHAJA			perawatan dan pemeliharaan IPAL	KP. SAWAH RT 005 RW 002 Margajaya	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
138	SPALD-T	SPALDT P2WKSS 2024			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 02 RW 04 Cimahpar	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
139	SPALD-T	SPALDT APBD Semplak 2024			perawatan dan pemeliharaan IPAL	Semplak	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
140	SPALD-T	SPALDT APBD Sindangsari 2024			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 01 RW 05 Sindangsari	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
141	SPALD-T	SPALDT APBD Tanah Sareal 2024			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 04 RW 06 Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi
142	SPALD-T	Harjasari Indah			perawatan dan pemeliharaan IPAL	RT 1 RW 6 Harjasari Indah	Iuran Masyarakat	Jaringan Perpipaan dan fasilitas IPAL / DAK	Berfungsi

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025
DPUPR, 2025

3) Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah

Di luar unsur pemerintah, pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor meliputi kelembagaan masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media. Mereka berkontribusi melalui berbagai peran seperti pengelolaan operasional, pendampingan teknis, penyuluhan, edukasi, serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat guna mendukung sistem sanitasi yang berkelanjutan.

Salah satu unsur penting adalah anggota legislatif yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan dukungan aspirasi masyarakat serta alokasi anggaran dari APBD, mereka dapat mendorong kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah domestik yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Organisasi masyarakat (ormas) turut berperan dalam menyampaikan informasi, menyelenggarakan kegiatan sosial, serta membantu penyebarluasan praktik sanitasi layak. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan menjangkau komunitas secara langsung dan memberikan bantuan teknis, pelatihan, hingga pengelolaan langsung terhadap sarana sanitasi skala komunitas.

Selain itu, peran kelembagaan masyarakat seperti Yayasan, BKM, KSM, KPP, LSM, PKK dan koperasi, sangat penting dalam penguatan kapasitas lokal. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam pengelolaan IPAL komunal (seperti SANIMAS), penyuluhan, serta pembinaan masyarakat. Contohnya seperti Forum Kota Sehat, Asosiasi Sanitasi Indonesia Kota Bogor, dan mitra pembangunan seperti IUWASH. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun lembaga donor untuk memastikan bahwa sistem sanitasi dikelola secara partisipatif dan berkesinambungan.

Dengan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan ini, pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang berbasis masyarakat. Tabel dibawah ini memberikan gambaran peran, kepentingan, serta kekuatan/sumber daya dari masing-masing pihak dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang inklusif dan kolaboratif.

Tabel 2. 15 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
Pengusaha / Swasta	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR - Pengelolaan air limbah DOMESTIK secara mandiri dan perizinan dampak lingkungan	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah domestik - Mengurangi dampak lingkungan/ pencemaran dengan membangun IPAL mandiri
Pengusaha Truk Tinja	Menjalankan bisnis pengelolaan sedot tinja kepada masyarakat	Membantu operasional IPLT dalam pencapaian akses aman
Organisasi Massa (Ormas)	Berbagi Informasi dan	Bantuan teknis (sosialisasi,

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
	kegiatan terkait pengelolaan air limbah	pembinaan dan pelatihan) • Pengelola Sarana Air Limbah Domestik
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK/ Koperasi dll): • KSM • Forum Kota Sehat • Asosiasi Sanitasi Indonesia Kota Bogor • IUWASH	• Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan air limbah domestik • Pengelola Sarana Air Limbah Domestik (IPAL Sanimas)	• Bantuan teknis (sosialisasi, pembinaan dan pelatihan) • Pengelola Sarana Air Limbah Domestik

Tabel 2. 16 Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	• Alokasi usulan terkait persampahan dalam APBD • Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Air Limbah Domestik	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR	Tinggi	Tinggi	Ya
Pengusaha/ Swasta	Pengelolaan IPAL Mandiri	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)	Sedang	Sedang	Ya
Pengusaha Truk Tinja	Pelayanan Truk Tinja		Sedang	Sedang	Ya
KSM	• Kelompok Pemanfaat dan Pengelola infrastruktur Sanimas • Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik	Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tinggi	Tinggi	Ya
Tokoh Masyarakat :	• Kelompok Pemanfaat dan Pengelola infrastruktur Sanimas • Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik • Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan Air Limbah Domestik	Pendukung	Tinggi	Tinggi	Ya

4) Regulasi

Pemetaan regulasi daerah terkait air limbah domestik di Kota Bogor berisi acuan hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sanitasi agar berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kota Bogor telah memiliki regulasi spesifik berupa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan SPALD. Perda ini memuat substansi pengaturan minimal sebagaimana yang disyaratkan dalam Kebijakan Menteri PUPR terkait penyelenggaraan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) dan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat), sehingga dapat menjadi dasar hukum operasional dalam pelaksanaan program sanitasi domestik.

Untuk mendukung implementasinya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018. Perwal ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Dengan adanya perda ini, Kota Bogor telah memenuhi salah satu prasyarat penting dalam penguatan kelembagaan dan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan air limbah domestik secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2. 17 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Air Limbah Domestik			
No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD: SPALD-S dan SPALD-T	Ada	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	Ada	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	Ada, namun untuk penetapan retribusi diatur dalam perda tersendiri, yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
6	Sebutkan semua turunan update Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	Sudah ada, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Perwal terkait : 1. SPALD-S dan SPALD-T 2. Ketentuan teknis mengenai perencanaan SPALD 3. Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan ALD 4. Penerapan Sanksi 5. Subsidi Pembiayaan penyambungan SR sambungan rumah ke jaringan air limbah terpusat	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa	Ada	Belum Ada
		Ada	

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2021 hadir sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Aturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pengelolaan air limbah domestik, mulai dari perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pengawasan serta penegakan sanksi. Sebagai pelaksanaan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018, Perwali Nomor 108 Tahun 2021 menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran pengelolaan air limbah domestik. Pasal 41 mengatur denda antara Rp50.000–Rp10.000.000 untuk individu maupun badan usaha, mencakup pelanggaran seperti pembuangan limbah di luar fasilitas pengolahan, pembuangan limbah industri/B3 ke sistem domestik, perusakan sarana, buang air besar sembarangan, penyambungan ilegal, dan pembangunan di atas jaringan air limbah.

(3) Komunikasi dan Media

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, berbagai kegiatan komunikasi telah dilakukan untuk mempromosikan pentingnya hygiene, sanitasi, serta pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah yang aman. Informasi mengenai jenis dan bentuk kegiatan komunikasi tersebut telah dirangkum secara sistematis untuk mendukung efektivitas program sanitasi di wilayah tersebut. Kegiatan komunikasi terkait promosi hygiene dan sanitasi di Kota Bogor berada pada Dinas Kesehatan serta Dinas Perumahan dan permukiman.

Tabel 2. 18 Jenis Media Promosi terkait Sanitasi di Kota Bogor

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
1	Berita Online : Kompas.id, Liputan Bogor.com, dll	Umum	APBD	Media Promosi PHBS dan sanitasi	PHBS dan Sanitasi	Cukup Efektif
2	Website: sanitasi.kotabogor.go.id	Umum	APBD	Media Promosi Kegiatan Sanitasi di Kota Bogor	Sanitasi	Cukup Efektif
3	Media Sosial Pemerintah Daerah Kota Bogor : Instagram, TikTok. (Salah satu instagram : @dinasuprkokotabogor , @dinkeskokotabogor)	Umum	APBD	Media Promosi PHBS dan sanitasi	PHBS dan Sanitasi	Cukup Efektif

Tabel II.1 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi di Kota Bogor

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Sosialisasi Germas dan Pemicuan STBM	2020	Dinas Kesehatan	Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan	Masyarakat Kota Bogor	Edukasi	Meningkatkan kesadaran terkait Sanitasi
2	Verifikasi dan Edukasi ODF	2023	Dinas Kesehatan	Kampanye dan Sosialisasi BABS	Masyarakat Kota Bogor	Edukasi	Meningkatkan kesadaran terkait Sanitasi
3	Sosialisasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana SPALD	2022	Disrumkim	Memberikan pemahaman teknis kepada warga terkait cara penggunaan & pemeliharaan sarana pengelolaan air limbah domestik yang dibangun pemerintah	Warga Penerima Manfaat Sarana SPALD	Pemeliharaan sarana sanitasi	Menjaga keberlanjutan fungsi sarana
4	Penyuluhan Kawasan Bebas BABS di Permukiman	2023	Disrumkim	Mengajak warga untuk tidak buang air besar sembarangan dan memanfaatkan sarana sanitasi yang tersedia	Masyarakat di kawasan permukiman padat	Stop BABS	Meningkatkan kesadaran sanitasi di lingkungan padat penduduk
5	Sosialisasi Hasil Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	2024	Dinas Kesehatan	Memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higiene serta perilaku masyarakat baik dari sisi fasilitas atau sarana sanitasi maupun dari segi perilaku dalam bersanitasi	Masyarakat Kota Bogor	Inventarisasi Data dan Informasi	Peningkatan kualitas kesehatan melalui Penyediaan layanan Sanitasi
6	Presentasi Proyek dan inovasi Sanitasi Berkelanjutan	2025	DPMPTSP Prov Jawa Barat	Mendorong investasi pada bidang sanitasi	Forum Publik WJIS	Investasi	Peningkatan kualitas kesehatan melalui Penyediaan layanan Sanitasi

1.2.5 Pengelolaan Sampah

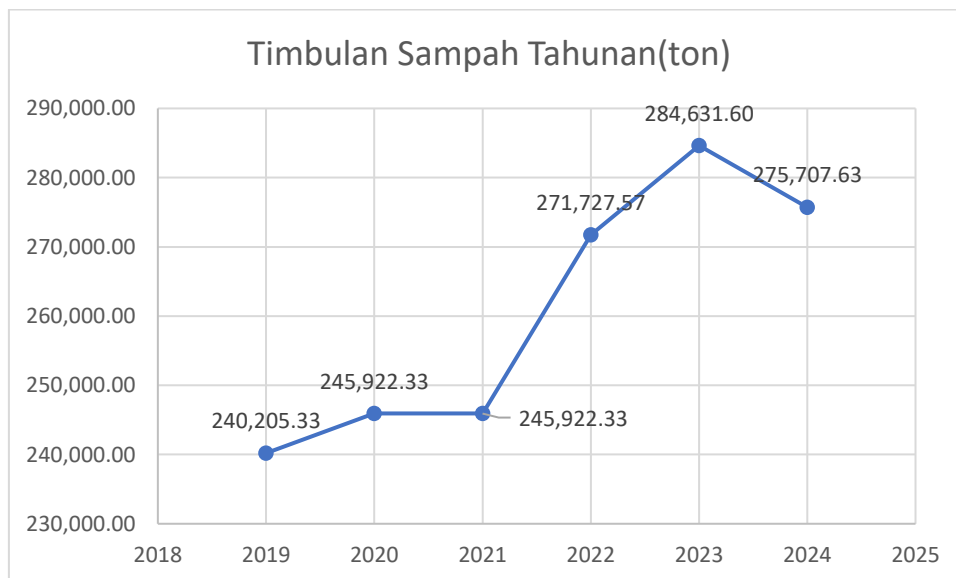
Pada sub-subbab ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga aspek utama terkait pengelolaan persampahan di Kota Bogor. Pertama, dijelaskan berbagai sistem dan infrastruktur yang menjadi penopang layanan pengelolaan sampah, mulai dari metode pengumpulan, pengangkutan hingga fasilitasi pengolahan yang telah diterapkan. Kedua, diuraikan mengenai kelembagaan serta kebijakan dan regulasi yang berperan sebagai fondasi hukum dan pengaturan pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah kota dan daerah. Ketiga, pembahasan mencakup peran penting komunikasi dan media dalam membantu proses sosialisasi, edukasi publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

(1) Sistem dan Infrastruktur

Produksi sampah di Kota Bogor didominasi oleh sumber rumah tangga dan fasilitas umum. Seiring pertumbuhan penduduk, volume sampah turut meningkat. Permasalahan ini menjadi isu nasional karena berdampak langsung pada lingkungan, sosial dan budaya, serta menimbulkan kerugian jika tidak dikelola secara terpadu.

A) Timbulan Sampah

Berdasarkan data dari SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah harian pada tahun 2024 sebesar 755,36 ton atau timbulan sampah tahunan 275.707,63 ton.

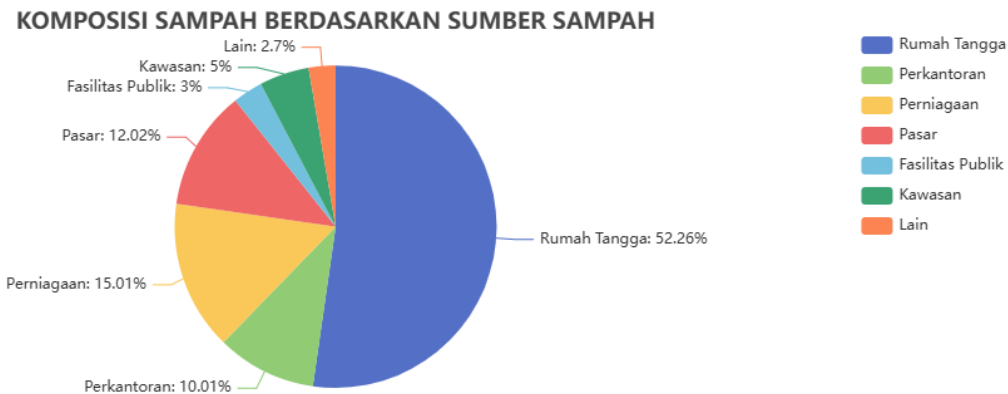


Gambar 2.1 Timbulan Sampah Tahunan

Sumber : sipsn.menlhk.go.id

B) Sumber Sampah

Dilihat dari sumber sampah, penghasil terbanyak sampah di Kota Bogor pada tahun 2024 adalah rumah tangga sebesar 52.26%.

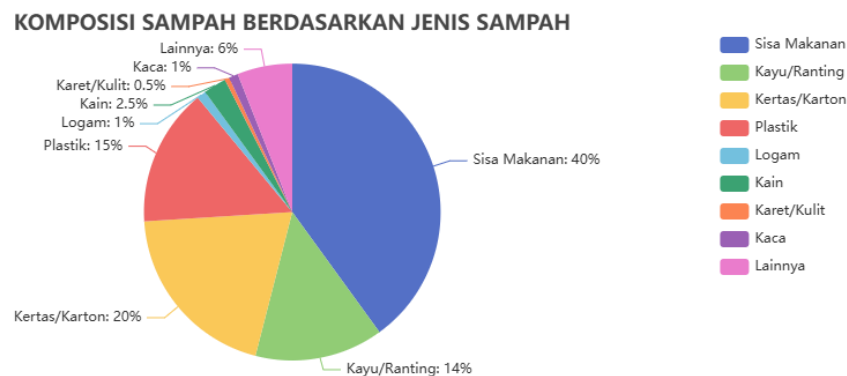


Gambar 2. 27 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kota Bogor

Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

C) Komposisi Sampah

Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor pada tahun 2024 terdiri dari sampah organik berupa sisa makanan, daun dan organik lainnya serta dari sampah anorganik berupa plastik, kertas, logam, karet dan kulit, kain, kaca, dan anorganik lainnya. Timbulan sampah terbanyak adalah sisa makanan 40%.



Gambar 2. 28 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Kota Bogor

Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

Tahap Pewadahan dan Pengumpulan

Pewadahan merupakan metode untuk menampung sampah sementara di lokasi sumbernya, sementara pengumpulan sampah melibatkan proses pengambilan sampah dari sumber-sumber tersebut untuk kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna dilakukan pengolahan lanjutan.

Tabel 2. 19 Capaian Akses Layanan Sampah

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting Hasil Instrumen SSK
1	Layanan Pengumpulan Sampah	97.5%
2	Sampah Terolah	3.9%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Berdasarkan perhitungan instrument SSK dari tabel diatas, terlihat bahwa cakupan layanan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini, sebanyak 97.5% sampah telah terlayani melalui pengumpulan sampah, yang mencakup pengangkutan dari sumber ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA). Namun demikian, sampah yang telah benar-benar terolah baik melalui proses daur ulang, composting maupun metode pengolahan lainnya baru mencapai 3.9%. hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengumpulan sudah berjalan dengan baik, pengolahan akhir sampah masih sangat terbatas dan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Tabel 2. 20 Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	Ton/hari	913

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Berdasarkan data dari perhitungan instrument SSK 2025, timbulan sampah rumah tangga diperkirakan mencapai 913 ton/hari. Namun berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, jumlah timbulan sampah tercatat lebih rendah yaitu sebesar 755,36 ton/hari. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metode perhitungan dan cakupan data antara kedua sumber.

a. Pemilahan/Pewadahan

Pewadahan yang dilakukan di Kota Bogor pada permukiman penduduk menggunakan pewadahan milik masyarakat yang terdiri dari berbagai macam. Pewadahan di permukiman penduduk dengan menggunakan tong sampah ataupun tempat sampah tertutup lainnya. Beberapa dokumentasi kondisi pewadahan sampah di Kota Bogor ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 29 Pewadahan Sampah Skala Rumah Tangga

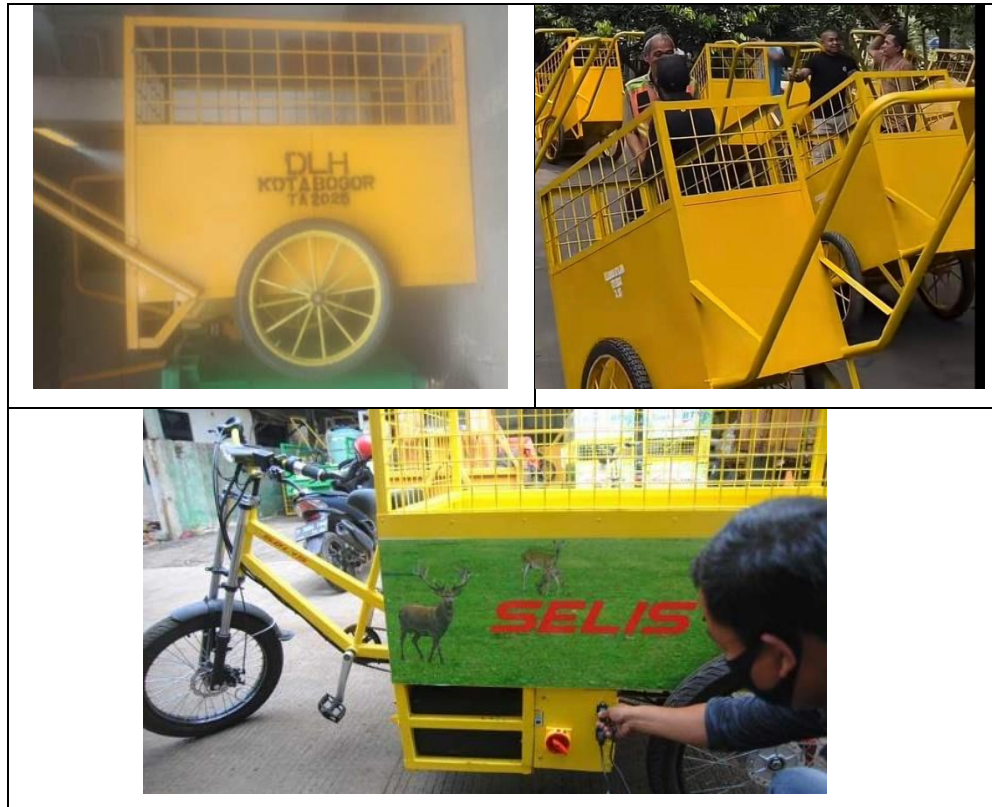
b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat baik bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dilakukan pengumpulan dan disetor ke TPS ataupun secara mandiri langsung membuang sampah ke TPS.

Tabel 2. 21 Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Infrastruktur	Jumlah (unit)	Beroperasi (unit)	Tidak Beroperasi (unit)	Kapasitas Desain/Unit (m ³)	Ritasi/hari
1	Gerobak	154	154	0	1.5	2.00
2	Gerobak Motor	45	32	13	2	2.00
3	Pick Up	34	24	10	4	1.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar 2. 30 Sarana Pengumpulan

c. Pengangkutan

Kota Bogor memiliki 733 TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang seluruhnya beroperasi dengan kapasitas rata-rata 1m³/unit. Selain itu tersedia 106 kontainer, dengan 90 unit beroperasi dan 14 unit tidak beroperasi, berkapasitas 6 m³/unit. Untuk tong sampah beroda, jumlahnya mencapai 211 unit, di mana 158 beroperasi dan 53 tidak beroperasi, dengan kapasitas 0,12 m³/unit. Sementara itu, fasilitas transfer depo belum tersedia di Kota Bogor.

Dalam hal pengangkutan persampahan, tersedia armada sebanyak 137 unit, terdiri dari 35 arm roll truck (33 beroperasi, 2 tidak beroperasi), 99 dump truck (92 beroperasi, 7 tidak beroperasi), serta 3 compactor truck yang seluruhnya beroperasi. Kapasitas angkut armada ini rata-rata 6 m³/unit, dengan frekuensi pengangkutan mencapai 1-2 ritasi per hari, menunjukkan adanya sistem pengangkutan rutin yang mendukung mobilisasi sampah dari TPS menuju fasilitas pengolahan atau tempat pemrosesan akhir.

Tabel 2. 22 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

Penampungan Sementara						
No	Infrastruktur	Jumlah (unit)	Beroperasi (unit)	Tidak Beroperasi (Unit)	Kapasitas Desain/Unit (m³)	
1	Transfer depo	0	0		0	
2	TPS	733	733		1	
3	Kontainer	106	90	14	6	
4	Tong Sampah beroda	211	158	53	0.12	
Pengangkutan Persampahan						
No	Infrastruktur	Jumlah (unit)	Beroperasi (unit)	Tidak Beroperasi (Unit)	Kapasitas Desain/Unit (m³)	Ritasi/hari
1	Arm roll truck	35	33	2	6	2.00
3	Dump Truk	99	92	7	6	1.00
5	Compactor Truk	3	3	0	6	2.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar 2. 31 Sarana Pengangkutan

d. Pengolahan

Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, upaya pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) telah dilaksanakan melalui keberadaan 122 bank sampah, namun hingga saat ini yang masih aktif dan terdata berjumlah 103 unit bank sampah. Selain itu, 36 unit Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dimana 4 unit diantaranya tidak aktif. Di sektor informal, tercatat sebanyak 3 unit yang terdata dalam SIPSN. Sementara itu, hingga 2024 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum tersedia di Kota Bogor.

Dalam pengolahan sampah di Kota Bogor, Bank Sampah sangat berperan penting mengingat mampu mengelola sampah sebanyak 2,294 ton per hari. Selain itu, tempat pengolahan sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau TPS 3R mengelola sekitar 21,09 ton sampah per hari, dimana hasil pengolahannya dibagi menjadi beberapa produk seperti pakan ternak/maggot sebanyak 2,1 ton, kompos sebanyak 5,5 ton, bahan baku daur ulang sebanyak 6,1 ton, bahan baku upcycle 3 ton, dan biogas/biodigester sebesar 0,4 ton per hari. Peran masyarakat dalam mengurangi sampah juga signifikan dengan kontribusi pengurangan sampah sebesar 186,286 ton per hari melalui berbagai kegiatan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas. (*Sumber : Neraca Pengelolaan Sampah Kota Bogor, 2024*)

Tabel 2. 23 Sub Sistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
1	TPS 3R Ceremai	2014	-	1.4448	0.5563	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	61%	371
2	TPS 3R Mutiara Bogor Raya	2011	-	1.4708	0.8421	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	43%	378
3	TPS 3R Tunas	2015	-	1.2140	0.6052	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	50%	312
4	TPS 3R Asri Bubulak (GWK)	2015	-	0.1864	0.0320	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	83%	48
5	TPS 3R Griya Melati	2017	-	0.3345	0.1141	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	66%	86
6	TPS3R Rusunawa Menteng	2011	-	0.1589	0.0482	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	70%	41
7	TPS 3R Ciparigi I	2011	-	1.1348	0.5995	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	47%	291
8	TPS 3R Ciparigi II	2015	-	0.9714	0.4998	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	49%	250
9	TPS 3R Anugrah Tanah Baru	2015	-	0.3808	0.1154	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	70%	98
10	TPS3R Rusunawa II Tanah Baru	2019	-	1.1545	0.3478	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	70%	297
11	TPS 3R Taruna Kompos Mulyaharja	2011	-	0.9632	0.0235	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	98%	247
12	TPS 3R Citra Mandiri Kertamaya	2011	-	0.9830	0.1942	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	80%	253
13	TPS 3R Benteng Hijau Lawanggantung	2013	-	0.5656	0.2728	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	52%	146
14	TPS 3R Waste To Energi Ranggamekar	2015	-	0.9789	0.6146	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	37%	252
15	TPS 3R Bumi Kencana Permai / BKP	2015	-	0.3233	0.1190	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	63%	83
16	TPS 3R Bhakti Warghana	2015	-	1.2716	1.1237	Kompos	Bangunan Baik	Tidak Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	12%	327

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
17	TPS 3R Dharmais / Kencana	2013	-	0.4466	0.2128	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	52%	115
18	TPS 3R Mutiara Kayumanis I	2012	-	0.7240	0.2667	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	63%	186
19	TPS 3R Kayumanis II Sumurwangi	2015	-	1.0620	0.7340	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	31%	273
20	TPS 3R Umul Kuro / Cibadak	2012	-	0.2823	0.1239	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	56%	73
21	TPS 3R Kembang Setaman / BCC	2016	-	1.0842	0.2249	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	79%	279
22	TPS 3R Tulip / Kayumanis III	2019	-	0.4517	0.1746	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	61%	116
23	TPS 3R Taman Sari Persada / Cibadak	2019	-	0.4477	0.1088	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	76%	115
24	TPS 3R Griya Katulampa	2011	-	0.9241	0.1240	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	87%	237
25	TPS 3R TPS 3R Melati (Warban 5)	2021	-	0.3128	0.0703	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	78%	81
26	TPS 3R Gerbang Mulia Berseri (bojongkerta)	2022	-	0.2610	0.0747	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	71%	67
27	TPS 3R Mekar Mandiri	2022	-	0.6598	0.2424	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	63%	170
28	TPS 3R MRF Waste Management Center	-	-	0.2153	0.2153	Kompos	Bangunan Baik	Tidak Beroperasi	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	0%	56
29	TPS 3R Sentral Kompos	2018	-	0.9632	0.7306	Kompos	Bangunan Baik	Tidak Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	24%	247
30	TPS 3R Kantor DLH Paledang Kota Bogor	2015	-	0.2887	0.2516	Kompos	Bangunan Baik	Tidak Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	13%	75
31	TPS 3R Bumi Indraprasta	2015	-	2.2400	1.1200	Kompos	Bangunan Baik	Kurang Optimal	Seksi	Belum Diproses	Subsidi APBD	50%	575
32	TPS 3R	-	-	0.7308	0.5313	Kompos	Bangunan	Tidak	Seksi	Belum	Subsidi	27%	188

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
	Bantarkemang						Baik	Optimal		Diproses	APBD		
33	BSU Prima Lestari	-	-	0.0135	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
34	BSU Cinling	-	-	0.0030	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
35	BSU Kelor Menteng	-	-	0.0079	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
36	BSU DWP Balaikota	-	-	0.0110	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
37	BSU Seroja	-	-	0.0260	0.00000005	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
38	BSU Liberpi	-	-	0.0088	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
39	BSU IPB Loji	-	-	0.0121	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
40	BSU Rumah Lestari	-	-	0.0099	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
41	BSU Saung Braja	-	-	0.0041	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
42	BSU Bougenvile	-	-	0.0127	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
43	BSU Nusa Indah 05	-	-	0.0061	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
44	Bank Sampah BSU Abinaya	-	-	0.0121	0.00000014	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
45	Bank Sampah BSU Guberma	-	-	0.0089	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
46	Bank Sampah BSU SBR	-	-	0.0006	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
47	Bank Sampah BSU Sahaja 01	-	-	0.0088	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
48	Bank Sampah BSU Jeruk	-	-	0.0143	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
49	Bank Sampah BSU Nissya	-	-	0.0096	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
50	BSU BCC Charnwood	-	-	0.0162	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
51	BSU Blok cluster Cimanggu Permai 1	-	-	0.0131	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
52	Bank Sampah BSU Mutiara	-	-	0.0119	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
53	BSS SMP Taruna Andhiga	-	-	0.0026	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
54	BSU Bersih Istiqomah	-	-	0.0600	0.00257753	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	96%	16
55	BSU Saung Ngariung	-	-	0.0106	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
56	BSU Cendana Selakopi	-	-	0.0079	0.00000030	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
57	Bank Sampah BSU Curhat	-	-	0.0072	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
58	Bank Sampah BSU Flamboyan	-	-	0.0060	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
59	BSU Kelor Salapan	-	-	0.0062	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
60	BSU Gemilang Batu Tulis	-	-	0.0133	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
61	BSU Ceria Kayumanis	-	-	0.0013	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
62	BSU Bougenville 12	-	-	0.0158	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
63	Bank Sampah BSU Buncis	-	-	0.0047	0.00000030	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
64	Bank Sampah BSU Dewi Padi	-	-	0.0133	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
65	BSU Cahaya	-	-	0.0233	0.00000005	Kompos	Bangunan	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum	Iuran	100%	6

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
	Limbah						Baik			Diproses	Masyarakat		
66	BSU Sedap Malam	-	-	0.0107	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
67	Bank Sampah BSU BSI 5	-	-	0.0246	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
68	BSU Kelor Sempur	-	-	0.0164	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
69	BSU Baskom Grika	-	-	0.0081	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
70	BSU Yasmin Sehati	-	-	0.0279	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8
71	Bank Sampah BSU Raja 007	-	-	0.0230	0.00000003	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
72	Bank Sampah BSU Sasarengan	-	-	0.0068	0.00000022	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
73	Bank Sampah BSU Anggrek 1	-	-	0.0129	0.00000022	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
74	Bank Sampah BSU Pilar Sempur	-	-	0.0102	0.00000005	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
75	Bank Sampah BSU Pelangi	-	-	0.0215	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
76	Bank Sampah BSU Anggrek 2	-	-	0.0094	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
77	BSU Villa Gunung Mas	-	-	0.0095	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
78	Bank Sampah BSU Intan	-	-	0.0145	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
79	Bank Sampah BSU Anggrek 3	-	-	0.0095	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
80	BSU Cendana Selakopi Tengah	-	-	0.0048	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
81	Bank Sampah BSU Dam 14	-	-	0.0062	0.00000003	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
82	BSU Syariah Griya Kencana	-	-	0.0119	0.00000044	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
83	BSU Kebon Kalapa	-	-	0.0037	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
84	Bank BSS SMA DAAR EN NISA	-	-	0.0035	0.00000022	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
85	BSU Anggrek Resik	-	-	0.0084	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
86	BSU Sejahtera KBB	-	-	0.0250	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
87	Bank Sampah Ceria Sempur	-	-	0.0223	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
88	Bank Sampah Mandiri Loji	-	-	0.0103	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
89	Bank Sampah Baitusaallam	-	-	0.0166	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
90	Bank Sampah BSS YPHB	-	-	0.0034	0.00000088	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
91	Bank Sampah BSU Pilar 1	-	-	0.0148	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
92	Bank Sampah Kel. Ciwaringin	-	-	0.0047	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
93	Bank Sampah Baskom Paledang	-	-	0.0087	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
94	Bank Sampah Srikandi	-	-	0.0074	0.00028340	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	96%	2
95	Bank Sampah Baskomm	-	-	0.0108	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
96	Bank Sampah BSS SMP NURAIDA	-	-	0.0189	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
97	Bank Sampah Mawar Kencana	-	-	0.0239	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
98	BS Bersenyawa	-	-	0.0087	0.00000000	Kompos	Bangunan	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum	Iuran	100%	3

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
	Pusdikzi						Baik			Diproses	Masyarakat		
99	Bank Sampah Barokah	-	-	0.0076	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
100	Bank Sampah BSU Senyawa	-	-	0.0084	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
101	Bank Sampah BSU Clink	-	-	0.0117	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
102	Bank Sampah Beriman Pusdikzi	-	-	0.0097	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
103	Bank Sampah Cendana BLI	-	-	0.0208	0.00000022	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	6
104	Bank Sampah Sakura Tegallega	-	-	0.0164	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
105	Bank Sampah Al Ghazaly	-	-	0.0021	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
106	Bank Sampah Cilukba Pusdikzi	-	-	0.0117	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
107	Bank Sampah Cendana Loji	-	-	0.0103	0.00000030	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
108	Bank Sampah Sagara	-	-	0.0061	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
109	Bank Sampah Marllin	-	-	0.0083	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
110	BS Basa Kuat Pusdikzi	-	-	0.0127	0.00000263	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
111	BS Cendana cimanggu	-	-	0.0100	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
112	BS Panggugah Rancamaya	-	-	0.0117	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
113	Bank Sampah Azalea	-	-	0.0118	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
114	Bank Sampah Pelita Pusdikzi	-	-	0.0102	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
115	Bank Sampah Barokah Selakopi	-	-	0.0137	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
116	BS Gemilang Rancamaya	-	-	0.0112	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
117	BS Situ Bagar/ FARMING BHAGAR	-	-	0.0102	0.00000022	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
118	Bank Sampah Dahlia Ciluar	-	-	0.0102	0.00000296	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
119	Bank Sampah Cendana Al Baru	-	-	0.0116	0.00000038	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
120	BS Gemilang Tegal Gundil	-	-	0.0113	0.00000005	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
121	Bank Sampah ENDAH HEGAR	-	-	0.0131	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
122	Bank Sampah Sagara Bertuah	-	-	0.0065	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
123	Bank Sampah Kenanga Malabar	-	-	0.0511	0.00000197	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	14
124	Bank Sampah Basket	-	-	0.0159	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
125	Bank Sampah Mandiri Sejahtera	-	-	0.0102	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
126	Bank Sampah SEMANGKA	-	-	0.0114	0.00279715	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	76%	3
127	Bank Sampah U Kenari	-	-	0.0139	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
128	Bank Sampah BSU Beberengkes	-	-	0.0082	0.00000014	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
129	BSU Gunung Batu Lestari	-	-	0.0029	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
130	BSU BCC Ngariung Warga	-	-	0.0106	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
131	Bank Sampah	-	-	0.0212	0.00000022	Kompos	Bangunan	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum	Iuran	100%	6

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
	BSU BUCEROS						Baik			Diproses	Masyarakat		
132	Bank Sampah BSU Tajur Agung	-	-	0.0105	0.00206649	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	80%	3
133	BSU Sindara Berkah	-	-	0.0194	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	5
134	Bank Sampah BSU Soka	-	-	0.0084	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
135	BSU Dahlia Pamoyanan	-	-	0.0063	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
136	Bank Sampah BSU Ganitri	-	-	0.0077	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
137	BS Puskesmas Bogor Tengah	-	-	0.0039	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
138	BSU Lestari Liberpi	-	-	0.0185	0.00019748	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	99%	5
139	Bank Sampah BSU RS Ummi	-	-	0.0069	0.00000019	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
140	Bank Sampah BSU Beriman	-	-	0.0131	0.00000003	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	4
141	BSU Istiqomah Ciwaringin	-	-	0.0076	0.00000030	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
142	BS Puskesmas Bogor selatan	-	-	0.0034	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
143	BSU Sepedaku Pusdikzi	-	-	0.0089	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
144	Bank Sampah BSU Maraca cafe	-	-	0.0051	0.00000027	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
145	Bank Sampah BSU Bertasbih	-	-	0.0103	0.00000005	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
146	BSU Kecamatan Bogor Timur	-	-	0.0039	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
147	Bank Sampah Salam Aid	-	-	0.0115	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

No	Jenis Infrastruktur	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika dilakukan)	Jumlah Sampah Masuk (Ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/hari)	Produk Pengolahan	Kondisi Bangunan	Status Operasional	Pengelola	Serah Terima Asset	Dana Operasional	Presentase Sampah yang Berhasil Diolah	Estimasi Jumlah RT Terlayani dari Jumlah Sampah Masuk (RT)
148	Bank Sampah BSU Forsip	-	-	0.0264	0.00000016	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	7
149	Bank Sampah BSU Kutilang	-	-	0.0084	0.00000011	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
150	Bank Sampah BSU Macodes	-	-	0.0307	0.00000030	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	8
151	Bank Sampah BSU Grika	-	-	0.0071	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	2
152	Bank Sampah SD Tunas Pertiwi	-	-	0.0007	0.00000000	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	1
153	BSU Rangka Mekar	-	-	0.0113	0.00000014	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3
154	Bank Sampah BSU Paud Melati	-	-	0.0088	0.00000033	Kompos	Bangunan Baik	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Belum Diproses	Iuran Masyarakat	100%	3

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

e. Pemrosesan Akhir

Terdapat 1 Tempat Pemrosesan Akhir Sementara (TPAS) di Galuga yang berlokasi di Kampung Lalamping, Kabupaten Bogor dan melayani wilayah Kota Bogor. TPA ini dibangun tahun 1990 dan dioptimalkan tahun 2002. Menggunakan sistem *controlled landfill*, lahan efektif yang tersedia mencapai 38,7 ha dengan usia operasionalnya saat ini telah mencapai 23 tahun.

TPA ini masih beroperasi dengan kegiatan pemadatan dan penimbangan sampah yang dilakukan rutin. Tersedia alat berat seperti *bulldozer* sebanyak 4 unit, *excavator* 3 unit, *backhoe* 1 unit, serta *loader* 1 unit (dalam kondisi rusak). Kapasitas desain awal sebesar 500 ton/hari, sedangkan kapasitas operasional saat ini mencapai 770,81 ton/hari, dengan volume sampah masuk mencapai 1.100 ton/hari. Seluruh sampah saat ini masih ditimbun dan hingga saat ini tinggi timbunan mencapai 15 meter.

Berdasarkan *review masterplan* persampahan Kota Bogor, pengelolaan TPA Galuga dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang semula tertuang dalam perjanjian hingga 24 Juli 2011. Perjanjian tersebut diperpanjang melalui Surat Perjanjian Nomor 658.1/2/PRJN/KS/2011 dan 658.1/Perj.199-DKP/2011 tertanggal 16 Juni 2011, berlaku selama 4 tahun 6 bulan (25 Juli 2011–31 Desember 2015). Perpanjangan kerja sama ini terus dilakukan sembari menunggu kesiapan operasional TPST Regional Nambo sebagai solusi pengelolaan jangka panjang.

Tabel 2. 24 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah

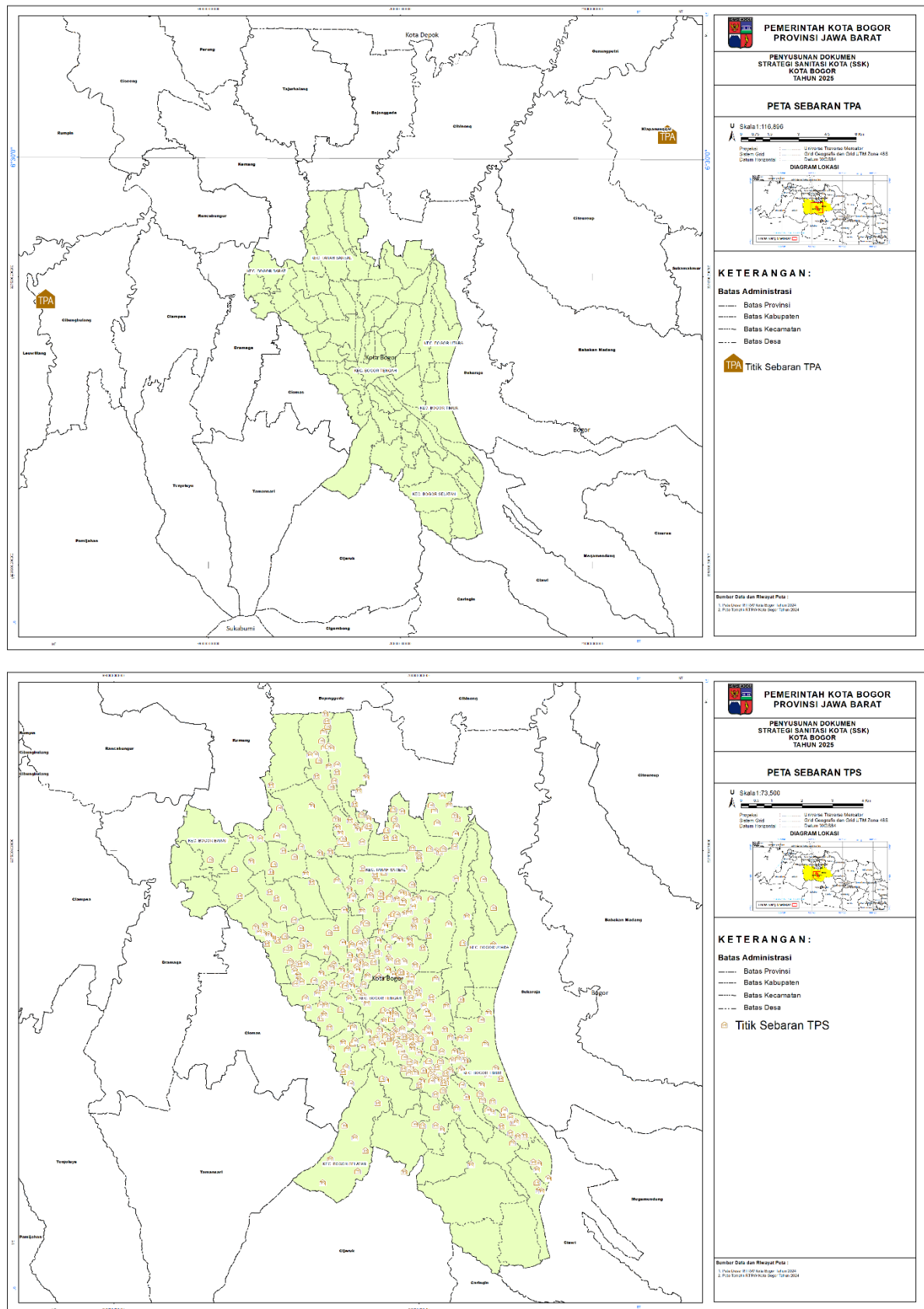
No	Deskripsi	TPA	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	TPA Galuga	TPPAS Lulut Nambo
	Wilayah Pelayanan	Kota Bogor	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan
2	Tahun pembangunan	1990	2024
	Tahun Optimalisasi	2002	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	23	1
3	Status aset (pilih salah satu)	Sudah	Sudah
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	38.7 Ha	55 Ha
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	7.8 Ha	40 Ha
6	Sistem TPA yang digunakan	Controlled Landfill	Sanitary Landfill
	Periode penutupan sampah		
	Apakah dilakukan pemadatan sampah	Dilakukan	Dilakukan
	Apakah dilakukan penimbangan dan pencatatan sampah masuk	Dilakukan	Dilakukan
7	Kondisi TPA	Beroperasi	Beroperasi
8	Alat berat: <i>bulldozer</i> , <i>excavator</i> , <i>backhoe</i>	Bulldozer: 4 ; Excavator 3; Backhoe Loader 1(rusak)	Bulldozer: 1 ; Excavator : 5
9	Ketersediaan jembatan timbang	1 Unit	1 Unit
10	Kondisi jalan akses masuk	Beton	Perkerasan
11	Kapasitas desain	500 Ton/hari	50 Ton/hari

No	Deskripsi	TPA	TPA
12	Kapasitas operasional	800 Ton/hari	10 Ton/hari
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kota Bogor	771.81 Ton/hari	0.08 Ton/hari
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA dari seluruh wilayah layanan	1100 Ton/hari	10 Ton/hari
13	Jumlah sampah yang didaur ulang di TPA	0 Ton/hari	0.02 Ton/hari
14	Recovery gas metan	0.03 Gg/hari	
15	Listrik	0.06 Gwh/hari	
16	Pemeriksaan Effluent Lindi	Dilakukan	Dilakukan
17	Jarak terdekat dengan area permukiman	1 km	0
18	Tinggi timbunan sampah eksisting	15 meter	0
19	Hari operasi	365 hari/tahun	0
20	Jenis TPA	Regional	Regional

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar 2. 32 Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir



Gambar 2. 33 Peta Cakupan Layanan Persampahan

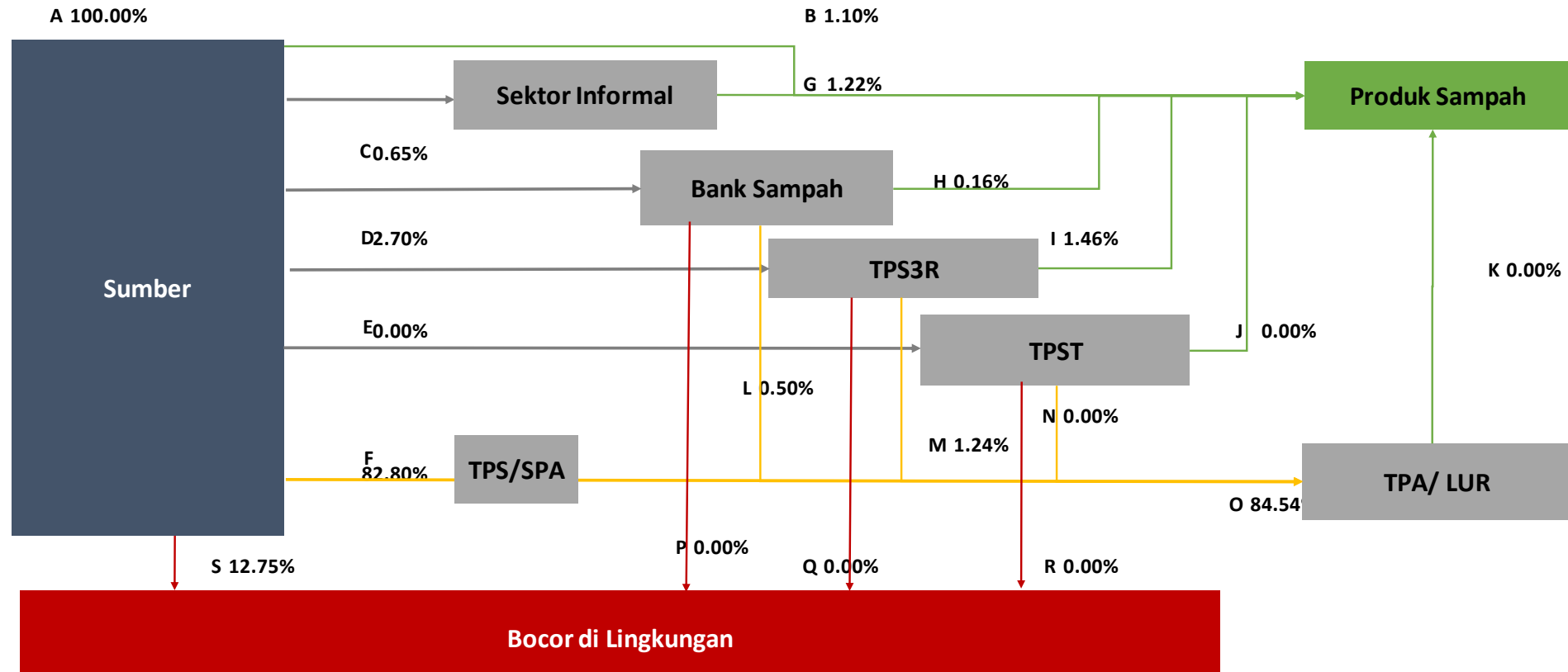
Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan berdasarkan target RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Tabel II.26, capaian layanan pengumpulan sampah di Kota Bogor sudah sangat baik, melebihi target nasional, provinsi maupun target jangka pendek yang ditetapkan. Namun, untuk kategori sampah terolah, capaian tahun 2024 masih jauh dari target, sehingga perlu upaya signifikan agar target 2029 bisa tercapai. Sementara itu, residu sampah yang masuk ke lahan urukan masih sangat tinggi dibandingkan target yang ada, sehingga pengurangan residu tetap menjadi tantangan utama Kota Bogor kedepan.

Tabel 2. 25 Analisis GAP Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2024-2029

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029	Target - 2029		Target Jangka Pendek	Capaian Tahun 2024	GAP Terhadap Target 2029	GAP Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor				
1	Layanan Pengumpulan Sampah	85%	100%	100%	94.3%	97.5%	2.5%	-
2	Sampah Terolah	38%	37%	41.1%	26.1%	3.9%	37.2%	22.2%
	Sampah terolah					2.1%		
	Sampah terdaur ulang					1.9%		
3	Residu di LUR	47%	63%	58.9%	68.2%	84.5%	-25.7%	-16.4%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025



		ton/hari	Persentase (%)
A	Total Timbunan sampah	913	100.00%
B	Sampah diolah di sumber	10.00	1.10%
C	Sampah dikumpul ke Bank Sampah	5.95	0.65%
D	Sampah dikumpul ke TPS3R	24.63	2.70%
E	Sampah dikumpul ke TPST	0.00	0.00%
F	Sampah dari sumber diangkut ke TPA/LUR	756.00	82.80%
G	Sampah didaur ulang oleh Sektor informal	11.10	1.22%
H	Sampah didaur ulang di bank sampah	1.42	0.16%
I	Sampah didaur ulang & diolah di TPS3R	13.32	1.46%
J	Sampah didaur ulang & diolah di TPST	0.00	0.00%

		ton/hari	Persentase (%)
K	Sampah diolah di TPA	0.02	0.00%
L	Residu dari bank sampah	4.56	0.50%
M	Residu dari TPS3R	11.32	1.24%
N	Residu dari TPST	0.00	0.00%
O	Total residu yang masuk ke TPA/LUR	771.89	84.54%
P	Sampah bocor dari Bank Sampah		
Q	Sampah bocor dari TPS3R		
R	Sampah bocor dari TPST		
S	Sampah bocor di sumber	116.45	12,75%

Gambar 2. 34 Rantai Layanan Persampahan Kota Bogor

Rantai layanan sanitasi dalam pengelolaan persampahan menjadi titik penting yang menggambarkan tingkat akses dan cakupan layanan pengelolaan sampah di Kota Bogor saat ini, dengan menggunakan instrument alat bantu SSK sebagai referensi.

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

Keterlibatan berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui sejumlah perangkat daerah memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Dinas Lingkungan Hidup memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir

1) Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam upaya mengembangkan dan mengelola sanitasi, khususnya air limbah domestik dan pengelolaan sampah, keterlibatan perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting. Masing-masing pihak menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program sanitasi.

Daftar perangkat daerah berikut ini menyajikan gambaran peran strategis setiap instansi yang terlibat dalam mendukung sistem sanitasi terintegrasi di Kota Bogor antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak, Diskomunikasi dan Informatika dan Bapperida. Setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi dalam pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan.

Terkait fungsi persampahan, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor secara resmi tidak termasuk sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan teknis sampah, namun memiliki peran pendukung yang sangat strategis di sisi administratif dan data. Perumda Tirta Pakuan bertanggung jawab dalam integrasi data pelanggan air minum yang juga menjadi dasar pemungutan retribusi persampahan. Melalui peran ini, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor membantu kelancaran sistem retribusi dan pelaporan pengelolaan persampahan secara menyeluruh, sehingga mendukung tata kelola yang lebih transparan dan efektif.

dengan demikian, keterlibatan perangkat daerah serta pemangku kepentingan di Kota Bogor membentuk sinergi penting dalam mewujudkan pelayanan sanitasi terintegrasi. Peran teknis di lapangan yang dijalankan oleh dinas terkait dan peran administratif serta pengelolaan data yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan, bersama dukungan lintas sektor lainnya, berkontribusi secara kolektif demi tercapainya target sanitasi yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat Kota Bogor. Berikut ini merupakan peran dari setiap pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Bogor.

Tabel 2. 26 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Persampahan

Fungsi	Pemangku Kepentingan Persampahan		
	Pemerintah Kota Bogor	Swasta	Masyarakat
Perencanaan	Bapperida, DLH		
Pengadaan Sarana	DLH	✓	✓
Pengelolaan	DLH	✓	✓

Fungsi	Pemangku Kepentingan Persampahan		
	Pemerintah Kota Bogor	Swasta	Masyarakat
Pengaturan dan Pembinaan	DLH, Dinkes		
Monitoring dan Evaluasi	Bapperida, DLH		

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 27 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Regulator, perencana, pengembangan penelitian atau riset sekaligus monitoring dan evaluasi program
Dinas Lingkungan Hidup	Regulator sekaligus pelaksana layanan persampahan perkotaan termasuk didalamnya pelaksana monitoring dan evaluasi dampak pencemaran lingkungan
Dinas Kesehatan	Promotor, edukator dalam perubahan perilaku masyarakat
Kewilayahan	Promotor, edukator dan fasilitator dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah di wilayah

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 28 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD	PD dan sebagainya
Perencanaan			
Menyusun Target Pengelolaan Persampahan skala kota	Bapperida, DLH		
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bapperida, DLH		
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bapperida, DLH		
Pengadaan Sarana			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	DLH	UPTD Persampahan	
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	DLH	UPTD Persampahan	
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	DLH	UPTD Persampahan	
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	DLH		
Membangun sarana TPA	DLH, Disrumkim		
Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dan lain-lain)	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Pengelolaan			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Mengelola sampah di TPS	DLH	UPTD Persampahan	
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	DLH	UPTD Persampahan	
Mengelola TPA	DLH	UPTD Persampahan	
Melakukan pemilahan sampah	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan

Fungsi	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD	PD dan sebagainya
Melakukan penarikan retribusi sampah	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan, Perumda Tirta Pakuan
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	DLH		
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH		
Pengaturan dan Pembinaan			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	DLH, Dinkes	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	DLH		
Monitoring dan Evaluasi			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota	Bapperida, DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	DLH	UPTD Persampahan	Kewilayahan

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

2) Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara optimal hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha/CSR/swasta, LSM, serta actor-aktor lainnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, terutama melalui keberadaan bank sampah. Selain itu, pengurangan sampah juga dilakukan di lingkungan pendidikan melalui program Sekolah Adiwiyata. Rincian pengelolaan bank sampah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 29 Data Lembaga Pengelola Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

NO	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan		Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status
1	Bank Sampah	BSU Prima Lestari	2020	KSM	02/BA/LHKRW07/01/2020	58	Persampahan	Pasir Kuda	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
2	Bank Sampah	BSU Cinling		KSM		-	Persampahan	Cinling	Iuran Masyarakat	Timbangan	
3	Bank Sampah	BSU Kelor Menteng		KSM		-	Persampahan	Kelor Menteng	Iuran Masyarakat	Timbangan	
4	Bank Sampah	BSU DWP Balaikota		KSM		-	Persampahan	Balaikota	Iuran Masyarakat	Timbangan	
5	Bank Sampah	BSU Seroja		KSM		10	Persampahan	Seroja	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
6	Bank Sampah	BSU Liberpi		KSM		-	Persampahan	Bantarjati	Iuran Masyarakat	Timbangan	
7	Bank Sampah	BSU IPB Loji	2018	KSM	660/36/blb-Tahun 2020	15	Persampahan	Loji	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
8	Bank Sampah	BSU Rumah Lestari		KSM		-	Persampahan	Gunung Batu	Iuran Masyarakat	Timbangan	
9	Bank Sampah	BSU Saung Braja		KSM		-	Persampahan	Bsu Saung Braja	Iuran Masyarakat	Timbangan	
10	Bank Sampah	BSU Bougenvile	2018	KSM		15	Persampahan	Kayumanis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
11	Bank Sampah	BSU Nusa Indah 05		KSM		-	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	
12	Bank Sampah	BSU Abinaya		KSM		-	Persampahan	Sukaraja	Iuran Masyarakat	Timbangan	
13	Bank Sampah	BSU Guberma	2021	KSM	149/17/KCN/IV/2021	45	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
14	Bank Sampah	BSU SBR		KSM		-	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	
15	Bank Sampah	BSU Sahaja 01		KSM		-	Persampahan	Sahaja	Iuran Masyarakat	Timbangan	
16	Bank Sampah	BSU Jeruk		KSM		-	Persampahan	Cipaku	Iuran Masyarakat	Timbangan	
17	Bank Sampah	BSU Nissya	2021	KSM	149/16/KCN/III/2021	80	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
18	Bank Sampah	BSU BCC Charnwood	2019	KSM		24	Persampahan	Mekarwangi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
19	Bank Sampah	BSU Blok cluster Cimanggu Permai 1		KSM		-	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	
20	Bank Sampah	BSU Mutiara		KSM		-	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	
21	Bank Sampah	BSS SMP Taruna Andhiga	2020	KSM	011/421.3/A.VIII/2020	-	Persampahan	Panaragan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
22	Bank Sampah	BSU Bersih Istiqomah	2019	KSM	600/44-tahun 2019	100	Persampahan	Kedung Jaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
23	Bank Sampah	BSU Saung Ngariung		KSM		-	Persampahan	Bantarjati	Iuran Masyarakat	Timbangan	
24	Bank Sampah	BSU Cendana Selakopi		KSM		-	Persampahan	Pasir Mulya	Iuran Masyarakat	Timbangan	
25	Bank Sampah	BSU Curhat	2020	KSM	660/59-Sos	-	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
26	Bank Sampah	BSU Flamboyan	2019	KSM		20	Persampahan	Kayumanis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

NO	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan		Jumlah anggota/	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status
27	Bank Sampah	BSU Kelor Salapan		KSM		-	Persampahan	Bondongan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
28	Bank Sampah	BSU Gemilang Batu Tulis		KSM		-	Persampahan	Batutulis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
29	Bank Sampah	BSU Ceria Kayumanis	2019	KSM		10	Persampahan	Kayumanis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
30	Bank Sampah	BSU Bougenville 12	2022	KSM		15	Persampahan	Kayumanis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
31	Bank Sampah	BSU Buncis		KSM		-	Persampahan	Bsu Buncis	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
32	Bank Sampah	BSU Dewi Padi	2020	KSM	658.1/04-Tahun 2020	-	Persampahan	Sindang Sari	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
33	Bank Sampah	BSU Cahaya Limbah		KSM		-	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
34	Bank Sampah	BSU Sedap Malam	2021	KSM	520/131-SDR	10	Persampahan	Sindang Rasa	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
35	Bank Sampah	BSU BSI 5	2020	KSM	Skep/01/RW05/II/2020	50	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
36	Bank Sampah	BSU Kelor Sempur		KSM		-	Persampahan	Sempur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
37	Bank Sampah	BSU Baskom Grika	2019	KSM	460/30-KTL	50	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
38	Bank Sampah	BSU Yasmin Sehati		KSM		11	Persampahan	Cilendek Timur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
39	Bank Sampah	BSU Raja 007		KSM		-	Persampahan	Curugmekar	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
40	Bank Sampah	BSU Sasarengan	2021	KSM	660/023-Tahun 2021	30	Persampahan	Genteng	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
41	Bank Sampah	BSU Anggrek 1	2018	KSM	658.1/032.PMY Tahun 2018	43	Persampahan	Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
42	Bank Sampah	BSU Pilar Sempur		KSM		-	Persampahan	Sempur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
43	Bank Sampah	BSU Pelangi	2019	KSM	149/05/Kcn/I/2020	74	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
44	Bank Sampah	BSU Anggrek 2	2018	KSM	658.1/032.PMY Tahun 2018	25	Persampahan	Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
45	Bank Sampah	BSU Villa Gunung Mas		KSM		-	Persampahan	Perwira	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
46	Bank Sampah	BSU Intan	2021	KSM	600/21/TNS/IX/2021	11	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
47	Bank Sampah	BSU Anggrek 3	2019	KSM	658.1/032.PMY Tahun 2018	20	Persampahan	Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
48	Bank Sampah	BSU Cendana Selakopi Tengah		KSM		-	Persampahan	Pasir Jaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	
49	Bank Sampah	BSU Dam 14		KSM		-	Persampahan	Dam 14	Iuran Masyarakat	Timbangan	
50	Bank Sampah	Syariah Griya Kencana	2021	KSM		10	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
51	Bank Sampah	BSU Kebon Kalapa		KSM		-	Persampahan	Kebon Kelapa	Iuran Masyarakat	Timbangan	
52	Bank Sampah	BSS SMA DAAR EN NISA		KSM		-	Persampahan	Kedungbadak	Iuran Masyarakat	Timbangan	
53	Bank Sampah	BSU Anggrek Resik	2021	KSM		35	Persampahan	Mekarwangi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
54	Bank Sampah	BSU Sejahtera KBB	2017	KSM	148/11-ked B	204	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
55	Bank Sampah	BSU Ceria Sempur		KSM		-	Persampahan	Sempur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

NO	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan		Jumlah anggota/	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status
56	Bank Sampah	BSU Mandiri Loji	2018	KSM	660/36/blb-Tahun 2020	15	Persampahan	Loji	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
57	Bank Sampah	BSU Baitusaallam	2017	KSM		250	Persampahan	Curug	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
58	Bank Sampah	BSS YPHB		KSM		-	Persampahan	Kedung Badak	Iuran Masyarakat	Timbangan	
59	Bank Sampah	BSU Pilar 1		KSM		-	Persampahan	Pilar 1	Iuran Masyarakat	Timbangan	
60	Bank Sampah	BSU Kelurahan Ciwaringin		KSM		-	Persampahan	Ciwaringin	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
61	Bank Sampah	BSU Baskom Paledang	2018	KSM	600/31-PNG/2021	20	Persampahan	Paledang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
62	Bank Sampah	BSU Srikandi		KSM		-	Persampahan	Bantarjati	Iuran Masyarakat	Timbangan	
63	Bank Sampah	BSU Baskomm		KSM		-	Persampahan	Paledang	Iuran Masyarakat	Timbangan	
64	Bank Sampah	BSS SMP NURAI DA		KSM		-	Persampahan	Cimahpar	Iuran Masyarakat	Timbangan	
65	Bank Sampah	BSU Mawar Kencana		KSM		-	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	
66	Bank Sampah	BSU Bersenyawa Pusdikzi		KSM		-	Persampahan	Bersenyawa Pusdikzi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
67	Bank Sampah	BSU Barokah	2016	KSM	600/ / TNS/VIII/2016	60	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
68	Bank Sampah	BSU Senyawa		KSM		-	Persampahan		Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
69	Bank Sampah	BSU Clink		KSM		-	Persampahan	Babakan	Iuran Masyarakat	Timbangan	
70	Bank Sampah	BSU Beriman Pusdikzi	2019	KSM	149/27-Tahun 2019	50	Persampahan	Ciparigi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
71	Bank Sampah	BSU Cendana BLI		KSM		-	Persampahan	Pasir Jaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
72	Bank Sampah	BSU Sakura Tegallega		KSM		-	Persampahan	Tegallega	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
73	Bank Sampah	BSU Al Ghazaly		KSM		-	Persampahan	Kencana	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
74	Bank Sampah	BSU Cilukba Pusdikzi		KSM		-	Persampahan		Iuran Masyarakat	Timbangan	
75	Bank Sampah	BSU Cendana Loji	2018	KSM	03 Tahun 2018	47	Persampahan	Loji	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
76	Bank Sampah	BSU Sagara		KSM		-	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
77	Bank Sampah	BSU Marllin	2021	KSM	423/01-pem	-	Persampahan	Tajur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
78	Bank Sampah	BSU Basa Kuat Pusdikzi		KSM		-	Persampahan	Pabaton	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
79	Bank Sampah	BSU Cendana cimanggu	2018	KSM	04 Tahun 208	23	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
80	Bank Sampah	BSU Panggugah Rancamaya		KSM		-	Persampahan	Kedunghalang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
81	Bank Sampah	BSU Azalea		KSM		-	Persampahan	Azalea	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
82	Bank Sampah	BSU Pelita Pusdikzi		KSM		-	Persampahan	Pelita Pusdikzi	Iuran Masyarakat	Timbangan	
83	Bank Sampah	BSU Barokah Selakopi	2019	KSM	147-45/51 Tahun 2019	25	Persampahan	Pasir Mulya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
84	Bank Sampah	BSU Gemilang Rancamaya		KSM		-	Persampahan	Rancamaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA BOGOR

NO	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status	
85	Bank Sampah	BSU Situ Bagar/Farming Bhagar		KSM		-	Persampahan	Bubulak	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
86	Bank Sampah	BSU Dahlia Ciluar	2018	KSM	658.1/044-PMY Tahun 2018	10	Persampahan	Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
87	Bank Sampah	BSU Cendana Al Baru	2019	KSM	01 TAHUN 2019	-	Persampahan	Tanah Baru	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
88	Bank Sampah	BSU Gemilang Tegal Gundil		KSM		-	Persampahan	Tegal Gundil	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
89	Bank Sampah	BSU ENDAH HEGAR		KSM		-	Persampahan	Ciparigi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
90	Bank Sampah	BSU Sagara Bertuah		KSM		-	Persampahan	Sagara Bertuah	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
91	Bank Sampah	BSU Kenanga Malabar	2018	KSM	660.2/219-Bbk/2018	60	Persampahan	Babakan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
92	Bank Sampah	BSU Basket	2018	KSM	660/10/110-TJR/2019	35	Persampahan	Tajur	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
93	Bank Sampah	BSU Mandiri Sejahtera		KSM		-	Persampahan	Tanah Sareal	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
94	Bank Sampah	BSU SEMANGKA		KSM		-	Persampahan	Kedung Halang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
95	Bank Sampah	BSU Kenari		KSM		-	Persampahan	Kedung Waringin	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
96	Bank Sampah	BSU Beberengkes	2018	KSM		-	Persampahan	Baranangsiang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
97	Bank Sampah	BSU Gunung Batu Lestari	2019	KSM	440/72-GNB Tahun 2019	62	Persampahan	Gunung Batu	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
98	Bank Sampah	BSU BCC Ngariung Warga		KSM		-	Persampahan	Mekarwangi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
99	Bank Sampah	BSU BUCEROS		KSM		-	Persampahan	Sejahtera	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
100	Bank Sampah	BSU Tajur Agung		KSM		-	Persampahan	Kedungbadak	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
101	Bank Sampah	BSU Sindara Berkah	2017	KSM	145/47-Tahun 2017	50	Persampahan	Gunung Batu	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
102	Bank Sampah	BSU Soka	2020	KSM	658.1/30-CKRT/2019	20	Persampahan	Bondongan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
103	Bank Sampah	BSU Dahlia Pamoyanan	2018	KSM	658.1/044-PMY Tahun 2018	10	Persampahan	Pamoyanan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
104	Bank Sampah	BSU Ganitri		KSM		-	Persampahan	Kedunghalang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
105	Bank Sampah	Puskesmas Bogor Tengah		KSM		-	Persampahan	Bogor Tengah	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
106	Bank Sampah	BSU Lestari Liberpi		KSM		-	Persampahan	Baranangsiang	Iuran Masyarakat	Timbangan	
107	Bank Sampah	BSU RS Ummi	2018	KSM		36	Persampahan	Empang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
108	Bank Sampah	BSU Beriman	2019	KSM	149/27-Tahun 2019	50	Persampahan	Ciparigi	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
109	Bank Sampah	BSU Istiqomah Ciwaringin		KSM		-	Persampahan	Kedung Jaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
110	Bank Sampah	Puskesmas Bogor selatan		KSM		-	Persampahan	Bogor Selatan	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
111	Bank Sampah	BSU Sepedaku Pusdikzi		KSM		-	Persampahan	Sepedaku Pusdikzi	Iuran Masyarakat	Timbangan	
112	Bank Sampah	BSU Maraca cafe	2018	KSM		-	Persampahan	Sempur	Iuran Masyarakat	Timbangan	
113	Bank Sampah	BSU Bertasbih	2019	KSM		15	Persampahan	Kedunghalang	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif

NO	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok	Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber	Status
114	Bank Sampah	BSU Kecamatan Bogor Timur		KSM	-	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	
115	Bank Sampah	Salam Aid		KSM	-	Persampahan	Sogiri	Iuran Masyarakat	Timbangan	
116	Bank Sampah	BSU Forsip		KSM	10	Persampahan	Margajaya	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
117	Bank Sampah	BSU Kutilang	2019	KSM	65	Persampahan	Kedung Badak	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
118	Bank Sampah	BSU Macodes	2019	KSM	460/23-kdw	Persampahan	Kedung Waringin	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
119	Bank Sampah	BSU Grika		KSM	-	Persampahan	Katulampa	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
120	Bank Sampah	SD Tunas Pertiwi		KSM	-	Persampahan	Sukaraja	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
121	Bank Sampah	BSU Rangga Mekar		KSM	-	Persampahan	Ranggamekar	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif
122	Bank Sampah	BSU Paud Melati	2001	KSM	400/02-CRG	Persampahan	Curug Mekar	Iuran Masyarakat	Timbangan	Aktif

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

3) Kelembagaan Non Pemerintah

Dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kota Bogor terdapat pemetaan kelembagaan non-pemerintah yang menjalankan fungsi dan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah
Pengusaha / Swasta: STT Telkom IPB	- Melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) - Mendapatkan reputasi dan penghargaan lingkungan	- Bantuan fasilitas atau sarana prasarana - Bantuan teknis (pembinaan dan pelatihan)
Organisasi Massa (Ormas): Baznas Kota Bogor	Peningkatan kualitas hidup dan sarana prasarana lingkungan dan sanitasi	- Penyediaan SDM dalam pengolahan persampahan - Penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengelolaan persampahan - Sosialisasi dan pengaruh perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pengelolaan persampahan - Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - KSM TPS 3R - Bank Sampah - Komunitas EcoFunopoly - Perpustakaan Sampah	- Kelompok Pemanfaat dan Pengelola infrastruktur (TPS 3R) - Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan sampah - Membantu Pengolahan Sampah sejak dari Sumber sampah - Peningkatan kualitas hidup dan sarana prasarana lingkungan	- Pengelolaan sampah secara mandiri - Menambah penggiat-penggiat sampah di lokasi lain - Sosialisasi dan pengaruh perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pengelolaan persampahan
Tokoh Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup dan sarana prasarana lingkungan sanitasi	Pengaruh terhadap perilaku hidup masyarakat

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 31 Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait persampahan dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Tinggi	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: - STT Telkom - IPB	Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan	Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Sedang	Sedang	Tidak
ORMAS Baznas	- Penyediaan lembaga atau pengelola dalam pengelolaan persampahan - Penyediaan fasilitas pengolahan persampahan	Fatwa MUI No 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Rendah	Sedang	Ya
Yayasan (BKM/ KSM/ LSM/ PKK/ Koperasi dll): - KSM TPS 3R - Bank Sampah - Komunitas EcoFunopoly - Perpustakaan Sampah	- Penyediaan fasilitas pengurangan dan pengolahan sampah - Kelompok Pemanfaat dan Pengelola infrastruktur - Berbagi informasi dan kegiatan terkait pengelolaan sampah - Sosialisasi dan pengaruh perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pengelolaan persampahan	PermenPU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarpras Persampahan RT dan Sejenis RT	Tinggi	Tinggi	Ya

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

4) Regulasi

Aspek regulasi daerah di Kota Bogor mengatur seluruh pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar lingkup pemerintah daerah. Pengaturan ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan persampahan secara kolaboratif dari berbagai pihak. Pengelolaan sampah di Kota Bogor secara umum telah tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan dan regulasi daerah, di antaranya:

- Dokumen RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045, yang mencantumkan arah kebijakan dan target capaian pelayanan pengelolaan persampahan jangka panjang.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur ketentuan mengenai pengurangan dan penanganan sampah, pelibatan masyarakat, dunia usaha, serta peran pemerintah daerah dalam sistem persampahan.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang turut mengatur retribusi jasa pelayanan persampahan. Tarif retribusi dibedakan berdasarkan klasifikasi objek dan daya listrik rumah tangga. Sebagai contoh, rumah tangga dengan daya listrik 5.500–6.600 VA dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000 per bulan, sedangkan rumah tangga dengan daya 450 VA dikenakan sebesar Rp 3.000 per bulan.
- Serta lainnya

Tabel 2. 32 Pemetaan Regulasi Daerah terkait Persampahan

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan		
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Ada	
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Ada	
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Ada	
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	Ada	
e	Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Ada	
f	Substansi pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	Ada	
g	Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Ada	
h	Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	Ada	
i	Substansi pengaturan: Pengawasan pengelolaan sampah	Ada	

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan		
j	Substansi pengaturan: Penerapan sanksi administratif	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?		Belum ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	a) Perwal Mengenai Pedoman Tanggap Darurat pengelolaan Sampah b) Perwal Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi c) Perwal mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah d) Perwal terkait pemberian Kompensasi e) Perwal terkait tata cara memperoleh izin f) Perwal terkait peran masyarakat di bidang pengelolaan sampah g) Perwal terkait tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah h) Perwal terkait pelayanan pengelolaan sampah untuk pelaku usaha i) Perwal terkait Ketentuan Penanganan Sampah j) Perwal terkait Ketentuan Pengurangan Sampah	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

(3) Komunikasi dan Media

Dalam upaya membangun sistem sanitasi yang efektif di Kota Bogor, komunikasi dan media menjadi elemen pendukung yang sangat vital. Melalui pendekatan komunikasi yang terencana dan pemanfaatan berbagai saluran media, pesan-pesan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih, pengelolaan air limbah domestik, serta pengelolaan sampah dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Peran media tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat edukasi dan penggerak perubahan perilaku. Dengan komunikasi yang tepat sasaran dan konsisten, diharapkan masyarakat semakin sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Berikut ini merupakan komunikasi dan jenis media yang digunakan dalam promosi pengelolaan sanitasi di Kota Bogor.

Tabel 2. 33 Jenis Media Promosi Dalam Sanitasi di Kota Bogor

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
1	Berita Online : Kompas.id , Liputan Bogor.com ,dll	Umum	APBD	Media Promosi PHBS dan sanitasi	PHBS dan Sanitasi	Cukup Efektif
2	Website: sanitasi.kotabogor.go.id	Umum	APBD	Media Promosi Kegiatan Sanitasi di Kota Bogor	Sanitasi	Cukup Efektif
3	Media Sosial Pemerintah Daerah Kota Bogor : Instagram, Tiktok dan Youtube	Umum	APBD	Media Promosi PHBS dan sanitasi	PHBS dan Sanitasi	Cukup Efektif
4	Media Sosial : WA Grup Edukasi pembinaan bank sampah dari Dinas	Masyarakat Umum, Anak	• Swadaya • APBD	Kampanye 3R, Pemilahan sampah dan kreativitas	Penerapan 3R melalui aksi nyata warga	Cukup Efektif

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
	Lingkungan Hidup dan Wilayah Kerja Puskesmas	Sekolah dan Guru Pendamping		daur ulang	dan siswa	

Sumber : Pelaksanaan FGD, 2025

Tabel 2. 34 Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi di Kota Bogor

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Festival Duta Sanitasi Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor	2018	Satker PLP Prov. Jawa Barat Bekerjasama dengan Dinas PUPR dan DLH Kota Bogor	Edukasi Sanitasi di Kota Bogor	Masyarakat di area Car Free Day	Edukasi peduli Sanitasi	Meningkatkan kesadaran terkait Sanitasi
2	Sosialisasi Germas dan Pemicuan STBM	2020	Dinas Kesehatan	Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan	Masyarakat Kota Bogor	Edukasi	Meningkatkan kesadaran terkait Sanitasi
3	Lomba Fashion Show Daur Ulang Tingkat Sekolah	2023	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kesadaran dan kreativitas siswa dalam mengelola sampah	Siswa Sekolah	Kreativitas dalam pengelolaan sampah	Edukasi 3R sejak usia dini
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan	Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengurangan sampah melalui prinsip 3R	Pengurus Bank Sampah dan Masyarakat Kota Bogor	Peran aktif warga dalam pengelolaan sampah	Kolaborasi komunitas dan pemerintah
5	Webinar Sanitasi dan PHBS Tingkat Kota	2022	Dinas Kesehatan	Edukasi PHBS dan pentingnya sanitasi aman	Masyarakat Kota Bogor dan Kader Kesehatan	Edukasi	Pemanfaatan media daring untuk edukasi

Sumber: Pokja PKP Kota Bogor, 2025

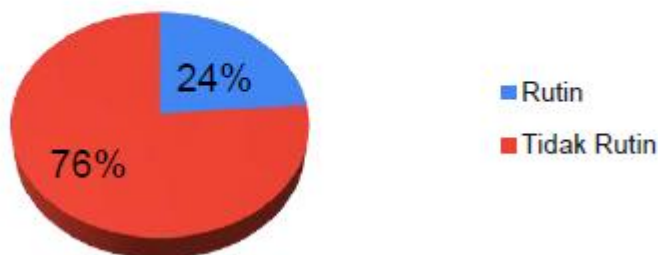
1.2.6 Drainase Lingkungan

Informasi mengenai kondisi eksisting drainase terutama banjir dan genangan air yang bisa menggambarkan tingkat efisiensi drainase berdasarkan hasil studi EHRA Kota Bogor tahun 2024. Informasi yang dibahas rumah tangga yang mengalami banjir, lama air menggenang ketika banjir, lokasi genangan di sekitar rumah. Kondisi drainase berdasarkan hasil studi EHRA sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir

Dari rumah tangga yang mengalami banjir, diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga tidak mengalami banjir rutin yaitu 76% dan 24% lainnya mengaku mengalami banjir secara rutin.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI BANJIR



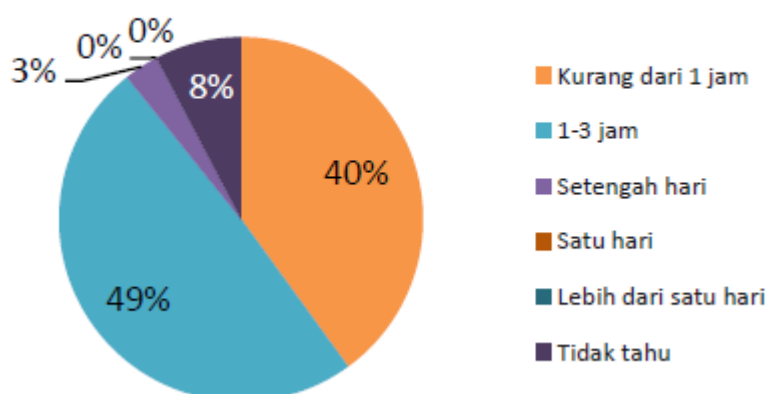
Sumber : Studi EHRA Kota Bogor Tahun 2024

Gambar 2. 35 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir

b. Lama Air Menggenang Ketika Banjir

Dari yang mengalami banjir berikut lama genangan terjadi diantaranya 49% genangan terjadi 1-3 jam, 40% menjawab genangan terjadi kurang dari 1 jam, 3% menjawab lama waktu genangan selama setengah hari dan sisanya tidak tahu.

LAMA AIR MENGGENANG KETIKA BANJIR



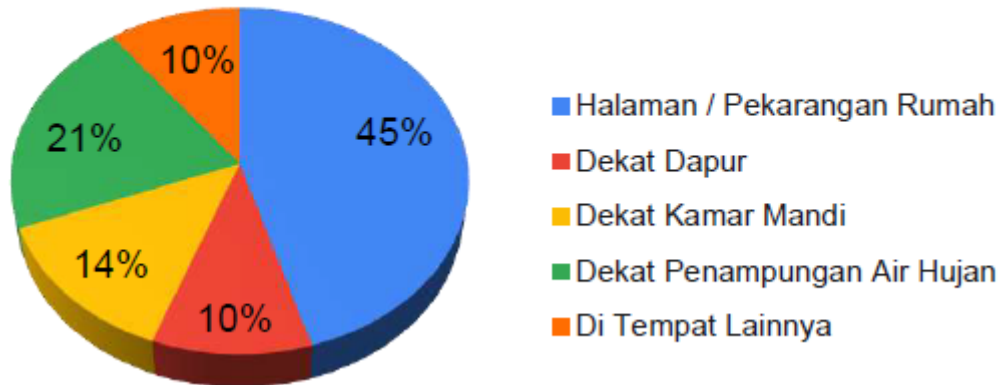
Sumber : Studi EHRA Kota Bogor Tahun 2024

Gambar 2. 36 Grafik Persentase Lama Air Menggenang Ketika Banjir

c. Lokasi Genangan Di Sekitar Rumah

Dari responden yang mengalami banjir, diketahui lokasi genangan terjadi sebagian besar di halaman/pekarangan rumah sebanyak 45%, berikutnya dekat penampungan air hujan, dekat kamar mandi, dekat dapur dan tempat lainnya.

LOKASI GENANGAN DI SEKITAR RUMAH



Sumber : Studi EHRA Kota Bogor Tahun 2024

Gambar 2. 37 Grafik Persentase Lokasi Genangan di Sekitar Rumah

(1) Sistem dan Infrastruktur

Drainase merupakan sistem saluran air, baik alami maupun buatan, yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan ke badan air seperti sungai. Dalam konteks sanitasi lingkungan, drainase memegang peran penting untuk mencegah genangan dan banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Sistem drainase juga kerap menjadi jalur pembuangan air limbah rumah tangga. Ketidakefisienan sistem ini dapat menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan.

Tabel 2. 35 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan (m ²)	Lama Genangan (Jam)	Tinggi Genangan (cm)
					X	Y			
TANAH SAREAL	CIBADAK	1	Cibadak	Rt. 03/Rw. 08	696,954.000	9,275,323.000	20.00	3-5	10.00
		2	Cibadak	Rt. 02/Rw. 11	697,013.000	9,275,604.000	12.00	3-5	10.00
		3	Cibadak	Lotte taman yasmin	696,239.000	9,277,220.000	120.00	3-5	10.00
		4	Cibadak	Rt. 05/Rw. 04	696,710.000	9,274,950.000	80.00		
	KAYU MANIS	5	Kayumanis	Rt. 01/Rw. 09	696,133.000	9,278,292.000	20.00	3-5	10.00
		6	Kayumanis	Rt. 03/Rw. 09	696,141.000	9,278,652.000	200.00	3-8	80.00
	KEBON PEDES	7	Kebon Pedes	Rt. 06/Rw. 09	698,772.000	9,273,774.000	80.00	2-3	10.00
		8	Kebon Pedes	Rt. 04/Rw. 10	698,844.000	9,273,944.000	120.00	2-3	10.00
		9	Kebon Pedes		699,008.000	9,273,872.000	60.00	2-3	20.00
	KEDUNG BADAK	10	Kedung Jaya	Rt. 01/Rw. 02	697,926.000	9,274,003.000	180.00	6-12	10.00
		11	Kedung Jaya	Rt. 04/Rw. 08	697,569.000	9,274,000.000	240.00	6-24	15.00
		12	Kedung Jaya		697,530.000	9,274,529.000	80.00	3-5	10.00
	KEDUNG WARINGIN	13	Kedung Waringin	Rt. 03/Rw. 08	696,852.000	9,274,325.000	60.00	2-3	10.00
		14	Kedung Waringin	Rt. 02/Rw. 04	696,716.000	9,274,658.000	20.00	2-3	10.00
		15	Kedung Waringin		696,781.000	9,274,040.000	80.00	3-5	20.00
	KENCANA	16	Kencana	Rt. 02/Rw. 04	697,501.000	9,278,190.000	480.00	3-24	10.00
		17	Kencana	Rt. 03/Rw. 03	697,513.000	9,277,768.000	20.00	2-3	10.00
	SUKA DAMAI	18	Suka Damai	Rt. 04/Rw. 01	697,954.000	9,275,413.000	60.00	2-3	10.00
		19	Suka Damai	Rt. 04/Rw. 09	697,485.000	9,275,425.000	40.00	2-3	10.00
		20	Suka Damai		697,427.000	9,275,684.000	50.00	2-3	15.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
	SUKA RESMI	21	Suka Resmi	Rt. 04/Rw. 04	698,491.000	9,275,302.000	12.00	3-5	15.00
		22	Suka Resmi	Rt. 01/Rw. 02	699,072.000	9,275,216.000	10.00	3-5	15.00
		23	Suka Resmi		699,437.000	9,275,230.000	40.00	3-5	20.00
	TANAH SAREAL	24	Tanah Sareal	Rt. 03/Rw. 05	699,421.000	9,273,718.000	80.00	2-3	10.00
		25	Tanah Sareal	Rt. 01/Rw. 03	699,487.000	9,273,253.000	100.00	2-3	10.00
		2	Sindangrasa 2	Rt. 03/Rw. 01	703,330.280	9,265,687.940	75.00	1-2	30.00
		3	Sindangrasa 3	Rt. 03/Rw. 02	703,068.430	9,265,637.260	100.00	1-2	20.00
		4	Sindangrasa 4	Rt. 01/Rw. 03	703,109.170	9,265,977.320	100.00	1-2	20.00
		5	Sindangrasa 5	Rt. 04/Rw. 08	702,972.110	9,266,115.080	100.00	1-2	20.00
	TAJUR	6	Tajur 1	Rt. 02/Rw. 01	701,254.490	9,267,342.900	100.00	1-2	20.00
		7	Tajur 2	Rt. 01/Rw. 06	701,976.530	9,266,255.800	80.00	1-2	15.00
		8	Tajur 3	Rt. 04/Rw. 05	701,823.310	9,266,452.120	100.00	1-2	20.00
	KATULAMPA	9	Katulampa 01	Rt. 12/Rw. 05	701,323.650	9,268,561.020	180.00	3-5	30.00
		10	Katulampa 02	Rt. 04/Rw. 01	701,897.000	9,267,470.000	200.00	3-5	30.00
	BERANANGSIANG	11	Beranangsiang 01	Rt. 07/Rw. 05	700,861.830	9,268,296.610	120.00	1-2	20.00
		12	Beranangsiang 02	Rt. 04/Rw. 11	700,361.440	9,269,462.170	80.00	2-3	40.00
		13	Beranangsiang 03	Rt. 03/Rw. 09	700,721.980	9,270,190.710	80.00	2-3	30.00
		2	Kedunghalang 2	Rt. 06/ Rw. 02	700,348.230	9,274,451.290	60.00	1-3	40.00
		3	Kedunghalang 3	Rt. 02/ Rw. 03	700,414.570	9,275,360.850	240.00	1-2	30.00
		4	Kedunghalang 4	Rt. 01/ Rw. 06	700,238.980	9,275,438.570	60.00	1-2	20.00
	CIMAHPAR	5	Cimahpar 1	Rt. 02/ Rw. 16	702,773.850	9,271,464.520	280.00	2-5	80.00
		6	Cimahpar 2	Rt. 04/ Rw. 05	702,245.320	9,271,502.400	160.00	1-2	100.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
	TANAH BARU	7	Tanahbaru 1	Rt. 04/ Rw. 01	701,615.761	9,275,447.298	420.00	2-4	150.00
		8	Tanahbaru 2	Rt. 06/ Rw. 09	701,555.011	9,275,166.261	300.00	4-6	150.00
		9	Tanahbaru 3	Rt. 03/ Rw. 05	701,047.316	9,271,269.651	250.00	2-4	50.00
	CILUAR	10	Ciluar 1	Rt. 07/ Rw. 07	702,165.179	9,274,906.451	200.00	1-2	40.00
	TEGAL GUNDIL	11	Tegalgundil 1	Rt. 04/ Rw. 08	700,288.839	9,272,770.269	180.00	1-2	80.00
		12	Tegalgundil 2	Rt. 04/ Rw. 08	700,251.020	9,272,618.550	200.00	1-2	100.00
	BANTARJATI	13	Bantarjati 1	Rt. 01/ Rw. 10	699,265.440	9,272,405.337	100.00	1-2	50.00
		14	Bantarjati 2	Rt. 02/ Rw. 10	699,283.233	9,272,524.168	80.00	3-5	50.00
		15	Bantarjati 3	Rt. 01/ Rw. 04	699,357.956	9,272,757.153	120.00	1-2	50.00
		16	Bantarjati 4	Rt. 05/ Rw. 02	699,828.539	9,273,176.841	150.00	3-5	50.00
	CIPARIGI	17	Ciparigi 1	Rt. 02/ Rw. 13	700,857.329	9,276,797.935	200.00	1-2	50.00
		18	Ciparigi 2	Rt. 01/ Rw. 06	700,815.912	9,275,499.194	220.00	2-3	40.00
	CIBULUH	19	Cibuluh 1	Rt. 04/ Rw. 01	701,582.000	9,275,764.000	300.00	2-3	80.00
		20	Cibuluh 2	rw05,08,03 kp. Kaumsari			500.00	5-10	200.00
BOGOR TENGAH	BABAKAN PASAR	1	Babakan Pasar 1	Rt. 01/Rw. 05	699,402.000	9,269,390.000	30.00	3-6	50.00
		2	Babakan Pasar 2	Rt. 02/Rw. 07	699,366.000	9,269,451.000	150.00		
	CIBOGOR	3	Cibogor 1	Rt. 01/Rw.04	698,186.000	9,271,472.000	160.00	1-2	30.00
		4	Cibogor 2	Rt. 02/Rw. 03	698,283.000	9,271,804.000	3,000.00	3-4	30.00
	CIWARINGIN	5	Ciwaringin 1	Rt. 05/Rw. 12	697,786.000	9,272,966.000	100.00	1-2	40.00
		6	Ciwaringin 2	Rt. 01/ Rw. 11	697,810.000	9,272,415.000	130.00	1-2	40.00
		7	Ciwaringin 3	Rt. 01/Rw. 11	697,958.000	9,272,055.000	200.00	1-2	20.00
		8	Ciwaringin 4	Rt. 01/Rw. 01-02	697,690.000	9,270,894.000	400.00	5-6	20.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
		9	Ciwaringin 5	Rt. 02/Rw. 02	697,711.000	9,271,030.000	400.00	3-4	20.00
	GUDANG	10	Gudang 1	Rt. 03/Rw. 09	698,867.000	9,269,401.000	50.00	1-2	30.00
		11	Gudang 2	Rt. 01/Rw. 03	699,253.000	9,269,179.000	100.00	3-6	20.00
	PALEDANG	12	Paledang 1	Rt. 01/Rw. 07	698,501.000	9,269,825.000	100.00	3-6	30.00
		13	Paledang 2	Rt. 05/Rw. 07	698,293.000	9,269,944.000	200.00	1-2	30.00
		14	Paledang 3	Rt. 03/Rw. 02	698,402.000	9,270,052.000	100.00	3-4	15.00
	PANARAGAN	15	Panaragan 1	Rt. 01/Rw.05	697,373.000	9,270,478.000	150.00	30-1	20.00
		16	Panaragan 2	Rt. 01/Rw.06	697,402.000	9,270,409.000	150.00	1-2	20.00
		17	Panaragan 3	Rt. 07/Rw. 03	697,693.000	9,270,602.000	200.00	30-1	
	TEGAL LEGA	18	Tegallega 1	Rt. 02/Rw. 01	700,689.000	9,270,723.000	100.00	3-6	30.00
		19	Tegallega 2	Rt. 01/Rw. 06	700,516.000	9,270,337.000	120.00	1-2	10.00
		20	Tegallega 3	Rt. 02/Rw. 06	700,455.000	9,270,123.000	110.00	3-6	30.00
		21	Tegallega 4	Rt. 02/Rw. 06	700,419.000	9,270,164.000	150.00	3-6	30.00
	SEMPUR	22	Sempur 1	Rt. 01/Rw. 01	699,160.000	9,271,080.000	150.00	1-2	20.00
		23	Sempur 2	Rt. 02/Rw. 04	698,788.000	9,271,354.000	120.00	1-2	30.00
		24	Sempur 3	Rt. 02-03/Rw. 01	698,851.000	9,272,022.000	500.00	1-2	30.00
	BABAKAN	25	Babakan 1	Rt. 09/Rw. 03	699,572.000	9,271,843.000	50.00	30-1	30.00
		26	Babakan 2	Rt. 09/Rw. 03	699,626.000	9,272,085.000	150.00	2-3	30.00
		27	Babakan 3	Rt. 05/Rw. 02	699,745.000	9,270,780.000	350.00	30-1	20.00
	PABATON	28	Pabaton 1	Rt. 01/Rw. 01			150.00	30-1	20.00
		29	Pabaton 2	Rt. 01/Rw. 01			100.00	30-1	25.00
		30	Pabaton 3	Rt.02/Rw. 01			100.00	1-2	25.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
BOGOR BARAT		31	Pabaton 4	Rt. 01/Rw. 02			250.00	1-2	25.00
	SITUGEDE	1	Situ Gede 01	RT 02 RW 08	692,749.000	9,274,589.000	80.00	1-2	50.00
		2	Situ Gede 02	RT 03 RW 02	692,558.000	9,274,555.000	100.00	2-3	30.00
		3	Situ Gede 03	RT 01 RW 04	692,268.000	9,274,715.000	200.00	2-3	20.00
	BUBULAK	4	Bubulak 01	RT 05 RW 04	692,280.000	9,274,892.000	600.00	3-4	10.00
		5	Bubulak 02	RT 02 RW 09	693,791.000	9,274,892.000	800.00	8-12	50.00
		6	Bubulak 03	RT 02 RW 12	693,664.000	9,273,510.000	200.00	2-4	50.00
		7	Bubulak 04	RT 03 RW 05	694,423.000	9,275,058.000	150.00	1-2	40.00
		8	Bubulak 05	RT 03 RW 07	694,361.000	9,275,086.000	200.00	1-2	60.00
		9	Bubulak 06	RW 08 RT 3 RT 02	693,860.000	9,274,419.000	80.00	1-2	30.00
		10	Bubulak 07	RT 04 RW 01	693,916.000	9,274,025.000	150.00	1-2	50.00
		11	Bubulak 08	RT 01 RT 02 RW 06	693,870.000	9,273,812.000	50.00	3-4	60.00
		12	Bubulak 09		694,122.000	9,273,753.000	50.00		
		13	Bubulak 10		693,635.000	9,273,915.000	120.00		
	CURUG	14	Curug 01	RT 02 RW 03	693,665.000	9,273,708.000	150.00	1-2	20.00
		15	Curug 02	RT 04 RW 02	696,079.000	9,272,759.000	200.00	2-3	40.00
		16	Curug 03	Jalan utama Kel.RW 02	695,997.000	9,272,636.000	400.00	1-2	80.00
		17	Curug 04	RT 03 RW 01	695,151.000	9,273,624.000	100.00	2-3	50.00
		18	Curug 05	RT 02 RW 05	695,225.000	9,272,928.000	600.00	1-3	50.00
	CURUG MEKAR	19	Curug Mekar 01	RT 01 RW 01	695,589.000	9,273,193.000	200.00	2-3	50.00
		20	Curug Mekar 02	RT 01 RW 02	695,210.000	9,273,428.000	350.00	1-3	30.00
		21	Curug Mekar 03	RT 05 RW 02 01	695,102.000	9,273,779.000	300.00	0.5	20.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
		22	Curug Mekar 04	RT 03 RW 06	695,992.000	9,272,950.000	280.00	1	30.00
		23	Curug Mekar 05	RT 04 RW 06	695,593.000	9,273,509.000	200.00	0.5	20.00
	SEMPLOK	24	Semplak 01	RT 02 RW 02	696,241.000	9,273,663.000	400.00	1-2	30.00
		25	Semplak 02	RT 01 RW 02	696,519.000	9,273,395.000	150.00	1-2	10.00
		26	Semplak 03	RT 01 RW 01	696,765.000	9,272,971.000	600.00	2-4	80.00
		27	Semplak 04	RT 04 RW 01	695,451.000	9,275,530.000	600.00	1-2	30.00
	CILENDEK BARAT	28	Cilendek Barat 01	RT 01 RW 18	695,424.000	9,275,449.000	600.00	1-2	80.00
		29	Cilendek Barat 02	RT 01 RW 12	695,459.000	9,275,378.000	400.00	2-3	50.00
		30	Cilendek Barat 03	RT 02 RW 10	695,232.000	9,275,386.000	400.00	1-2	20.00
		31	Cilendek Barat 04	RT 04 RW 04	695,521.000	9,275,899.000	600.00	1-2	30.00
		32	Cilendek Barat 05	RT 06 RW 10	695,632.000	9,274,237.000	400.00	.1-3	20.00
		33	Cilendek Barat 06	RT 02 RW 09	695,288.000	9,273,979.000	380.00	1-2	20.00
		34	Cilendek Barat 07	RT 01 RW 15	695,719.000	9,274,385.000	100.00	1	15.00
		35	Cilendek Barat 08	RT 04 RW 17	695,519.000	9,275,250.000	50.00	1-2	30.00
		36	Cilendek Barat 09	RT 03 RW 10	695,236.000	9,275,312.000	400.00	1-2	30.00
	CILENDEK TIMUR	37	Cilendek Timur 01	RW 09 DAN RW 11	696,618.000	9,270,747.000	2,000.00	1-2	80.00
		38	Cilendek Timur 02	RT 06 RW 11	696,355.000	9,270,983.000	200.00	2-3	50.00
		39	Cilendek Timur 03	RT 02 RW 10	695,056.000	9,272,007.000	200.00	.1-2	60.00
	MENTENG	40	Menteng 01	RW 19 Dan RW 20	695,608.000	9,271,350.000	600.00	.1-2	15.00
		41	Menteng 02	RT 01 RW 03	692,426.000	9,272,992.000	80.00	.1-2	20.00
		42	Menteng 03	RT 05 RW 03	692,493.000	9,273,412.000	200.00	0.5	20.00
	PASIR JAYA	43	Pasir Jaya 01	RT 01 RW 13	696,434.000	9,272,478.000	600.00	4-5	100.00

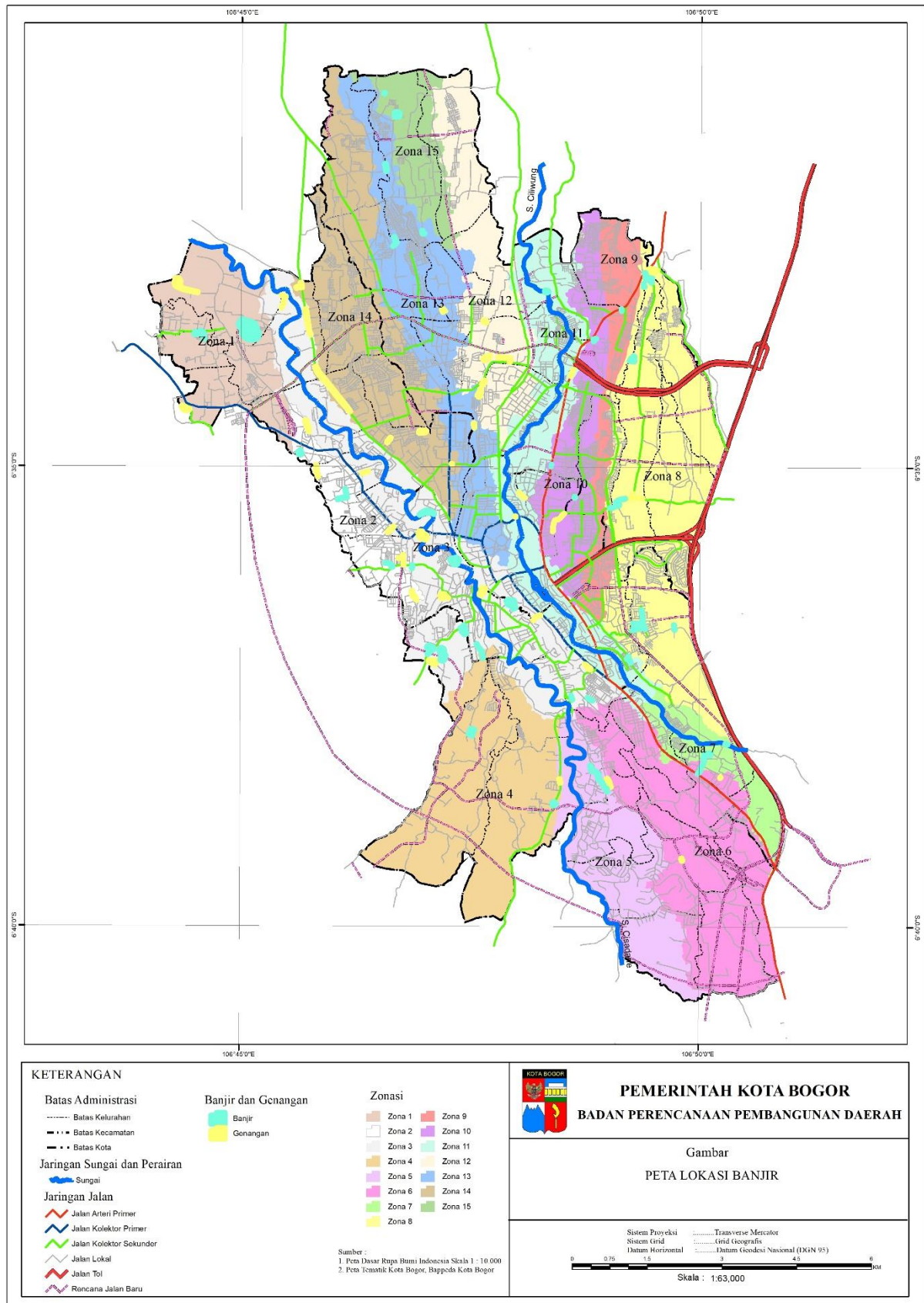
	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
	PASIR KUDA	44	Pasir Kuda 01	RT 02 RW 07	697,287.000	9,271,743.000	400.00	2-3	80.00
	PASIR MULYA	45	Pasir Mulya 01	RT 02 RW 03	697,242.000	9,271,614.000	400.00	2-3	40.00
		46	Pasir Mulya 02	RT 03 RW 02	697,920.000	9,268,742.000	400.00	2-3	50.00
		47	Pasir Mulya 03	RT 02 RW 05	697,513.000	9,269,327.000	800.00	1-2	40.00
	GUNUNG BATU	48	Gunung Batu 01	RT 03 RW 05	696,307.000	9,270,064.000	800.00	1-2	20.00
		49	Gunung Batu 02	RT 01 RW 07	696,201.000	9,269,939.000	1,200.00	1-2	20.00
	LOJI	50	Loji 01	RT 04 RW 08	696,368.000	9,270,591.000	800.00	2-3	100.00
		51	Loji 02	RT 03 RW 05	694,613.000	9,274,509.000	400.00	1-2	80.00
	SINDANG BARANG	52	Sindangbarang 01	RT 02 Dan 03 RW 05	694,815.000	9,274,389.000	400.00	1-3	50.00
	BALUMBANG JAYA	53	Balumbang jaya 01	RT 03 RW 03	695,268.000	9,273,937.000	600.00	1-2	30.00
		54	Balumbang jaya 02	RT 03 RW 04	694,912.000	9,274,469.000	800.00	1-2	30.00
		55	Balumbang jaya 03	RT 04 RW 04	694,919.000	9,272,442.000	800.00	1-2	30.00
		56	Balumbang jaya 04	RT 01 02 03	692,475.000	9,275,489.000	600.00	4-5	50.00
	MARGA JAYA	57	Marga jaya 01	RT 02 RW 05	693,186.000	9,274,711.000	600.00	1-2	100.00
		58	Marga jaya 02	RT 05 RW 02	693,116.000	9,275,067.000	100.00	1-3	
BOGOR SELATAN	BONDONGAN	1	Bondongan 1	Rt 01/Rw 014	699,911.000	9,268,044.000	100.00	3-4	30.00
		2	Bondongan 2	Rt 01/Rw 012	699,589.000	9,268,665.000	80.00	3-4	30.00
		3	Bondongan 3	Rt 01-02/Rw 02	699,649.000	9,268,763.000	150.00	2-3	60.00
		4	Bondongan 4	Rt 03/Rw 018	699,008.000	9,269,134.000	100.00	2-3	20.00
		5	Bondongan 5	Rt 02/Rw 16	699,487.000	9,268,698.000	50.00	2-3	30.00
		6	Bondongan 6	Rt 05/Rw 10	699,528.000	9,268,668.000	100.00	2-3	20.00
		7	Bondongan 7	Rt 03/Rw 07	699,306.000	9,268,854.000	20.00	2-3	30.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
	BATU TULIS	8	Batutulis 1	Rt 01/Rw 03	699,557.000	9,267,836.000	60.00	2-3	30.00
		9	Batutulis 2	Rt 04/Rw 05	700,140.000	9,267,991.000	60.00	2-3	30.00
		10	Batutulis 3	Rt 02/Rw 01	700,242.000	9,268,211.000	100.00	2-3	30.00
		11	Batutulis 4	Rt 06/Rw 06	700,278.000	9,267,934.000	50.00	2-3	30.00
	BOJONGKERTA	12	Bojongkerta 1	Rt 02/Rw 05	703,684.000	9,262,794.000	120.00	1-2	10.00
		13	Bojongkerta 2	Rt 04/Rw 05	703,786.000	9,262,971.000	80.00	2-4	60.00
		14	Bojongkerta 3	Rt 02/Rw 05	703,738.000	9,262,848.000	120.00	2-4	40.00
		15	Bojongkerta 4	Rt 01/Rw 05	703,633.000	9,262,611.000	180.00	1-2	20.00
		16	Bojongkerta 5	Rt 03/Rw 06	703,531.000	9,262,732.000	80.00	1-2	15.00
		17	Bojongkerta 6	Rt 06/Rw 02	703,393.000	9,262,137.000	60.00	1-2	20.00
		18	Bojongkerta 7	Rt 04/Rw 02	703,716.000	9,261,801.000	120.00	1-2	20.00
		19	Bojongkerta 8	Rt 03/Rw 02	703,585.000	9,261,744.000	50.00	1-2	10.00
		20	Bojongkerta 9	Rt 02/Rw 01	703,232.000	9,261,901.000	20.00	1-2	20.00
		21	Bojongkerta 10	Rt 03Rw 01	703,009.000	9,261,701.000	20.00	1-2	20.00
	CIKARET	22	Cikaret 1	Rt 02/Rw 05	697,285.000	9,268,270.000	230.00	3-5	30.00
		23	Cikaret 2	Rt 01/Rw 01	697,966.000	9,268,644.000	100.00	3-4	150.00
	CIPAKU	24	Cipaku 1	Rt 01/Rw 15	700,385.000	9,265,554.000	100.00	2-3	35.00
	GENTENG	25	Genteng 1	Rt 5,6,7	700,305.000	9,264,877.000	100.00	2-3	30.00
		26	Genteng 2	Rt 01/Rw 10	700,679.000	9,264,433.000	50.00	2-3	30.00
		27	Genteng 3	Rt 01/Rw 10	700,743.000	9,264,478.000	80.00	2-3	30.00
		28	Genteng 4	Rt 03/Rw 05	700,602.000	9,264,755.000	65.00	2-3	30.00
		29	Genteng 5	Rt 01/Rw 05	700,737.000	9,265,015.000	80.00	2-3	30.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
		30	Genteng 6	Rt 02/Rw 04	700,960.000	9,265,000.000	80.00	1-2	30.00
		31	Genteng 7	Rt 02/Rw 04	701,100.000	9,264,802.000	100.00	2-3	20.00
		32	Genteng 8	Rt 02/Rw 09	701,413.000	9,265,082.000	100.00	2-3	30.00
	HARJASARI	33	Harjasari 1	Rt 02/Rw 01	703,052.000	9,264,672.000	100.00	3-4	50.00
	KERTAMAYA	34	Kertamaya 1	Rt 01/Rw 04	702,325.000	9,264,632.000	200.00	1-2	20.00
		35	Kertamaya 2	Rt 01/Rw 04	702,401.000	9,264,504.000	100.00	1-2	20.00
		36	Kertamaya 3	Rt 02/Rw 04	702,483.000	9,264,357.000	50.00	2-3	30.00
		37	Kertamaya 4	Rt 03/Rw 03	700,868.000	9,262,838.000	100.00	1-2	30.00
		38	Kertamaya 5	Rt 02/Rw 03	700,854.000	9,262,968.000	100.00	1-2	20.00
	LAWANGGINTUNG	39	Leuwanggintung 1	Rt /01/Rw 02,03	696,681.000	9,270,456.000	50.00	2-3	20.00
		40	Leuwanggintung 2	Rt 01/Rw 07	700,550.000	9,267,019.000	50.00	.1-2	15.00
	MULYAHARJA	41	Mulyaharja 1	Rt 04/Rw 03	697,081.000	9,265,122.000	30.00	.1-2	15.00
		42	Mulyaharja 2	Rt 01/Rw 07	697,770.000	9,266,783.000	80.00	.1-2	60.00
		43	Mulyaharja 3	Rt 01Rw 07	697,808.000	9,266,864.000	60.00	.1-2	40.00
		44	Mulyaharja 4	Rt 01/Rw 08	698,223.000	9,267,336.000	120.00	.1-2	40.00
		45	Mulyaharja 5	Rt 03/Rw 06	698,236.000	9,267,205.000	60.00	.1-2	30.00
	PAKUAN	46	Pakuan 1	Rt 05/Rw 05	701,675.000	9,266,642.000	100.00	2-3	25.00
		47	Pakuan 2	Rt 01/Rw 06	701,879.000	9,266,248.000	100.00	1-2	20.00
		48	Pakuan 3	Rt 04/Rw 06	702,003.000	9,266,132.000	50.00	1-2	20.00
		49	Pakuan 4	Rt 04/Rw 06	702,348.000	9,265,618.000	100.00	1-2	20.00
		50	Pakuan 5	Rt 04/Rw 06	702,239.000	9,265,490.000	100.00	1-2	20.00
	PAMOYANAN	51	Pamoyanan 1	Rt 04/Rw 08	699,874.000	9,265,664.000	100.00	2-3	70.00

	Kelurahan	NO	Lokasi	Rt/Rw	Koordinat		Luas Genangan	Lama Genangan	Tinggi Genangan
		52	Pamoyanan 2	Rt 02/Rw 12	699,774.000	9,265,202.000	100.00	2-3	40.00
		53	Pamoyanan 3	Rt 01/Rw 10	699,497.000	9,266,245.000	100.00	2-3	30.00
		54	Pamoyanan 4	Rt 02/Rw 04	699,026.000	9,266,283.000	100.00	2-3	30.00
		55	Pamoyanan 5	Rt 01/Rw 05	698,887.000	9,266,284.000	100.00	2-3	20.00
	RANGGAMEKAR	56	Ranggamekar 1	Rt 03/Rw 04	698,905.000	9,267,535.000	50.00	1-2	20.00
		57	Ranggamekar 2	Rt 03/Rw 03	699,402.000	9,267,564.000	50.00	1-2	20.00
		58	Ranggamekar 3	Rt 01/Rw 13	699,342.000	9,267,701.000	100.00	1-2	20.00
	EMPANG	59	Empang 1	Rw 19	698,958.000	9,268,498.000	60.00	1-2	15.00
		60	Empang 2	Rt ,02,4,5,6/Rw 04	698,826.000	9,268,556.000	100.00	1-2	20.00
		61	Empang 3	Rt 07/Rw 014	698,834.000	9,268,612.000	100.00	1-2	20.00
	RANCAMAYA	62	Rancamaya	Rt 01/Rw 05	702,172.000	9,261,779.000	100.00	2-3	20.00

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2023



Sumber : Bapperida Kota Bogor

Gambar 2. 38 Peta Lokasi Banjir

Tabel 2. 36 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kota Bogor

No	Jenis Sarana / Prasarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar Dasar Saluran	Tinggi Saluran	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Saluran Primer A	m	Trapesium			✓		
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	unit		1	0,5	✓		
	- Pintu Air (Katulampa dan Tanah Baru)	unit		1	0,5	✓		
	- Kolam retensi	unit		1	2	✓		
	- Saringan sampah	unit				✓		
2	Saluran Primer B	m	Persegi			✓		
	Bangunan Pelengkap							
	Rumah Pompa	unit				✓		
	Pintu Air	unit				✓		
	Kolam retensi	unit				✓		
	Saringan sampah	unit				✓		



Gambar 2. 39 Drainase

(2) Kelembagaan Masyarakat/Swasta

Di Kota Bogor, peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan lingkungan telah berjalan cukup aktif, terutama melalui kegiatan gotong royong rutin serta partisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan di tingkat wilayah. Kegiatan berbasis komunitas ini juga didukung oleh program-program pembangunan berbasis masyarakat yang mendorong keterlibatan warga dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi, khususnya infrastruktur drainase, masih tergolong terbatas. Salah satu faktor utama adalah besarnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kolaborasi multipihak, agar ke depan pembangunan infrastruktur sanitasi di Kota Bogor dapat lebih berkelanjutan, efisien, dan melibatkan lebih banyak unsur non-pemerintah.

(3) Komunikasi dan Media

Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan isu drainase lingkungan di Kota Bogor mencakup media sosial pemerintah serta pemberitaan dari media local dan regional. Media-media ini secara umum menasar masyarakat luas dan dinilai efektif dalam menyampaikan informasi serta membangun kesadaran publik. Pesan kunci yang disampaikan melalui berbagai media adalah pentingnya pemeliharaan drainase secara rutin agar saluran dapat berfungsi optimal. Drainase yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi menjadi penyebab utama genangan air di permukiman maupun jalan raya.

Oleh karena itu, media mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung program pemerintah dalam perbaikan dan normalisasi saluran drainase. Dengan penyampaian informasi yang terarah dan berbasis isu aktual, media di Kota Bogor telah berperan efektif dalam mendukung edukasi publik dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.

2.3 PERMASALAHAN SANITASI DAN AREA BERESIKO

Penetapan area berisiko sanitasi merupakan proses klasifikasi dan pemetaan wilayah Kota Bogor berdasarkan tingkat risiko sanitasi yang mencakup potensi penurunan kualitas hidup, kesehatan, kondisi bangunan, serta lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Kualitas hasil penetapan area berisiko sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data yang digunakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) PKP. Sumber data yang digunakan berasal dari:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang tersedia di SKPD terkait kondisi eksisting sanitasi, seperti jumlah penduduk, luas area terbangun, jumlah rumah tangga miskin, fungsi wilayah (urban/rural), cakupan akses jamban layak (onsite/offsite/komunal), cakupan pelayanan sampah, serta luas genangan.
- 2) Data primer, yang diperoleh melalui *Studi Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) dan persepsi dari SKPD terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas sarana sanitasi serta PHBS masyarakat.

Penentuan area berisiko dilakukan melalui kombinasi ketiga data tersebut:

- Analisis data sekunder dilakukan untuk memetakan tingkat risiko berdasarkan indikator-indikator kuantitatif.
- Penilaian SKPD, yang bersifat kualitatif dan subjektif, berdasarkan pengamatan, pengalaman dan keahlian profesional anggota Pokja PKP.
- Hasil studi EHRA, yang menilai risiko sanitasi dari aspek kondisi sumber air, pencemaran akibat limbah domestik, pengelolaan sampah rumah tangga, kondisi drainase, serta perilaku masyarakat (misalnya : cuci tangan pakai sabun, hygiene jamban, pengelolaan air minum dan praktik buang air besar sembarangan).

Skoring risiko sanitasi diberikan terhadap setiap kelurahan berdasarkan hasil integrasi ketiga sumber data tersebut. Skor risiko terdiri atas:

- 1 = Risiko Rendah
- 2 = Risiko Sedang
- 3 = Risiko Tinggi
- 4 = Risiko Sangat Tinggi

Adapun indikator utama yang dinilai meliputi tingkat kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga miskin, serta akses dan cakupan layanan sanitasi. Selain itu, penetapan area berisiko juga mempertimbangkan permasalahan mendasar, baik teknis maupun non teknis, yang menjadi penghambat pencapaian layanan sanitasi yang ideal. Permasalahan teknis dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting (salah satunya termasuk FGD) dan kajian EHRA, sementara permasalahan non teknis dirumuskan melalui kajian primer lainnya seperti kajian peran serta masyarakat, kelembagaan dan kebijakan, komunikasi dan media, serta peran sektor swasta. Dengan pendekatan integrative yang ada, penetapan area berisiko sanitasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan intervensi sanitasi yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan di Kota Bogor.

2.4.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Area berisiko sanitasi untuk air limbah domestik menunjukkan bahwa dari 68 Kelurahan yang ada di Kota Bogor, terdapat 5 kelurahan yang memiliki akses area resiko yang sangat tinggi, terdapat 20 kelurahan yang memiliki akses area resiko yang tinggi dan sisanya resiko sedang dan resiko rendah. Untuk mengetahui area berisiko sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 37 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik Kota Bogor

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Area Berisiko Air Limbah Domestik
Bogor Timur	Katulampa	4.0
Bogor Barat	Balungbangjaya	4.0
Tanah Sareal	Kedungwaringin	4.0
Tanah Sareal	Kedungbadak	4.0
Tanah Sareal	Kencana	4.0
Bogor Selatan	Mulyaharja	3.0
Bogor Selatan	Bondongan	3.0
Bogor Selatan	Cikaret	3.0
Bogor Timur	Baranangsiang	3.0
Bogor Utara	Bantarjati	3.0
Bogor Utara	Tegal Gundil	3.0
Bogor Utara	Tanahbaru	3.0
Bogor Utara	Cibuluh	3.0
Bogor Utara	Kedunghalang	3.0
Bogor Utara	Ciparigi	3.0
Bogor Tengah	Tegallega	3.0
Bogor Barat	Menteng	3.0
Bogor Barat	Cilendek Barat	3.0
Bogor Barat	Situgede	3.0
Bogor Barat	Bubulak	3.0

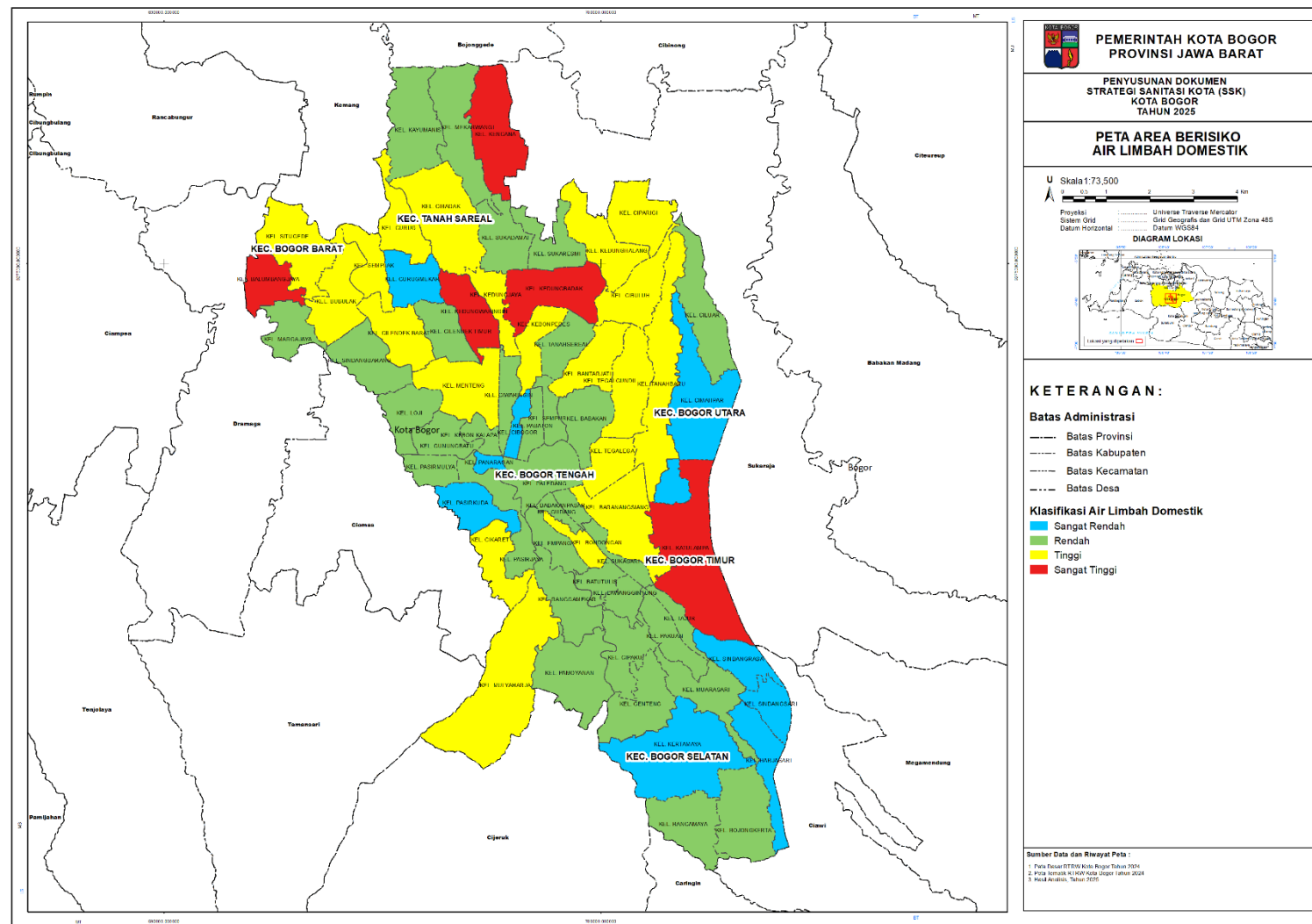
Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Area Beresiko Air Limbah Domestik
Bogor Barat	Semplak	3.0
Bogor Barat	Curug	3.0
Tanah Sareal	Kedungjaya	3.0
Tanah Sareal	Kebonpedes	3.0
Tanah Sareal	Cibadak	3.0

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 38 Permasalahan Mendesak Sanitasi Air Limbah Domestik

Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peranserta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Banyak tangki septik rumah tangga belum memenuhi standar teknis dan tidak dilakukan penyedotan berkala	Belum adanya regulasi teknis lokal yang secara rinci mengatur standar konstruksi tangki septik, kewajiban penyedotan berkala, dan pengelolaan lumpur tinja	Kelembagaan pengelola, terutama di tingkat masyarakat (KSM), masih terbatas kapasitas dan pendampingannya	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyedotan rutin dan sanitasi aman	Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah masih sangat bergantung pada APBD atau bantuan pemerintah pusat
Terbatasnya jaringan sistem terpusat dan terbatasnya jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Koordinasi antar regulasi sektoral masih lemah, sehingga pelaksanaan program sering tumpang tindih atau tidak berkelanjutan	Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal dalam hal pelaksanaan program lintas sektor	Peran masyarakat umumnya bersifat reaktif, belum terbentuk budaya kolektif dalam pemeliharaan sistem sanitasi	Belum ada skema pembiayaan berkelanjutan atau tarif layanan yang diterima masyarakat secara luas
Infrastruktur komunal yang telah dibangun belum optimal dari segi pemanfaatan dan pemeliharaan	Belum tersedia perda khusus pengelolaan air limbah domestik yang mendukung layanan berkelanjutan Penerapan regulasi yang belum optimal berdampak pada pengawasan dari stakeholder terhadap masyarakat	Minimnya sistem monitoring dan evaluasi rutin atas kinerja layanan sanitasi air limbah domestik	Belum semua wilayah memiliki KSM aktif atau kader sanitasi yang dapat menggerakkan perubahan perilaku	Keterlibatan sektor swasta dalam investasi layanan air limbah masih sangat terbatas karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2. 40 Peta Area Resiko Sanitasi Air Limbah Domestik

2.4.2 Area berisiko dan permasalahan persampahan

Hasil area berisiko sanitasi untuk persampahan dapat diketahui terdapat 6 kelurahan yang berisiko sangat tinggi, 16 Kelurahan berisiko tinggi dan sisanya dengan risiko sedang dan rendah. Untuk mengetahui area berisiko sanitasi pengelolaan persampahan di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 39 Area Berisiko Sanitasi Persampahan Kota Bogor

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Area Berisiko Persampahan
Bogor Utara	Bantarjati	4.0
Bogor Tengah	Tegallega	4.0
Tanah Sareal	Kedungwaringin	4.0
Tanah Sareal	Kebonpedes	4.0
Tanah Sareal	Mekarwangi	4.0
Tanah Sareal	Kencana	4.0
Bogor Selatan	Mulyaharja	3.0
Bogor Selatan	Bondongan	3.0
Bogor Selatan	Cikaret	3.0
Bogor Timur	Katulampa	3.0
Bogor Timur	Baranangsiang	3.0
Bogor Utara	Tegal Gundil	3.0
Bogor Utara	Tanahbaru	3.0
Bogor Utara	Ciparigi	3.0
Bogor Barat	Sindangbarang	3.0
Bogor Barat	Balungbangjaya	3.0
Bogor Barat	Situgede	3.0
Bogor Barat	Bubulak	3.0
Bogor Barat	Semplak	3.0
Bogor Barat	Curug	3.0
Tanah Sareal	Kedungbadak	3.0
Tanah Sareal	Cibadak	3.0

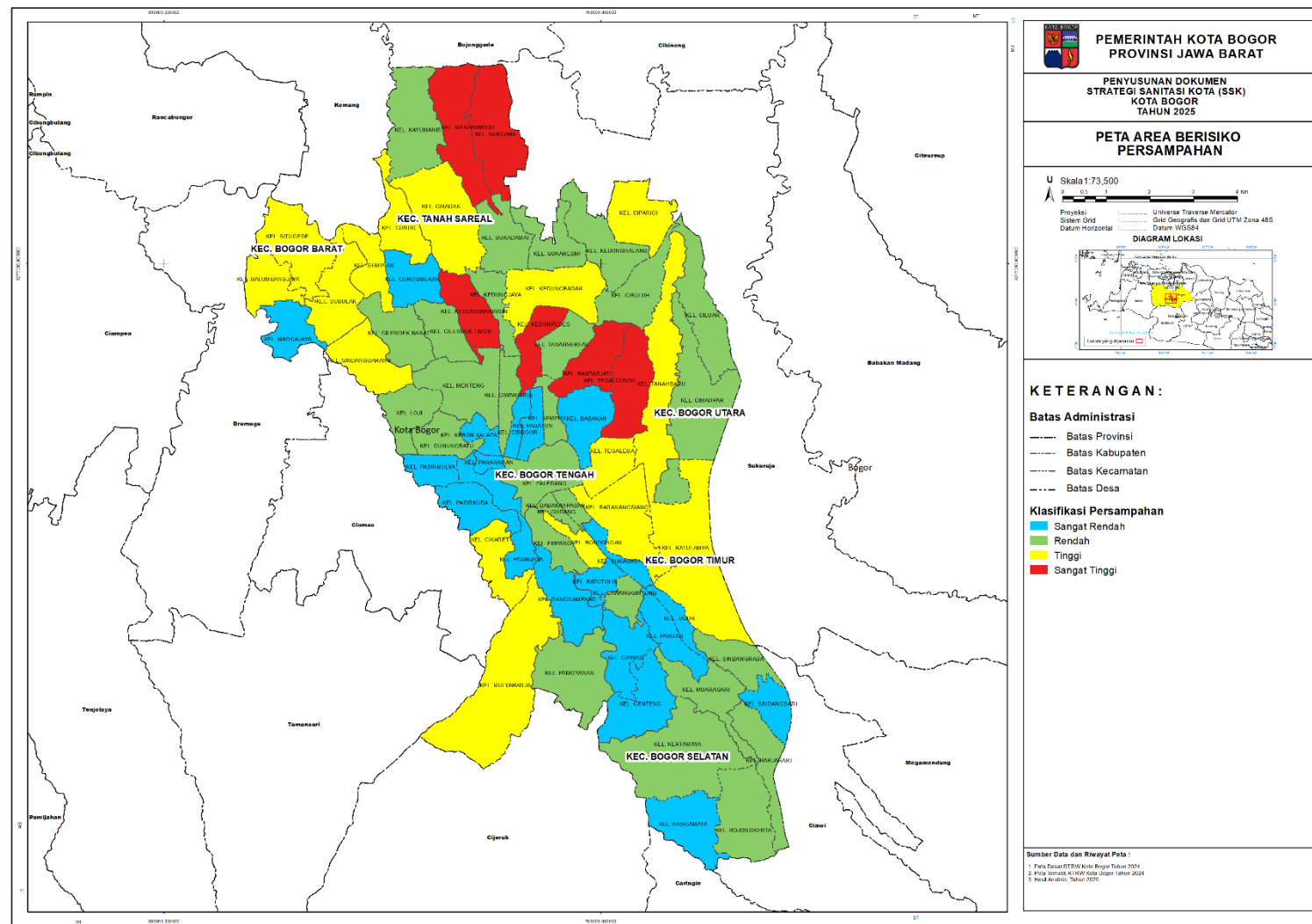
Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 40 Permasalahan Mendesak Sanitasi Persampahan

Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peranserta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Timbulan sampah yang tinggi	Regulasi sudah cukup namun implementasi lemah	Keterbatasan operasional Bank Sampah dan TPS3R, dimana sangat bergantung pada inisiatif lokal	Partisipasi pemilahan masih lemah, dimana ketergantungan tinggi pada sistem pengumpulan terpusat	Ketergantungan pada APBD
Rendahnya pengolahan sampah	Turunan perwal belum lengkap, dimana terdapat mandate perda			
Overload TPA Galuga yang tinggi timbunan sudah >15meter	belum dituangkan dalam peraturan	Partisipasi kelembagaan tingkat kewilayahan dalam pembinaan	Upaya edukasi melalui program kegiatan yang ada dan media promosi	Retribusi belum efektif dan tidak menutupi operasional

Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peranserta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Keterbatasan sarana, dimana terdapat 706 TPS namun belum memiliki transfer depo. Serta armada pengangkut yang ada belum mampu menutupi seluruh output sampah	turunan, sehingga implementasi teknis berjalan lambat	dan pengawasan masyarakat tergolong kurang optimal	sudah berjalan, namun masih perlu penguatan agar perilaku masyarakat berubah signifikan	penuh
	Larangan dan sanksi administrative atas pelanggaran pengelolaan sampah kurang ditegakkan secara konsisten		Kurang meratanya fasilitas pendukung (tempat sampah, TPS, toilet sehat) sehingga masyarakat kesulitan untuk berpartisipasi aktif	Retribusi belum efektif, dan tidak mampu menutupi kebutuhan operasional penuh pengelolaan sampah
				Kurangnya sumber dana alternatif yang berkelanjutan (misal CSR, kemitraan, dana hibah) untuk mendukung program inovasi pengelolaan persampahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2. 41 Peta Area Resiko Sanitasi Persampahan

2.4.3 Area berisiko dan permasalahan drainase lingkungan

Hasil area berisiko sanitasi untuk drainase lingkungan dapat diketahui terdapat 12 Kelurahan yang berisiko sangat tinggi, 7 Kelurahan berisiko tinggi dan sisanya dengan risiko sedang dan rendah. Untuk mengetahui area berisiko sanitasi drainase lingkungan di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 41 Area Berisiko Sanitasi Persampahan Kota Bogor

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Area Berisiko Drainase
Bogor Selatan	Bondongan	4.0
Bogor Utara	Bantarjati	4.0
Bogor Utara	Tanahbaru	4.0
Bogor Tengah	Tegallega	4.0
Bogor Barat	Situgede	4.0
Bogor Barat	Semplak	4.0
Bogor Barat	Curug	4.0
Tanah Sareal	Kedungwaringin	4.0
Tanah Sareal	Kebonpedes	4.0
Tanah Sareal	Kedungbadak	4.0
Tanah Sareal	Mekarwangi	4.0
Tanah Sareal	Kencana	4.0
Bogor Timur	Katulampa	3.0
Bogor Timur	Baranangsiang	3.0
Bogor Utara	Tegal Gundil	3.0
Bogor Utara	Ciparigi	3.0
Bogor Barat	Cilendek Timur	3.0
Bogor Barat	Balungbangjaya	3.0
Bogor Barat	Bubulak	3.0

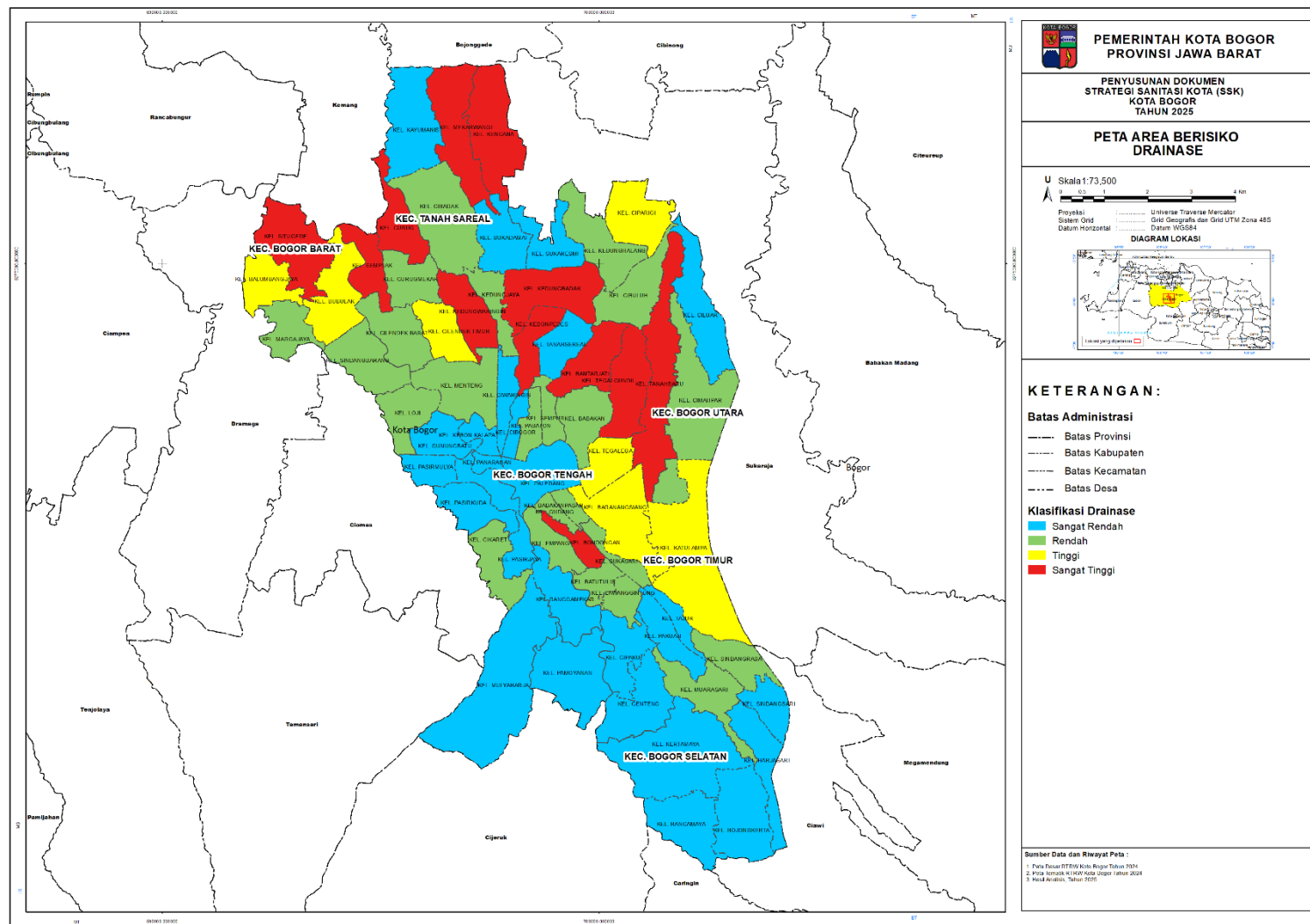
Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025

Tabel 2. 42 Permasalahan Mendesak Sanitasi Drainase

Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peranserta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Drainase di permukiman kerap digunakan sebagai pembuangan air limbah domestik selain air hujan, menyebabkan cepat tersumbat oleh sampah dan sedimen	Terdapat saluran berada di bawah kewenangan Pusat atau Provinsi	Pembangunan dan pemeliharaan drainase masih didominasi pemerintah, kontribusi sektor swasta dan CSR minim, padahal kebutuhan pembiayaan cukup besar	Masih ada buang sampah ke drainase yang menyebabkan penyumbatan dan berkurangnya kapasitas drainase	Pendanaan sebagian besar berasal dari pemerintah, kontribusi masyarakat baru dalam bentuk gotong royong
Kapasitas dan kualitas saluran			Kesadaran pemeliharaan	

Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peranserta Masyarakat	Aspek Pendanaan
masih belum memadai (banjir pada titik kritis)			saluran sudah mulai tumbuh berkat edukasi dan program kelurahan namun belum menyentuh seluruh lapisan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2. 42 Peta Area Resiko Drainase



BAB 3

KERANGKA

PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi mengenai Visi, Misi, Rencana Pengembangan Sanitasi sampai dengan Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur sebagai sumber inspiratif bagi pengembangan pembangunan suatu daerah, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program maupun kegiatan. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Bogor. Partisipasi masyarakat dan peran serta swasta harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap monitoring dan evaluasi.

Oleh sebab itu, dalam bidang pembangunan sanitasi, Kota Bogor telah menyusun visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kota Bogor sangat erat dengan kaitannya dengan visi dan misi Kota Bogor yang tercermin didalam Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Bogor yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2029. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Bogor yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “**BOGOR BERES - BOGOR MAJU**”, yang berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

- **Bogor Beres** artinya mengajak seluruh laoran masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres, beres pendidikannya, kesehatannya dan kesejahteraannya.
- **Bogor Maju** artinya membangun kemajuan Kota Bogor dengan ciri khas kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat.

Sebagai penjabaran visi Kota Bogor diatas, disusunlah misi pembanguna Kota Bogor dalam rangka mewujudkan “**BOGOR BERES - BOGOR MAJU**” dengan rincian sebagai berikut:

1. Misi pertama **BOGOR CERDAS**: memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses Pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal.
2. Misi kedua **BOGOR SEHAT**: memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.
3. Misi ketiga **BOGOR SEJAHTERA**: meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Misi keempat **BOGOR LANCAR**: menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan khususnya di bidang sanitasi, Pemerintah Kota Bogor menetapkan visi dan misi sanitasi yang selaras dengan misi ke 2 (dua) dan misi ke 4 (empat), yaitu “memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia” dan “menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik”.

Tabel III.1 dibawah ini, merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi dan Misi Per subsektor sanitasi serta Visi dan Misi Kota Bogor yang bersinergi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kota Bogor

Visi kota	Misi kota	Visi sanitasi	Misi sanitasi
Bogor Beres - Bogor Maju	1. Bogor Cerdas memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses Pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal. 2. Bogor sehat memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks	"Terwujudnya Kota Bogor yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan melalui Sanitasi Aman dan Inklusif"	Misi Air Limbah Domestik 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Menumbuhkembangkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. 3. Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman.

Visi kota	Misi kota	Visi sanitasi	Misi sanitasi
	pembangunan manusia. 3. Bogor Sejahtera meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. 4. Bogor Lancar menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.		Misi Persampahan 1. Mewujudkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Menumbuhkembangkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 3. Memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. 4. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan optimalisasi penggunaan teknologi, sarpras dan pemberdayaan masyarakat. a.

Sumber: RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dan Hasil Analisa, 2025

3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

1.2.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kota Bogor menyajikan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, Provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk masing-masing 2 (dua) sektor yaitu air limbah domestik dan persampahan di Kota Bogor dengan target yang sudah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat mencapai target universal akses yang telah ditargetkan baik oleh Nasional maupun Provinsi Jawa Barat akan tercapai di tahun ke 5 (lima) yaitu Tahun 2029.

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai dasar dan acuan untuk pengembangan sanitasi yang lebih terintegrasi serta sebagai panduan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi selama lima tahun ke depan. Penyusunan ini memuat tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi sanitasi Kota Bogor. Diharapkan dengan tujuan tersebut dapat menopang dan mengimplementasikan *Terwujudnya Kota Bogor yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan melalui Sanitasi Aman dan Inklusif bagi Seluruh Warga*.

a) Tujuan dan Sasaran Sektor Air Limbah Domestik

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah Domestik)

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan akses sanitasi aman secara berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap sanitasi aman menjadi 7,12 pada Tahun 2029 dan 7,25 pada tahun 2030	Akses Sanitasi Aman sebesar 6,2%
Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang aman dan berkelanjutan	▪ Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem air limbah layak ▪ Meningkatkan Persentase rumah tangga yang dilayani oleh sistem air limbah aman	
Memperkuat sistem pengelolaan air limbah terdesentralisasi dan terpusat	Meningkatkan persentase Rumah Tangga dengan tangki septik aman	80% penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak
Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan	Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Data Lembaga Pengelola Kelembagaan/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha	100% kelurahan memiliki kader sanitasi aktif dan minimal 1 forum RW penggerak sanitasi pada tahun 2029	
Meningkatkan kapasitas IPLT dan sistem operasionalnya	Meningkatkan kapasitas layanan IPLT agar mampu menampung 100% limbah hasil sedot terjadwal tahun 2029	Kapasitas IPLT yang ada sudah maksimum terpakai

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Catatan:

- (1) Tujuan mengacu pada target yang akan dicapai di tahun $n+5$
- (2) Sasaran mengacu pada tabel tahapan pengembangan di tiap sektor. Pada kolom ini disebutkan secara spesifik besar persentase sasaran, kondisi apa yang ingin dicapai, dan sistem penanganan apa yang digunakan.
- (3) Data dasar adalah kondisi sanitasi eksisting terkait sasaran yang ingin dicapai.

b) Tujuan dan Sasaran Sektor Persampahan

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk sektor persampahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Persampahan)

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan efektivitas penanganan sampah dari sumber hingga TPA	Meningkatkan Jumlah rumah Tangga yang terlayani sarana pengumpulan sampah menjadi 100% pada tahun 2029	89,38% Jumlah sampah yang tertangani dan 97,5% layanan pengumpulan sampah
Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah	Peningkatan TPA Galuga melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (<i>Refuse-Derived Fuel</i>)/PSEL untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah.	Saat ini masih menggunakan pendekatan <i>sanitary landfill</i>
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular	Meningkatkan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 7,90 % pada Tahun 2029	Pada tahun 2024, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Data dasar
		adalah 7,98%
Memperkuat kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah berbasis kawasan	Implementasi Perda & Sanksi administrasi bagi kawasan yang tidak memilah dan mengelola sampah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	Masih terdapat daerah / wilayah yang belum melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam 3R	Seluruh RW memiliki minimal 1 kegiatan 3R aktif dan edukasi lingkungan pada tahun 2029	Masih terdapat RW yang belum memiliki kegiatan 3R aktif dan program edukasi lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Catatan:

- (1) Tujuan mengacu pada target yang akan dicapai di tahun $n+5$
- (2) Sasaran mengacu pada tabel tahapan pengembangan di tiap sektor. Pada kolom ini disebutkan secara spesifik besar persentase sasaran, kondisi apa yang ingin dicapai, dan sistem penanganan apa yang digunakan.
- (3) Data dasar adalah kondisi sanitasi eksisting terkait sasaran yang ingin dicapai.

1.2.8 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kota Bogor. Kota Bogor merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama/ strategis yang dihadapi pada saat ini. Tahapan pengembangan sanitasi terdiri dari :

a) Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Hasil dari instrument profil pemetaan kondisi sanitasi memberikan dasar bagi perumusan tahapan pengembangan pengelolaan air limbah domestik untuk lima (5) tahun ke depan di Kota Bogor. Tahapan ini dirancang berdasarkan kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan layanan sanitasi di berbagai wilayah.

Secara garis besar, sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), baik pada skala permukiman maupun skala perkotaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pengembangan tipikal sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor diilustrasikan sebagai berikut:

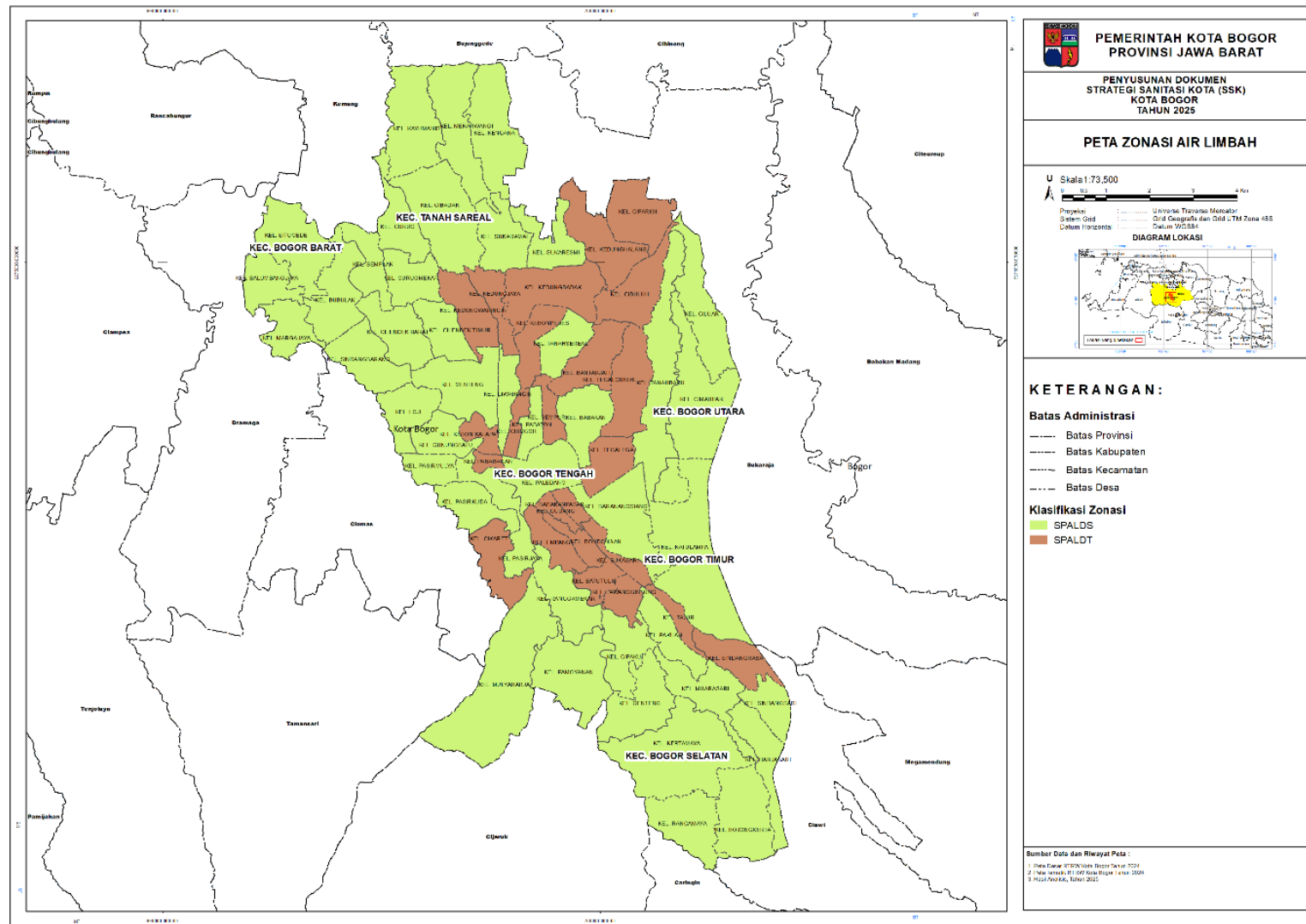
- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) meliputi sarana sanitasi individu (septic tank individual) untuk jangka pendek dan menengah;
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan Skala Perkotaan untuk periode waktu jangka menengah & jangka Panjang;
- (3) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air limbah domestik dikelola melalui pemicuan, sosialisasi, dan edukasi, dengan menggunakan media elektronik dan non elektronik. Merubah perilaku menuju hidup bersih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor. Penanganan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan secara menyeluruh diharapkan dapat lebih berkesinambungan.

Adapun gambaran rinci mengenai kondisi pengelolaan air limbah domestik saat ini disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029	Target - 2029		Target Jangka Pendek Kota Bogor (2025)	Capaian Tahun 2024	GAP Terhadap Target 2029	GAP Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor				
1	Akses Aman	30%	35.0%	7.12%	6.27%	6.20%	0.92%	5.35%
2	Akses Layak (Termasuk Aman)	100%	100.0%	100.0%	80.0%	83.5%	16.5%	-
3	Akses Belum Layak	0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.5%	-16.5%	-16.5%
4	BABS Tertutup	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0.0%	0.0%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025



Gambar 3. 1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

b) Tahapan Pengembangan Persampahan

Berdasarkan hasil instrument profil pemetaan kondisi sanitasi, tahapan pengembangan pengelolaan persampahan untuk lima (5) tahun kedepan di Kota Bogor dibagi ke dalam dua zona pelayanan, yaitu:

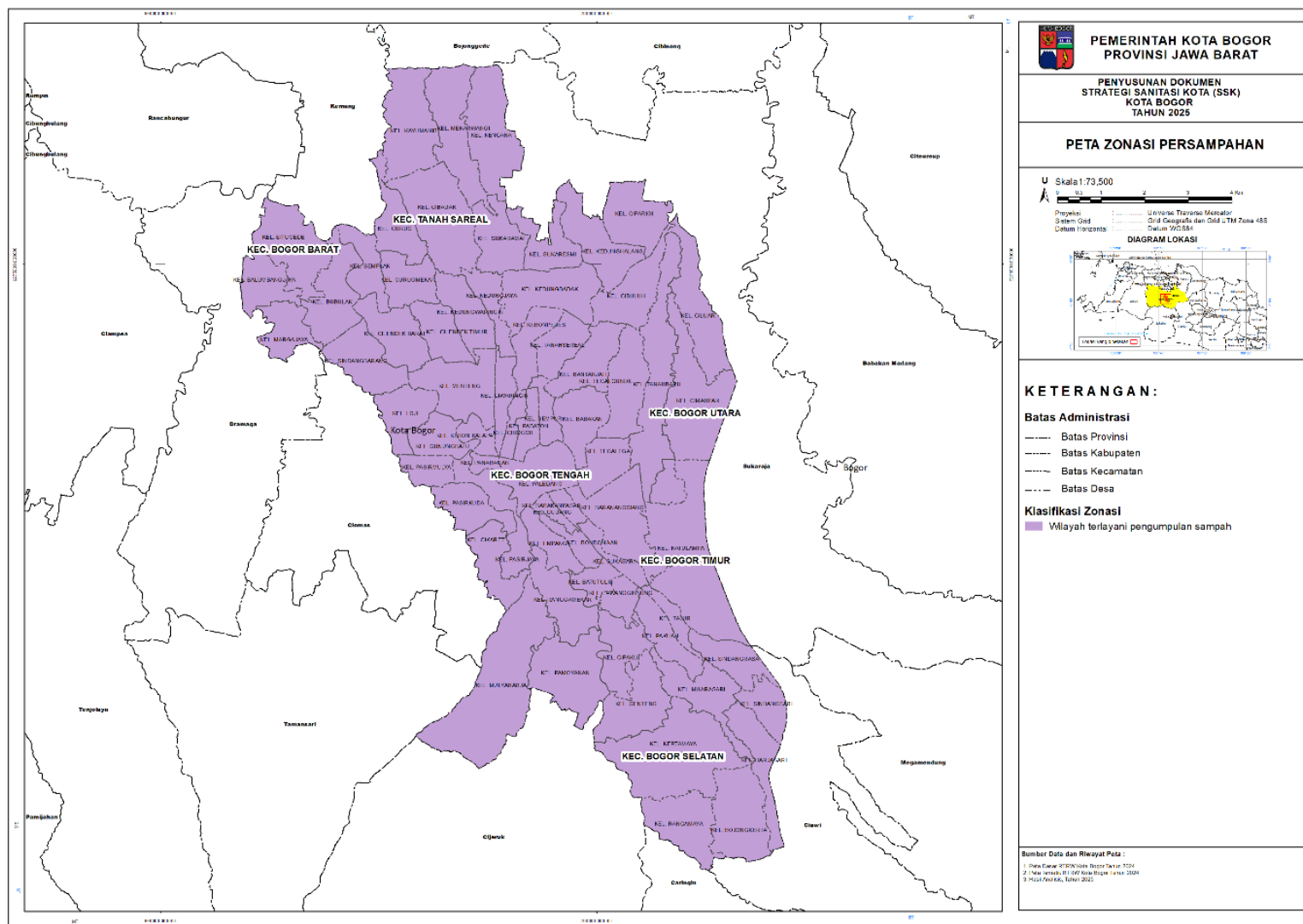
- (1) Zona 1 : Pengurangan Sampah, melalui pemilahan dan pengurangan di sumbernya, yang dilakukan di TPS 3R dan Bank Sampah
- (2) Zona 2 : Penanganan Sampah, mencakup pengolahan di TPST dan pengangkutan sisa sampah ke TPA.

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan persampahan Kota Bogor ditujukan untuk mengurangi persentase volume sampah yang dibuang ke TPA. Tujuannya adalah mengurangi beban TPA dan memperpanjang umur operasionalnya. Strategi yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan porsi pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pengelolaan mandiri di tingkat rumah tangga, dan optimalisasi peran Bank Sampah. Adapun gambaran cakupan layanan eksisting dan target cakupan layanan persampahan Kota Bogor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Komponen	Target RPJMN Nasional 2025-2029	Target - 2029		Target Jangka Pendek	Capaian Tahun 2024	GAP Terhadap Target 2029	GAP Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor				
1	Layanan Pengumpulan Sampah	85%	100%	100%	94.3%	97.5%	2.5%	-
2	Sampah Terolah	38%	37%	41.1%	26.1%	3.9%	37.2%	22.2%
	Sampah terolah					2.1%		
	Sampah terdaur ulang					1.9%		
3	Residu di LUR	47%	63%	58.9%	68.2%	84.5%	-25.7%	-16.4%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bogor, 2025



Gambar 3. 2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

1.2.9 Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama lima (5) tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan persampahan pada tabel dibawah berikut.

Tabel 3. 6 Tahapan Pengembangan Sanitasi di Kota Bogor

Komponen	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Air Limbah Domestik⁽¹⁾						
Akses Aman	6,27%	6,49%	6,7%	6,91%	7,12%	7,45%
Akses Layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Akses Belum Layak						
BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Persampahan⁽²⁾						
Layanan Pengumpulan Sampah	90.10%	94.28%	98.66%	100%	100%	100%
Sampah Terolah	24.93%	28.25%	32.02%	36.28%	41.12%	43.40%

Sumber: ⁽¹⁾Target IKD RPJMD Kota Bogor ⁽²⁾Distribusi Target IUP RPJPD Provinsi Jawa Barat

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Salah satu faktor penting lainnya dalam menentukan sistem dan cakupan layanan sanitasi adalah ketersediaan pembiayaan, yang sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Tren belanja sektor sanitasi di Kota Bogor selama lima (5) tahun terakhir diperoleh melalui data keuangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Perhitungan ini dengan merujuk pada Laporan Realisasi APBD. Hasil kajian tersebut disajikan dalam beberapa tabel di bawah ini.

Data pertumbuhan pendanaan dari APBD Kota Bogor digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kebutuhan pendanaan sanitasi dalam Rencana Jangka Menengah SSK Kota Bogor. Proyeksi ini didasarkan pada alokasi belanja sanitasi untuk air limbah domestik dan persampahan selama lima tahun terakhir.

Tabel 3. 7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi	48,393,374,650	40,082,262,196	37,347,068,400	55,781,902,425	44,986,512,861	1.50%
1.1	Air Limbah Domestik	7,215,011,000	5,752,568,196	5,768,422,000	22,791,172,000	20,505,234,721	66.27%
1.2	Persampahan	41,178,363,650	34,329,694,000	31,578,646,400	32,990,730,425	24,481,278,140	-11.49%
2	Dana Alokasi Khusus						
2.1	DAK Sanitasi						
2.2	DAK Lingkungan Hidup						
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman						
3	Pinjaman/ Hibah untuk Sanitasi						
	Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)	48,393,374,650	40,082,262,196	37,347,068,400	55,781,902,425	44,986,512,861	1.5%
	Total Belanja Langsung	2,010,772,890,180	2,196,846,628,156	2,125,372,250,947	2,521,694,020,021	2,695,303,160,764	7.88%
	% APBD Murni terhadap Belanja Langsung	2.41%	1.82%	1.76%	2.21%	1.67%	-6.64%

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel III.8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk sanitasi maka dibuat perkiraan besaran pendanaan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Perkiraan belanja langsung untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 merupakan data yang diperoleh dari dokumen RPJMD.

Tabel 3. 8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi 2025-2029

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perkiraan Belanja Langsung	2,785,611,817,816	2,841,324,054,173	2,898,150,535,256	2,956,113,545,961	3,015,235,816,880	14,496,435,770,086
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	38,595,586,882	40,620,004,789	43,774,412,924	45,006,626,177	46,935,264,129	214,931,894,901
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	41,784,177,267	42,619,860,813	43,472,258,029	44,341,703,189	45,228,537,253	217,446,536,551

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Perhitungan APBD Kota Bogor untuk operasional/pemeliharaan sanitasi selama 5 tahun ke belakang dapat dilihat pada Tabel III.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Operasional/Pemeliharaan Sektor Sanitasi.

Tabel 3. 9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD untuk Operasional/Pemeliharaan Sektor Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi	4,062,000,479	4,377,441,292	4,500,662,618	4,693,526,413	4,881,112,774	4.72%
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	1,816,218,538	2,017,441,292	2,012,662,618	2,020,526,413	2,016,112,774	2.75%
1.2	Persampahan						
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	2,245,781,941	2,360,000,000	2,488,000,000	2,673,000,000	2,865,000,000	6.28%

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Perkiraan besaran pendanaan APBD Kota Bogor untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan asset sanitasi terbangun untuk periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel III.10 Perhitungan ini dilakukan berdasarkan data time series.

Tabel 3. 10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD untuk KebutuhanOperasional/Pemeliharaan Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi (O/P)	3,859,558,688	4,062,000,479	4,377,441,292	4,500,662,618	4,693,526,413	5.03%
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	1,748,212,882	1,816,218,538	2,017,441,292	2,012,662,618	2,020,526,413	3.78%
1.2	Persampahan						
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	2,111,345,806	2,245,781,941	2,360,000,000	2,488,000,000	2,673,000,000	6.08%

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sesuai informasi tabel III.11 di bawah ini, bahwasanya Perkiraan Kemampuan APBD dalam mendanai program/kegiatan SSK ada peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3. 11 Perkiraan Kemampuan APBD dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	3,859,558,688.16	4,062,000,478.90	4,377,441,292.40	4,500,662,617.72	4,693,526,412.88	21,493,189,490.06
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	38,595,586,881.57	40,620,004,789.00	43,774,412,924.00	45,006,626,177.20	46,935,264,128.82	214,931,894,900.59
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	41,784,177,267.24	42,619,860,812.59	43,472,258,028.83	44,341,703,189.42	45,228,537,253.20	217,446,536,551.29
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	34,736,028,193.42	36,558,004,310.10	39,396,971,631.60	40,505,963,559.48	42,241,737,715.94	193,438,705,410.53
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	37,924,618,579.08	38,557,860,333.69	39,094,816,736.43	39,841,040,571.70	40,535,010,840.32	195,953,347,061.23

Sumber : Hasil Analisis, 2025



BAB 4

STRATEGI

PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi mengenai pengembangan air limbah domestik dan sampah perkotaan

Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis. Perumusan dan penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bogor mengacu kepada isu strategis serta permasalahan mendesak pada masing-masing sub-sektor sanitasi yang berhasil diidentifikasi. Selanjutnya dengan memperhatikan posisi pengelolaan saat ini dan sesuai hasil analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) semua aspek pada masing-masing sektor sanitasi yang menghasilkan posisi pengelolaan sanitasi sampai dengan tahun 2029 ini, sehingga apapun strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab dan mengatasi seluruh isu strategis serta permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dan diharapkan juga bahwa strategi itu mampu berkontribusi dan mendukung ke arah pencapaian kondisi yang dicita-citakan yang tertuang dalam Visi dan Misi Sanitasi Kota Bogor serta mendorong tercapainya target *Sustainable Development Goals* 2030 sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengelolaan sanitasi yang terdiri dari air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase Perkotaan di Kota Bogor telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Hal ini nampak dari beberapa kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang telah memprioritaskan sektor sanitasi ini. Namun dalam pelaksanaannya, perbaikan sektor sanitasi masih memerlukan dukungan beberapa aspek, baik teknis maupun non-teknis, seperti dukungan pendanaan, kelembagaan, regulasi dan lain-lain, misalnya dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan sub-sektor persampahan yang berkelanjutan, selain menuntut ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang lengkap. Hal tersebut perlu juga didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kuantitas dan kualitas yang semestinya, selain itu perlu juga didukung dengan anggaran yang cukup memadai, payung hukum dan penegakan peraturan yang mengatur terselenggaranya pengelolaan persampahan yang lebih profesional, keterjangkauan dalam biaya operasi dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana yang ada, peran serta masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang bersih dan sehat sampai dengan kemauan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut di atas, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Kondisi pengelolaan sanitasi di Kota Bogor dan wilayah lainnya di Indonesia selama ini cukup memberikan gambaran bahwa mengatasi permasalahan sanitasi tidak semudah membalikan telapak tangan, dalam pelaksanaannya cukup sulit sehingga diperlukan rumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan mampu menjawab permasalahan yang sebenarnya.

Strategi yang dimaksud di atas dirumuskan dengan menggunakan tools yang sudah umum digunakan yaitu dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu suatu bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusi dan perannya masing-masing, yaitu:

1. Lingkungan Internal:

- Kekuatan (*Strengths*): mencakup potensi daerah seperti ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah.
- Kelemahan (*Weaknesses*): meliputi keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, lemahnya regulasi, serta minimnya dukungan anggaran.

2. Lingkungan Eksternal:

- Peluang (*Opportunities*): potensi dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kabupaten, seperti kebijakan dan kondisi makro wilayah, contoh: lokasi geografis yang menguntungkan, adanya kebijakan provinsi/nasional yang membuka peluang untuk pembangunan sanitasi
- Ancaman (*Threats*): seperti risiko pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur, munculnya penyakit akibat sanitasi buruk, dan tantangan perubahan iklim.

Proses analisis SWOT menghasilkan rumusan awal strategi sanitasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif. Penyusunan strategi ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Pengkajian ulang terhadap isu-isu strategis dan hambatan potensial yang diidentifikasi dari kondisi eksisting.
- 2) Diskusi dan kesepakatan terhadap hasil analisis sebagai dasar dalam merumuskan strategi.
- 3) Pengelompokan hasil menjadi strategi utama yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan sanitasi secara efektif dan berkelanjutan.

Analisis SWOT dilakukan dengan menelaah lima (5) aspek utama, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan
2. Aspek Keuangan
3. Aspek Teknis
4. Aspek Regulasi
5. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari dasar aspek utama diatas kemudian unsur-unsur yang dianalisis diambil dari permasalahan yang telah diidentifikasi dalam analisis gap akses maka dilakukan analisis IFAS dan EFAS. Dalam penyusunan Matriks IFAS dan Matriks EFAS, nilai bobot dan tingkat pengaruh (rating) tidak muncul secara otomatis, melainkan ditentukan melalui proses analisis yang menggabungkan data kuantitatif, dokumen perencanaan, dan penilaian ahli.

1. Nilai Bobot (*Weight*)

- Definisi: Bobot menunjukkan tingkat kepentingan atau kontribusi suatu faktor terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, program, atau wilayah.

- Sumber Penentuan:
 - a. Data kuantitatif dan indikator kinerja dari sumber resmi seperti BPS, laporan kinerja tahunan, hasil evaluasi program, dan basis data sektoral.
 - b. Dokumen perencanaan strategis (RPJMD, Renstra, KLHS, dokumen teknis sektoral) yang menetapkan prioritas kebijakan dan arah pembangunan.
 - c. Hasil FGD, kuesioner, atau wawancara ahli yang memberikan penilaian terhadap tingkat pentingnya masing-masing faktor.
 - Proses: Semua bobot dijumlahkan hingga total = 1,00 (atau 100%). Faktor yang dianggap lebih penting mendapatkan bobot lebih besar.
- 2. Nilai Tingkat Pengaruh (*Rating*)**
- Definisi: *Rating* mencerminkan kondisi aktual dari faktor tersebut, apakah merupakan kekuatan/peluang yang kuat atau kelemahan/ancaman yang signifikan.
 - Sumber Penentuan:
 - a. Analisis kondisi aktual berdasarkan data kinerja, capaian target, tren statistik, dan hasil pemantauan lapangan.
 - b. Benchmarking atau perbandingan dengan target, standar, atau wilayah lain untuk mengetahui posisi relatif.
 - c. Penilaian subjektif para ahli/pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam FGD atau workshop.
 - Skala Penilaian Umum:
 - d. IFAS: 1-2 untuk kelemahan, 3-4 untuk kekuatan.
 - e. EFAS: 1-2 untuk ancaman, 3-4 untuk peluang.
- 3. Perbedaan IFAS dan EFAS dalam Sumber Data**
- IFAS (**Internal**): Faktor dan nilainya banyak diambil dari data internal organisasi/daerah, laporan kinerja, audit internal, capaian program, dan sumber daya yang tersedia.
 - EFAS (**External**): Faktor dan nilainya banyak diambil dari data eksternal seperti tren ekonomi, sosial, lingkungan, peraturan perundangan, kebijakan pemerintah pusat, kondisi pasar, teknologi, serta isu global/nasional yang relevan.

Dengan demikian, nilai bobot pada IFAS dan EFAS berasal dari tingkat kepentingan faktor yang diidentifikasi, sedangkan nilai tingkat pengaruh (*rating*) berasal dari kondisi aktual dan penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Keduanya biasanya ditentukan melalui kombinasi analisis data, kajian dokumen resmi, dan penilaian partisipatif para ahli.

Adapun hasil dari analisis *gap* akses dan analisis SWOT secara lengkap disajikan pada sub-bab berikutnya. Di Kota Bogor, meskipun sektor sanitasi telah menjadi salah satu prioritas pembangunan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, strategi yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjawab permasalahan aktual serta memperkuat arah kebijakan sanitasi, termasuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

4.1 PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Tujuan, sasaran dan strategi pengembangan air limbah domestik ditetapkan berdasarkan misi pengembangan sanitasi yang diturunkan dari visi dan misi Kota Bogor yang termuat dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Adapun misi dalam pengelolaan air limbah domestik adalah “Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik yang aman, terintegrasi, dan berbasis teknologi ramah lingkungan”. Berdasarkan Analisis Gap Akses yang dipadukan dengan Analisis SWOT Air Limbah Domestik di Kota Bogor berada pada titik (x,y) = (0,5;0,15), dimana berada pada kuadran 1. Dalam kuadran 1 diarahkan atau direkomendasikan untuk mendukung strategi *Growth* (pertumbuhan). Dibawah ini merupakan hasil evaluasi faktor strategis Eksternal (matriks eksternal faktor *evaluation*) untuk Air Limbah Domestik di Kota Bogor.

Tabel 4. 1 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal
(Matriks *Internal Factor Evaluation* – IFE)

No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (FAS)					
KEKUATAN (STRENGTH)					
1	Adanya Dinas PUPR sebagai regulator dan UPTD PAL sebagai operator pengelola ALD (Kelembagaan)	0,25	4	1,00	
2	Adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Regulasi)	0,15	2	0,30	
3	Tersedianya IPLT Tegal Gundil (Teknis)	0,20	3	0,60	
4	Tersedianya IPAL Skala Kota Kayumanis (SPALD-T) (Teknis)	0,20	4	0,80	
5	Adanya Komitmen daerah berupa alokasi anggaran APBD Kota untuk percepatan akses (Pendanaan)	0,20	3	0,60	
Total		1,00	16	3,30	
KELEMAHAN (WEAKNESS)					
1	SPALD-T Kayumanis hanya mencakup sebagian wilayah Kota Bogor (Teknis)	0,20	3	0,60	
2	Kapasitas penggunaan IPLT sudah 100% (Teknis)	0,20	4	0,80	
3	Banyak kawasan padat sulit dibangun sistem sanitasi yang layak karena keterbatasan lahan. (Teknis)	0,20	2	0,40	
4	Banyak jaringan pipa air limbah yang sudah tua, bocor, atau tidak berfungsi optimal. (Teknis)	0,20	2	0,40	
5	Belum Maksimal Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Regulasi)	0,20	3	0,60	
Total		1,00	14	2,80	
Selisih Kekuatan dan Kelemahan				0,50	(x)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Keterangan :

Bobot (Weight) dalam IFAS diperoleh melalui proses identifikasi faktor-faktor internal, baik kekuatan (strengths) maupun kelemahan (weaknesses), kemudian dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan atau kontribusi faktor tersebut terhadap pencapaian program.

Bobot diberikan dengan jumlah total seluruh faktor = 1,00 (atau 100%), sehingga faktor yang lebih penting mendapat bobot lebih tinggi.

Tingkat Pengaruh (Rating) dalam IFAS berasal dari penilaian kekuatan atau kelemahan relatif setiap faktor internal. Nilai rating umumnya berada pada skala 1 sampai 4, di mana:

- 1-2 mewakili kelemahan (semakin kecil nilainya, semakin lemah)
- 3-4 mewakili kekuatan (semakin besar nilainya, semakin kuat)

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor ditopang oleh sejumlah faktor strategis internal yang memiliki tingkat pengaruh berbeda terhadap keberhasilan program, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, teknis, maupun pendanaan. Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai regulator, yang bekerja secara sinergis dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) selaku operator, membentuk fondasi kelembagaan yang kokoh. Sinergi antara kedua entitas ini memungkinkan terlaksananya proses perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan pengelolaan air limbah secara terkoordinasi, sehingga perannya dikategorikan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap pencapaian target sanitasi kota. Dukungan kelembagaan tersebut diperkuat dengan keberadaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang menjadi payung hukum penting dalam pengaturan aspek teknis dan administratif sanitasi. Kendati demikian, tingkat implementasi regulasi ini di lapangan masih memerlukan penguatan, sehingga pengaruhnya berada pada kategori sedang.

Dari aspek teknis, Kota Bogor memiliki dua fasilitas strategis, yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kayumanis. IPLT Tegal Gundil berfungsi mengolah lumpur tinja secara terpusat, yang meskipun berperan penting, kapasitasnya yang terbatas menjadikan pengaruhnya dikategorikan sedang. Sebaliknya, IPAL Kayumanis memiliki kapasitas pelayanan lebih luas dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sanitasi perkotaan, sehingga pengaruhnya dinilai sangat kuat. Pada aspek pembiayaan, komitmen Pemerintah Kota Bogor tercermin dalam alokasi anggaran APBD untuk mempercepat akses layanan sanitasi. Dukungan finansial ini memang menjadi pendorong utama keberlanjutan program tapi keberhasilan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana melainkan juga oleh efektivitas implementasi dan koordinasi antar faktor lainnya, tingkat pengaruhnya dikategorikan sedang.

Secara keseluruhan, kombinasi multiaspek membentuk suatu basis strategis yang solid bagi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor. Berdasarkan penilaian faktor strategis internal, diperoleh skor total 3,30, yang mengindikasikan bahwa Kota Bogor memiliki kapasitas internal yang cukup kuat untuk mendorong pengelolaan air limbah domestik secara berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal
(Matriks External Factor Evaluation – EFE)

No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)					
PELUANG (OPPORTUNITY)					
1	Perkembangan teknologi IPAL komunal dan individual yang hemat ruang dan biaya. (Teknis)	0,20	3	0,60	
2	Meningkatnya tekanan dan perhatian publik terhadap pencemaran sungai dan air tanah (Lingkungan)	0,10	2	0,20	
3	Adanya kerjasama Praktik sedot tinja dengan pihak swasta melalui aplikasi SISNINJA (Sistem Pemesanan Digital Jasa Sedot Lumpur Tinja) yang dikembangkan oleh UPTD PALD (Keterlibatan dunia usaha)	0,20	3	0,60	
4	Status Kota Sehat dengan komitmen bebas praktik buang air besar sembarangan (Kebijakan)	0,20	3	0,60	
5	Potensi pendanaan dari donor internasional (USAID IUWASH Tangguh) untuk infrastruktur sanitasi dan Keterlibatan sektor swasta melalui skema CSR (Pendanaan)	0,20	3	0,60	
6	Adanya forum sanitasi tingkat kota (Pokja PKP) dan Inisiatif kolaborasi lintas sektor: dinas teknis, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Kecamatan. (Kelembagaan)	0,10	2	0,20	
Total		1.00	16	2,80	
ANCAMAN (THREAT)					
1	Rendahnya swadaya masyarakat sehingga Investasi pembangunan dan operasional sistem pengelolaan air limbah masih sangat bergantung pada APBD/APBN atau bantuan luar negeri (Keuangan)	0,15	2	0,30	
2	Program sanitasi sering tidak melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga menimbulkan resistensi atau tidak berkelanjutan (Sosial)	0,25	3	0,75	
3	Tidak ada insentif bagi masyarakat yang membangun tangki septik kedap atau melakukan penyedotan berkala (Teknis)	0,20	3	0,60	
4	Banyak warga belum paham pentingnya pengelolaan air limbah yang aman dan risiko kesehatan akibat sanitasi buruk. (Sosial)	0,20	3	0,60	
5	Di tingkat komunitas, kelembagaan seperti KSM/kelompok pengelola IPAL sering tidak aktif atau kurang kapasitas.	0,20	2	0,40	

No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
	(Kelembagaan)				
	Total	1.00	13	2,65	
	Selisih Peluang dan Ancaman			0,15	(y)

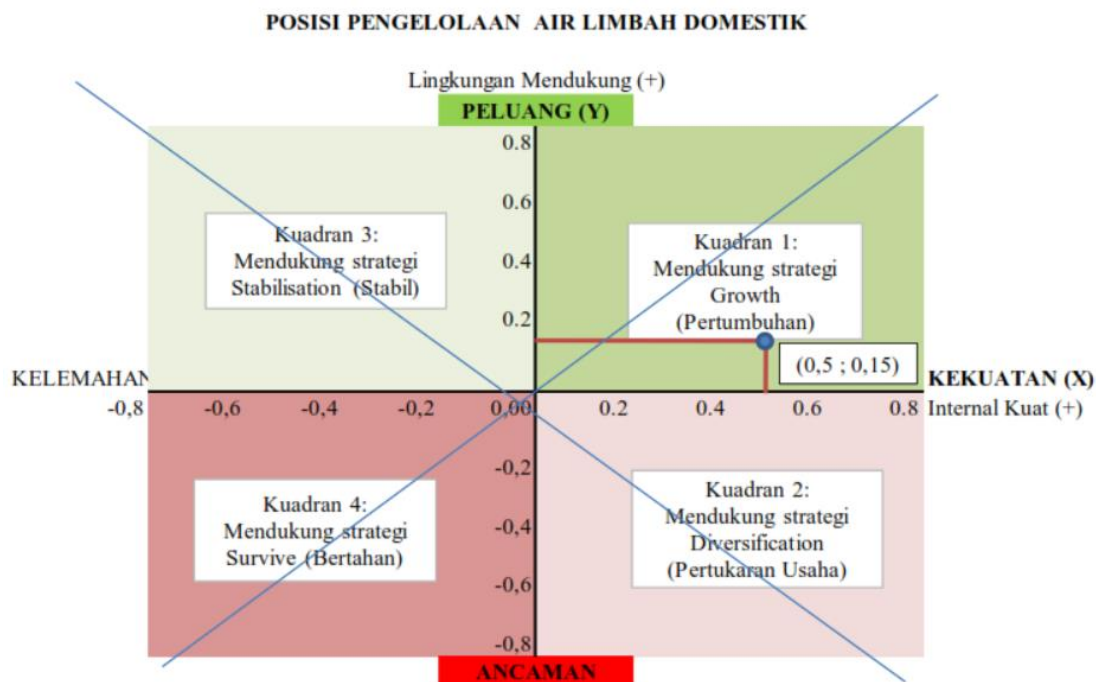
Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi faktor strategis eksternal pada tabel diatas, ditemukan bahwa sejumlah peluang dan kekuatan eksternal memiliki tingkat pengaruh yang bervariasi. Salah satu peluang yang dinilai memiliki pengaruh sedang adalah perkembangan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala komunal maupun individual. Teknologi ini menawarkan solusi praktis terhadap keterbatasan lahan di perkotaan serta dapat menekan biaya operasional. Meskipun kontribusinya signifikan, pemanfaatannya masih menghadapi tantangan pada aspek sosialisasi, pembiayaan, dan adaptasi masyarakat, sehingga dampaknya belum optimal.

Tekanan dan perhatian publik yang semakin meningkat terhadap isu pencemaran sungai dan air tanah menjadi peluang lain yang teridentifikasi. Namun, faktor ini dikategorikan memiliki pengaruh lemah karena meskipun kesadaran mulai tumbuh, aksi nyata masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pengendalian pencemaran masih perlu ditingkatkan.

Kota Bogor memiliki status sebagai "Kota Sehat", faktor ini dikategorikan berpengaruh sedang karena telah mendorong peningkatan standar sanitasi masyarakat. Akan tetapi, pengawasan berkelanjutan dan penguatan perilaku higienis masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian. Potensi pendanaan dari donor internasional seperti USAID IUWASH Tangguh dan partisipasi sektor swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menempati kategori pengaruh sedang. Sumber pendanaan ini menjadi dukungan strategis bagi pengembangan infrastruktur sanitasi, tetapi realisasi manfaatnya sangat bergantung pada koordinasi antar pihak, kesesuaian prioritas program, dan efektivitas pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa peluang strategis eksternal bagi pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor umumnya berada pada kategori pengaruh sedang, dengan beberapa faktor yang masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan respons program terhadap dinamika eksternal.



Gambar 4. 1 Kuadran Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor

Dari hasil analisis IFAS dan EFAS serta untuk mencapai misi pengelolaan air limbah domestik dibutuhkan beberapa sasaran yang dirumuskan melalui pendekatan SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas waktu) beserta strategi pencapaiannya, yang jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran (SMART)	Strategi
Meningkatkan akses sanitasi aman secara berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap sanitasi aman menjadi 7,12 pada Tahun 2029 dan 7,25 pada tahun 2030	Mendorong pembangunan dan revitalisasi tangki septik kedap di rumah tangga dan fasilitas publik Subsidi sedot tinja bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatkan cakupan layanan air limbah yang aman dan berkelanjutan	- Meningkatkan Persentase akses rumah tangga terhadap sistem air limbah layak dari 71,49% menjadi 75,10% pada tahun 2029 - Meningkatkan Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah aman sebesar 8,55 %.	Pembangunan baru IPLT
Memperkuat sistem pengelolaan air limbah terdesentralisasi dan terpusat	Meningkatkan persentase Rumah Tangga dengan tangki septik aman	Pembangunan IPAL Komunal di kawasan padat dan IPAL Komunal terintegrasi di permukiman baru Rehabilitasi dan perluasan jaringan air limbah eksisting Memaksimalkan Peran aplikasi SISNINJA (Sistem Pemesanan Digital Jasa

Tujuan	Sasaran (SMART)	Strategi
		Sedot Lumpur Tinja)
Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan	Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemutakhiran data spasial dan baseline sistem sanitasi rumah tangga berbasis RT
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha	100% kelurahan memiliki kader sanitasi aktif dan minimal 1 forum RW penggerak sanitasi pada tahun 2029	Edukasi rutin berbasis RW melalui Forum Komunikasi Sanitasi dan lomba RW sanitasi terbaik
Meningkatkan kapasitas IPLT dan sistem operasionalnya	Meningkatkan kapasitas layanan IPLT agar mampu menampung 100% limbah hasil sedot terjadwal tahun 2029	Pembangunan/Peningkatan kapasitas IPLT eksisting (kapasitas, armada, SDM)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

4.2 PENGEMBANGAN SAMPAH PERKOTAAN

Tujuan, sasaran dan strategi pengembangan persampahan ditetapkan berdasarkan misi pengembangan sanitasi yang diturunkan dari visi dan misi Kota Bogor yang termuat dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Adapun misi dalam pengelolaan persampahan adalah “Mewujudkan sistem persampahan yang efisien, berkelanjutan, dan partisipatif berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)”. Berdasarkan Analisis *Gap* Akses yang dipadukan dengan Analisis SWOT pengelolaan persampahan di Kota Bogor berada pada titik (x, y) = (0,4;0,2), dimana berada pada kuadran 1. Dalam kuadran 1 diarahkan atau direkomendasikan untuk mendukung strategi *Growth* (pertumbuhan) yang mana untuk meningkatkan pelayanan ataupun cakupan pengelolaan persampahan yang ada di Kota Bogor.

Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Internal
(Matriks Internal Factor Evaluation - IFE)

No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (FAS)					
KEKUATAN (STRENGTH)					
1	Adanya kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah (Regulasi)	0,20	3	0,60	
2	Adanya pemisahan fungsi regulator (DLH) dan Operator (UPT)-(Kelembagaan)	0,20	4	0,80	
3	Adanya Masterplan Pengelolaan Sampah (Teknis)	0,20	3	0,60	
4	Memiliki TPA Galuga dan TPPAS Nambo	0,20	3	0,60	
5	Tersedianya fasilitas TPS 3R dan TPST dengan sistem pengangkutan terkoordinasi (Teknis)	0,10	3	0,30	
6	Komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan - Program "Bersama Bereskan Sampah di Rumah" (Bebere Runtah) (Pendanaan)	0,10	2	0,20	

No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
Total		1.00	18	3.10	
KELEMAHAN (WEAKNESS)					
1	Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga terbatas (Teknis)	0,10	3	0,30	
2	Penerapan regulasi tentang sampah masih belum optimal (Regulasi)	0,20	2	0,40	
3	Kurangnya infrastruktur pendukung daur ulang dan pengomposan (Teknis)	0,20	3	0,60	
4	Minimnya insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan 3R secara aktif (Pendanaan)	0,20	3	0,60	
5	Belum semua kawasan memiliki akses terhadap layanan pengangkutan sampah yang memadai (Teknis)	0,10	2	0,20	
Total		1.00	13	2,70	
Selisih Kekuatan dan Kelemahan				0,40	(x)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa adanya pemisahan fungsi regulator dan operator (Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dan UPT sebagai operator) memiliki pengaruh sangat kuat yang disebabkan oleh kejelasan peran yang mendorong koordinasi efektif, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasional pengelolaan persampahan. Kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah dinilai berpengaruh sedang karena telah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program. Akan tetapi penerapannya di lapangan masih perlu penguatan agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat dan penegakan hukum.

Adanya Masterplan Pengelolaan Sampah juga masuk kategori pengaruh sedang, dokumen ini menjadi pedoman teknis dan strategis yang penting, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana tersebut. Kekuatan lain berupa ketersediaan TPA Galuga dan TPPAS Nambo dikategorikan berpengaruh sedang, mengingat kedua fasilitas ini mampu menampung volume sampah kota, namun keterbatasan umur layanan, jarak, dan kapasitas teknis mengurangi besaran pengaruhnya.

Tersedianya fasilitas TPS 3R dan TPST dengan sistem pengangkutan terkoordinasi diberi nilai pengaruh sedang karena mendukung konsep pengurangan sampah di sumber. Meski demikian, skala jangkauannya belum merata sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh seluruh kawasan.

Dari sisi kelemahan pada tabel diatas, faktor terbatasnya kapasitas TPA Galuga memiliki pengaruh sedang karena keterbatasan ini mempengaruhi daya tampung jangka panjang dan mendesak adanya solusi pengolahan sampah sebelum pembuangan akhir. Penerapan regulasi tentang sampah yang masih belum optimal dinilai memiliki pengaruh rendah, walaupun ada aturan jelas, lemahnya sosialisasi dan penegakan menyebabkan efektivitasnya terhadap perilaku masyarakat dan pelaku usaha belum maksimal.

Dari aspek infrastruktur, kurangnya infrastruktur pendukung daur ulang dan pengomposan berpengaruh sedang karena keterbatasan fasilitas ini langsung menghambat tercapainya

target pengurangan sampah melalui 3R. Minimnya insentif bagi masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan 3R juga berada pada pengaruh sedang. Tanpa rangsangan ekonomi atau penghargaan yang menarik, partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri menjadi terbatas. Terakhir, belum semua kawasan memiliki akses layanan pengangkutan yang memadai diberi pengaruh rendah, karena walaupun berdampak pada sebagian wilayah, hambatan ini masih bisa diatasi melalui penambahan armada dan perbaikan rute, sehingga pengaruh negatifnya belum besar secara keseluruhan.

Secara total, nilai skor IFE pada tabel diatas sebesar 3,10 menunjukkan bahwa faktor internal pengelolaan persampahan di Kota Bogor berada pada kategori cukup kuat. Kekuatan utama terletak pada struktur kelembagaan yang jelas dan dukungan regulasi formal, sementara kelemahan yang paling menonjol berkaitan dengan kapasitas infrastruktur dan minimnya insentif partisipasi masyarakat. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk mengoptimalkan keunggulan kelembagaan sekaligus memperbaiki kelemahan teknis dan partisipatif guna mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Hasil Evaluasi Faktor Strategis Eksternal
(Matriks External Factor Evaluation – EFE)

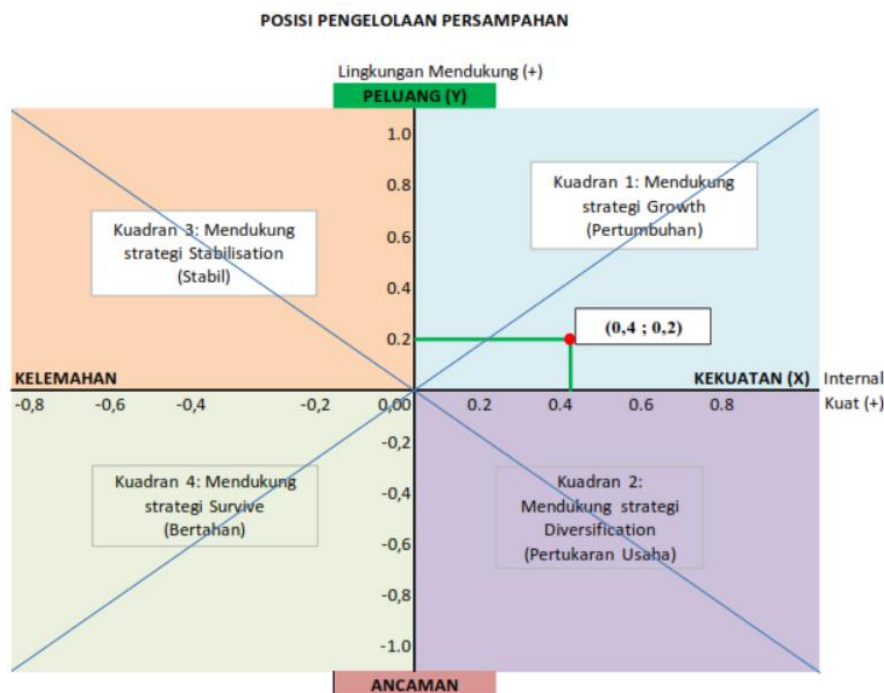
No	Elemen	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh	Ket
EKSTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)					
PELUANG (OPPORTUNITY)					
1	Dukungan teknologi pengolahan sampah yang semakin berkembang (Teknis)	0,20	4	0,80	
2	Adanya peluang kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas (Teknis)	0,20	3	0,60	
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan krisis sampah plastik (peranserta masyarakat)	0,20	3	0,60	
4	Potensi pendanaan dari donor internasional atau CSR perusahaan (Pendanaan)	0,20	3	0,60	
5	Perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan sampah perkotaan(Pendanaan)	0,20	3	0,60	
Total		1.00	16	3.20	
ANCAMAN (THREAT)					
1	Volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi (Teknis)	0,20	4	0,80	
2	Resistensi sosial terhadap pembangunan fasilitas pengolahan (Peranserta masyarakat)	0,20	3	0,60	
3	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan buang sampah (Regulasi)	0,20	3	0,60	
4	Fluktuasi harga bahan daur ulang yang memengaruhi kelangsungan industri daur ulang lokal (Keuangan)	0,20	2	0,40	
5	Ketergantungan pada TPA tanpa pengolahan memadai	0,20	3	0,60	
Total		1.00	15	3.00	
Selisih Peluang dan Ancaman				0,20	(y)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil penilaian faktor eksternal menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pengolahan sampah seperti RDF, MRF, dan TPS3R modern mendapat pengaruh sangat kuat karena langsung meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban TPA. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas berpengaruh sedang karena memberi akses sumber daya dan inovasi, tetapi koordinasi lintas pihak masih kurang. Kesadaran masyarakat soal lingkungan dan sampah plastik juga sedang, mengingat masyarakat mulai peduli, namun perubahan perilaku masih butuh edukasi dan dukungan berkelanjutan.

Pendanaan dari donor internasional/CSR mendapat pengaruh sedang karena bisa menjadi tambahan modal penting, tetapi pemanfaatannya tergantung kesesuaian program dan kemampuan mengelola. Dukungan pemerintah pusat juga sedang sebab memberi peluang regulasi dan pendanaan, namun manfaatnya baru maksimal jika koordinasi pusat-daerah berjalan baik.

Dari sisi ancaman, peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk berpengaruh sangat kuat karena langsung menambah beban pengangkutan dan pengolahan. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan fasilitas berpengaruh sedang karena bisa menghambat proyek jika sosialisasi tidak intensif. Masalah lain seperti kurangnya kepatuhan aturan buang sampah, fluktuasi harga daur ulang, dan ketergantungan pada TPA tanpa pengolahan memiliki pengaruh sedang karena meski menghambat namun masih bisa dikendalikan dengan kebijakan dan program yang tepat.



Gambar 4. 2 Kuadran Pengelolaan Persampahan di Kota Bogor

Dari hasil analisis IFAS dan EFAS serta untuk mencapai misi pengelolaan persampahan dibutuhkan beberapa sasaran yang dirumuskan melalui pendekatan SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas waktu) beserta strategi pencapaiannya, yang jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6 Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran (SMART)	Strategi
Meningkatkan efektivitas penanganan sampah dari sumber hingga TPA	Meningkatkan penanganan sampah dari 81,40% menjadi 100% pada tahun 2029	Optimalisasi armada dan rute pengangkutan sampah berbasis zonasi dan digitalisasi Peningkatan kapasitas TPST dan TPS3R
Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah	Peningkatan TPA Galuga melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (<i>Refuse-Derived Fuel</i>) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah.	Pengembangan Infrastruktur Teknologi RDF Penguatan Sistem Pengumpulan dan Pemilahan Sampah Kemitraan dan Investasi Teknologi Peningkatan Kapasitas SDM dan Sosialisasi
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular	Meningkatkan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 7,90 % pada Tahun 2029	Membangun dan merevitalisasi fasilitas TPS3R, Bank Sampah, dan Rumah Kompos di setiap kecamatan. Menguatkan peran komunitas, LSM, dan sektor informal (pemulung, bank sampah) dalam skema ekonomi sirkular. Mengembangkan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) untuk pemrosesan sampah yang bernilai ekonomi.
Memperkuat kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah berbasis kawasan	Implementasi Perda & Sanksi administrasi bagi kawasan yang tidak memilah dan mengelola sampah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	Menetapkan kawasan-kawasan prioritas (RT/RW, kelurahan, kawasan komersial, perumahan, dan perkantoran) sebagai lokasi pilot project pengelolaan sampah berbasis kawasan. Meningkatkan kapasitas aparat pengawas lapangan (Satpol PP, DLH, lurah/camat) dalam melakukan pembinaan dan penindakan. Mengembangkan sistem peringatan (teguran tertulis) secara bertahap untuk pelanggaran, sebelum pemberian sanksi denda atau pembekuan izin. Mendorong penerapan insentif-disinsentif: penghargaan bagi kawasan patuh dan sanksi bagi kawasan lalai.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam 3R	Seluruh RW memiliki minimal 1 kegiatan 3R aktif dan edukasi lingkungan pada tahun 2029	Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat Penyusunan Program Edukasi Lingkungan Berbasis RW Insentif, Penghargaan, dan Kolaborasi

Sumber : Hasil Analisis, 2025



BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini berisi mengenai ringkasan program dan kegiatan serta kebutuhan biaya pengembangan sanitasi

Pada Bab ini memuat uraian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi di Kota Bogor untuk periode 2025–2029. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada strategi yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan di masing-masing sub-sektor, yaitu air limbah domestik dan pengelolaan persampahan. Program dan kegiatan yang disusun mencakup aspek teknis dan non-teknis, dan dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya. Penyusunan daftar kegiatan juga mempertimbangkan kebutuhan aktual dan proyeksi ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan layanan sanitasi yang berkelanjutan di Kota Bogor.

Indikasi pendanaan program pembangunan sanitasi Kota Bogor dirancang berdasarkan potensi sumber pembiayaan yang meliputi:

- APBD Kota Bogor
- APBD Provinsi Jawa Barat
- APBN
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Sumber pembiayaan swasta/CSR
- Partisipasi masyarakat

Kebutuhan pendanaan dihitung berdasarkan evaluasi kondisi eksisting serta proyeksi kebutuhan tahunan selama lima (5) tahun ke depan. Indikasi program dan kegiatan ini juga merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan sanitasi Kota Bogor, yang terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan. Daftar lengkap program, kegiatan, besaran biaya indikatif, dan sumber pendanaannya untuk periode 2025–2029 dijabarkan lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

6.1 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kota Bogor Tahun 2026-2030, disusun dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing Sub-Sektor (Air Limbah Domestik dan Persampahan). Kebutuhan investasi pengembangan sanitasi Kota Bogor untuk 5 tahun kedepan berdasarkan sumber anggaran Pemerintah (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan DAK) serta Non Pemerintah (Swasta/CSR dan

Masyarakat). Rincian kerangka waktu, lokasi pelaksanaan, serta kebutuhan investasi setiap kegiatan telah disusun secara spesifik dan ringkas dalam tabel dibawah ini. Adapun uraian program serta rincian kegiatan secara mendetail dapat dilihat pada lampiran, sehingga seluruh informasi terkait prioritas pembangunan sanitasi Kota Bogor tersedia secara lengkap dan terstruktur.

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Kedepan

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	229,222	228,922	234,040	308,729	314,378	1,315,291
B	Persampahan	20,171	518,707	64,816	64,980	75,488	744,161
	Jumlah (a)	249,393	747,629	298,856	373,709	389,866	2,059,452
	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b)	38,596	40,620	43,774	45,007	46,935	214,932
	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)	41,784	42,620	43,472	44,342	45,229	217,447
	Gap 1 (a-b)	210,797	707,009	255,081	328,702	342,930	1,844,520
	Gap 2 (a-c)	207,608	705,009	255,383	329,367	344,637	1,842,005

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa total anggaran untuk pengembangan sanitasi sebesar Rp. 2.059.452.000.000 dengan sumber pendanaan yang terbagi dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, CSR/Swasta dan Masyarakat. Selain itu, terdapat daftar tunggu program yang memuat usulan kegiatan pengembangan sanitasi yang belum dapat teridentifikasi sumber pendanaan.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Kedepan per Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Pemerintah						
1	APBD Kota	83,085	81,785	104,585	150,201	102,042	521,697
2	APBD Provinsi	35,945	88,748	58,545	34,545	50,361	268,144
3	APBN	24,000	482,779	92,461	101,010	58,663	758,913
4	DAK	19,400	19,400	20,150	74,270	19,400	152,620
	Jumlah A	162,430	672,711	275,741	360,026	230,466	1,701,373
B	Non- Pemerintah						
1	CSR Swasta	32,000	32,100	32,000	35,235	102,328	233,663
2	Masyarakat	1,600	1,600	1,600	1,600	1,618	8,018
	Jumlah B	33,600	33,700	33,600	36,835	103,946	241,681
	Total (A+B)	196,030	706,411	309,341	396,861	334,412	1,943,054
	Daftar Tunggu	19,195	6,715	31,715	31,760	26,888	116,273

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa kebutuhan biaya berdasarkan sumber anggaran dari APBN merupakan biaya yang jumlahnya paling besar dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk pengembangan sanitasi 2025-2029, jika dibandingkan dengan jumlah anggaran dari APBD Kota. Selain itu, terdapat daftar tunggu pengembangan sanitasi yang berisi usulan kegiatan dan kebutuhan biaya yang belum dapat dipetakan atau teridentifikasi sumber pendanaannya.

6.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

Rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan DAK untuk 5 tahun kedepan, secara spesifik dituangkan dalam bentuk tabel-tabel dibawah ini. Secara umum kebijakan yang diambil dalam hal pemenuhan pendanaan terkait dengan kedua sub sektor sanitasi ialah melalui dana APBD Kota terlebih dahulu yang kemudian kekurangan atau gap yang masih ada mengingat keterbatasan dana APBD Kota, diupayakan dipenuhi melalui bantuan yang berasal dari Provinsi dan Pusat.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Bogor

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	76,004	75,504	91,229	88,741	88,807	420,285
B	Persampahan	7,081	6,281	13,356	61,460	13,235	101,412
	Jumlah	83,085	81,785	104,585	150,201	102,042	521,697

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.3. diketahui total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana APBD Kota Bogor ialah Rp. 521.697.000.000 Kebutuhan biaya terbesar berada di tahun 2029 Rp.150.201.000.000. kenaikan biaya pada tahun 2029 dipengaruhi oleh rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce Reuse Recycle*. Selain itu, pada tahun 2029 juga direncanakan peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan instalasi pengolahan air limbah domestik yang memerlukan investasi signifikan. Peningkatan ini sejalan dengan upaya akselerasi pencapaian target strategi sanitasi Kota Bogor dalam mendukung SSK dan RPJMD.

Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	33,445	88,098	33,445	34,195	33,513	222,696
B	Persampahan	2,500	650	25,100	350	16,848	45,448
	Jumlah	35,945	88,748	58,545	34,545	50,361	268,144

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.4. diketahui total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat ialah Rp. 278.144.000.000. Kebutuhan biaya terbesar berada di tahun 2027 sebesar Rp. 88.748.000.000.

Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	24,000	24,000	67,461	101,010	58,663	275,134
B	Persampahan	0	458,779	25,000	0	0	483,779
	Jumlah	24,000	482,779	92,461	101,010	58,663	758,913

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.5. diketahui total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana APBN ialah Rp. 758.913.000.000. Kebutuhan biaya terbesar berada di tahun 2027. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut direncanakan adanya pembangunan *landfill unit refuse* atau LUR baru di tempat pembuangan akhir / TPA. Pembangunan LUR ini memerlukan alokasi anggaran yang besar mengingat investasi ini ditujukan untuk mendorong pencapaian target pengelolaan persampahan yang optimal.

Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	19,400	19,400	20,150	73,820	19,400	152,170
B	Persampahan	0	0	0	450	0	450
	Jumlah	19,400	19,400	20,150	74,270	19,400	152,620

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.6. diketahui total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana DAK ialah Rp. 152.620.000.000. Kebutuhan biaya terbesar berada di tahun 2029. Ditahun tersebut, merencanakan penyediaan sub sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD setempat) untuk memperluas layanan sanitasi di permukiman, serta optimalisasi SPALD setempat dan IPLT di kawasan strategis agar pengelolaan lumpur tinja dan air limbah menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada tahun 2029 juga terdapat rencana pengadaan gerobak sampah untuk mendukung operasional persampahan, meningkatkan kapasitas pengumpulan dan mendukung tercapainya target pengelolaan sampah. Beragam kegiatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas operasional inilah yang menjadi penyebab utama besarnya kebutuhan anggaran DAK di tahun 2029.

6.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH

Rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari Non Pemerintah (kontribusi CSR/Swasta dan masyarakat) untuk 5 tahun kedepan. Pada kedua tabel dibawah ini terdapat informasi yang diketahui bahwa kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah diperoleh melalui pendanaan sanitasi partisipasi swasta/CSR, sedangkan pendanaan sanitasi berasal dari partisipasi masyarakat tidak berupa anggaran atau biaya, melainkan berupa Kerjasama, tenaga dan perhatian masyarakat.

Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Partisipasi Swasta/CSR

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	32,000	32,000	32,000	32,000	76,878	204,878
B	Persampahan	0	100	0	3,235	25,450	28,785
	Jumlah	32,000	32,100	32,000	35,235	102,328	233,663

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel V.7. diketahui total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana Partisipasi Swasta/CSR adalah Rp. 233.663.000.000 Sedangkan berdasarkan tabel V.8. dibawah ini total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah domestik dan persampahan dengan sumber dana Partisipasi Masyarakat adalah Rp 8.018.000.000.

Tabel 5. 8 Rekapitulasi dengan Sumber Partisipasi Masyarakat

No	Sub Sektor	Indikasi Biaya (Juta Rupiah)					Total Anggaran
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Air Limbah Domestik	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000
B	Persampahan	0	0	0	0	18	18
	Jumlah	1,600	1,600	1,600	1,600	1,618	8,018

Sumber: Hasil Analisis, 2025



BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini berisi mengenai monitoring dan evaluasi capaian SSK

Pada Bab ini membahas salah satu strategi pendukung yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan di bidang sanitasi, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari perencanaan Strategi Sanitasi Kota Bogor, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program dan capaian kegiatan sanitasi selama lima tahun masa perencanaan.

Monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pencapaian target secara bertahap dan konsisten. Kegiatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kendala serta menentukan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan efektif. Sistem kerja organisasi dalam pelaksanaan sanitasi mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi, yang semuanya merupakan satu kesatuan proses kinerja yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi akan melibatkan berbagai sektor terkait sanitasi. Keterlibatan lintas sektor ini penting sebagai bagian dari proses penilaian capaian program sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian program kegiatan sanitasi berikutnya. Ada tiga (3) unsur pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang harus dipisahkan kewenangannya, namun dalam pelaksanaan tugas saling terintegrasi secara berkesinambungan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi
- 2) Pengawasan monitoring dan evaluasi sanitasi
- 3) Pelaporan monitoring dan evaluasi sanitasi

Tujuan pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota Bogor. Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi per sub sektor. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kota Bogor.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari.

Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk:

- 1) Memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) atau dokumen perencanaan terkait lainnya;
- 2) Memverifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan;
- 3) Mengukur capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 4) Mengidentifikasi capaian dan kelemahan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja;
- 6) Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan.

Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai aspek-aspek seperti konsep, perencanaan, pelaksanaan, serta dampak dari kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil dari proses pemantauan dan evaluasi ini sangat penting sebagai masukan (umpan balik) bagi para pengambil kebijakan dalam hal:

- 1) Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
- 2) Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi;
- 3) Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi sanitasi.

Monitoring dan evaluasi juga diperuntukkan untuk:

- 1) Pemantauan capaian pelaksanaan kegiatan untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Kegiatan-kegiatan ini megacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh OPD.
- 3) Pemantauan capaian strategis untuk menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsector sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan, sasaran serta tahapan pencapaian sanitasi.

Guna menjamin ketepatan sasaran dan penugasan maka struktur kelembagaan monitoring dan evaluasi akan disesuaikan tupoksi dari masing-masing OPD. Maka kelembagaan monitoring dan evaluasi yang telah terdapat dalam kelembagaan Pokja PKP Kota Bogor dikuatkan dalam SK Walikota Bogor. Kelompok kerja di Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap perencanaan, implementasi dan manfaat rencana strategis pembangunan sanitasi di Kota Bogor; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, implementasi dan manfaat rencana strategis pembangunan sanitasi di Kota Bogor.

Kelembagaan Monev berada di bawah Pokja Sanitasi Kabupaten, khususnya Bidang Monitoring dan Evaluasi, yang bertugas menyiapkan bahan masukan bagi dokumen strategi (SSK, BPS, dkk), memantau pelaksanaan program sanitasi, menyusun rekomendasi tindak lanjut, dan melaporkan perkembangan secara berkala. Pokja mengawal integrasi program sanitasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, memantau rencana kegiatan SKPD, dan melaporkan perkembangan ke Walikota hingga Gubernur.

Monitoring capaian SSK bertujuan mengukur kemajuan tujuan, sasaran, dan indikator sektor sanitasi (air limbah dan persampahan). Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan fisik di lapangan dan telaah dokumen realisasi fisik/keuangan. Data dikumpulkan dari SKPD dan

didokumentasikan untuk membangun basis data sanitasi. Evaluasi capaian SSK memeriksa perbedaan antara target dan capaian baik pada tingkat kegiatan maupun sasaran strategis, termasuk keluaran dan investasi yang dilakukan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pelaporan hasil Monev memuat deviasi capaian, penyebab, dan rekomendasi. Laporan disampaikan kepada walikota, DPRD, kepala SKPD, serta masyarakat dan stakeholder melalui dokumen tertulis dan forum sosialisasi. Jadwal pelaporan berkala dilakukan setiap semester dan tahunan. Monev sanitasi bersifat partisipatif, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh kegiatan SSK berjalan sesuai rencana, capaian strategis terpenuhi, dan keberlanjutan layanan sanitasi terjamin.

Jadwal monitoring dan evaluasi implementasi SSK Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah. Adapun penjelasan dari setiap objek pemantauan pada Tabel 6.1 Jadwal Pelaporan dan Monitoring Implementasi SSK Kota Bogor Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Input capaian strategis, merupakan pemantauan atas pencapaian indikator-indikator strategis utama sektor sanitasi yang telah ditargetkan dalam dokumen SSK, seperti peningkatan akses aman. Objek ini memastikan bahwa capaian agregat tingkat kota terhadap target-target sanitasi termonitor secara berkala;
- 2) Input menu investasi adalah pemantauan dan pelaporan mengenai realisasi investasi (dana, pembangunan, atau pengadaan sarana) yang dilakukan untuk mendukung program sanitasi sesuai rencana;
- 3) Input menu akses, merupakan pemantauan akses layanan sanitasi, seperti jumlah rumah tangga baru yang mendapatkan layanan sanitasi layak, cakupan sambungan bar uke IPAL komunal, keterhubungan masyarakat pada sistem pengelolaan sampah, dan lain-lain. Objek ini penting untuk memastikan progress pemerataan layanan;
- 4) Input menu infrastruktur, merupakan pemanfaatan kondisi, perkembangan, kualitas dan ketersediaan infrastruktur fisik sanitasi. Data yang dikumpulkan mencakup status operasional, pemeliharaan dan kebutuhan perbaikan infrastruktur sanitasi;
- 5) Input menu progress, mengacu pada pelaporan kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan yang ada dalam SSK dan dokumen perencanaan lainnya;
- 6) Input data sanitasi, meliputi pengumpulan dan verifikasi data teknis seluruh aspek sanitasi (air limbah domestik, sampah serta perilaku hidup bersih dan sehat). Data ini digunakan sebagai bahan analisis capaian indikator, penyusun laporan evaluasi dan pembaruan basis data sanitasi;
- 7) Input SPM (Standar Pelayanan Minimum), merupakan Pemantauan terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan untuk sektor sanitasi oleh pemerintah sesuai regulasi nasional. Termasuk didalamnya adalah apakah pemerintah kota telah mencapai standar minimal layanan air limbah domestik dan sampah sesuai ketentuan pusat;
- 8) Kunjungan lapangan, merupakan inspeksi fisik lapangan ke lokasi kegiatan sanitasi (IPAL, TPS3R, Kawasan Kumuh) guna mengecek kesesuaian laporan dengan kondisi nyata. Tujuannya untuk verifikasi fisik, evaluasi kualitas output infrastruktur, identifikasi kendala serta pembinaan masyarakat.
- 9) Rapat Koordinasi Rutin, merupakan koordinasi periodic antara OPD dalam rangka sinkronisasi data, progress, permasalahan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut kebijakan dan program. Rapat ini menjadi sarana menjaga konsistensi pelaksanaan di semua lini serta memastikan seluruh informasi program terdistribusi dengan baik antara pemangku kepentingan.

Tabel 6. 1 Jadwal Pelaporan dan Monitoring Implementasi SSK Kota Bogor Tahun 2025-2029

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Penerima Laporan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		
1	Input Capaian Strategis													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	3 Bulan	Bapperida sebagai Sekretariat Pokja PKP
2	Input Menu Investasi													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	3 Bulan	
3	Input Menu Akses													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	3 Bulan	
4	Input Menu Infrastruktur													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	6 Bulan	
5	Input Menu Progres													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	12 Bulan	
6	Input Data Sanitasi													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	4 Bulan	
7	Input SPM													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	DPUPR dan DLH	4 Bulan	
7	Kunjungan Lapangan													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	10 Bulan	
8	Rapat Koordinasi Rutin													Bapperida	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	Bapperida, DPUPR, DLH, dan Dinkes	12 Bulan	